

# **BULETIN EKONOMI**

**JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN**

Volume 14, Nomor 1, April 2016

ISSN 1410-2293



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UPN "VETERAN" YOGYAKARTA**

BULETIN EKONOMI	VOLUME 14	Nomor 1	Halaman 1-100	Yogyakarta April 2016	ISSN 1410-2293
-----------------	-----------	---------	------------------	--------------------------	-------------------



## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam Sejahtera

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya BULETIN EKONOMI Vol. 14, No. 1, April 2016 telah dapat diterbitkan. Artikel yang masuk ke Redaksi cukup banyak, baik kuantitas, kualitas (substansi, aktualisasi, originalitas), maupun variasi topiknya. Oleh karenanya, Redaksi harus benar-benar menyeleksinya sesuai komitmen untuk menjadikan BULETIN EKONOMI sebagai jurnal ilmiah yang populer.

Pada edisi kali ini, terdiri atas delapan hasil studi empiris dan satu artikel telaah pengabdian. Hasil studi empiris yang dimuat pada edisi kali ini adalah : “Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta)” oleh Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyingsih, ”Pengaruh Tekanan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan *Job Relevant Information* sebagai Variabel Mediator” oleh Zaenal Afifi dan Nanik Ermayanti, ”Perencanaan Karir Untuk Meningkatkan Kesadaran Karir Pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Niaga Politenik NSC Surabaya” oleh Dyah Widowati, ”Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen” oleh Murni Sulistyowati, Septiana Novita Dewi dan Aris Tri Haryanto, ”Optimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukorarjo” oleh Triyanto, Betty Eliya Rokhmah dan Ahmad Sidiq, ”Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah” oleh Tri Prastiwi, Muhammad Arfan dan Darwanis, ”Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Laba” oleh Lita Yulita Fitriyani, Marita dan Cahayani Budi Astuti dan ”Pengaruh Kontribusi Pertambangan terhadap Eskpor pada Kontribusi Pertanian terhadap Ekspor di Indonesia Periode 2007-2013” oleh Sultan.

Sedangkan artikel telaah pengabdian dalam terbitan ini adalah ”*Waste Utilization of Renewable Energy Sources Know to be Useful (Biogas)*” oleh Noor Azis, Masruki Kabib dan Dwi Soegiarto.

Akhirnya, semoga BULETIN EKONOMI edisi kali ini dapat memberikan manfaat bagi semua pembaca. Kritik dan saran demi kesempurnaan jurnal ini sangat bermanfaat dan ditunggu Redaksi, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Hormat kami

Redaksi



# BULETIN EKONOMI

JURNAL MANAJEMEN, AKUNTANSI DAN EKONOMI PEMBANGUNAN

Volume 14, Nomor 1, April 2016

ISSN 1410-2293

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta) Agus Tri Basuki dan Endah Saptutyningsih .....	1-20
Pengaruh Tekanan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial dengan <i>Job Relevant Information</i> sebagai Variabel Mediator Zaenal Afifi dan Nanik Ermayanti .....	21-32
Perencanaan Karir Untuk Meningkatkan Kesadaran Karir Pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Niaga Politenik NSC Surabaya Dyah Widowati .....	33-40
Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen Murni Sulistyowati, Septiana Novita Dewi dan Aris Tri Haryanto .....	41-52
<i>Waste Utilization of Renewable Energy Sources Know to be Useful (Biogas)</i> Noor Azis, Masruki Kabib dan Dwi Soegiarto .....	53-64
Optimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Triyanto, Betty Eliya Rokhmah dan Ahmad Sidiq .....	65-78
Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Tri Prastiwi, Muhammad Arfan dan Darwanis .....	79-84
Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Laba Lita Yulita Fitriyani, Marita dan Cahayani Budi Astuti .....	85-92
Pengaruh Kontribusi Pertambangan terhadap Eskpor pada Kontribusi Pertanian terhadap Ekspor di Indonesia Periode 2007-2013 Sultan .....	93-100



**ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH TERHADAP  
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA  
TAHUN 2008-2014  
(STUDI KASUS KAB/KOTA D I YOGYAKARTA)**

Agus Tri Basuki<sup>1</sup>  
Endah Saptutyningsih<sup>2</sup>

***Abstract: Analysis of Factors Influencing Year Against Human Development Index 2008-2014 (Case Study District / City of Yogyakarta).** The purpose of this study is eager to see the effect of per capita income, Government Spending For Health, Government Spending For Public Facilities, Gini ratio, and the number of Poor to Development Index Mnanusia in 5 districts / cities in Yogyakarta Special Region. This study is an observational case study with five districts / cities in Yogyakarta, with a term of 7 years (2008-2014). The research object is composed of five independent variables, namely: income per capita, Government Spending For Health, Government Spending For Public Facilities, Gini Ratio and Number of Poor People. By using a panel data it can be concluded largely independent variables affect the index of human development unless a per capita income that does not have an influence on increasing index of human development, it is because of the increase in the average income per capita has not been able to push up per capita, in other words the increase in revenue per capita has not been able to improve the general welfare of society.*

**Abstrak: Analisis Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2008-2014 (Studi Kasus Kabupaten/Kota Daerah Istimewa Yogyakarta).** Tujuan Penelitian ini adalah ingin melihat pengaruh Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, Rasio Gini, dan Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indek Pembangunan Mnanusia di 5 kabupaten/kota di Daerah istimewa Yogya. Penelitian ini merupakan studi kasus observasional dengan 5 kabupaten/kota di DI Yogyakarta, dengan jangka waktu 7 tahun (2008-2014). Obyek penelitian terdiri dari lima variabel bebas, yaitu: Pendapatan Perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah Untuk Fasilitas Umum, Rasio Gini, dan Jumlah Penduduk Miskin. Dengan menggunakan data panel maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagian besar variable bebas mempengaruhi indek pembangunan manusia kecuali pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap peningkatan indeks Pembangunan Manusia, hal ini karena kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

**Kata Kunci:** HDI, data panel, Random Effect dan Gini Ratio.

---

1 Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, email: agus-tribasuki@yahoo.com

2 Dosen Program Studi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, email: end\_naufal@yahoo.com

## PENDAHULUAN

Penelitian Indikator Indeks Pembangunan Manusia (Human Development Index) merupakan salah satu indikator untuk mengukur taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk. Kualitas fisik; tercermin dari angka harapan hidup; sedangkan kualitas non fisik (intelektualitas) melalui lamanya rata-rata penduduk bersekolah dan angka melek huruf; dan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat yang tercermin dari nilai purchasing power parity (ppp) index.

Tujuan akhir pembangunan adalah kesejahteraan rakyat. Manusia bukan hanya merupakan obyek pembangunan tetapi diharapkan dapat menjadi subyek, sehingga dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi kemajuan suatu wilayah yang secara makro menjadi kemajuan suatu Negara.

Keberhasilan pembangunan diukur dengan beberapa parameter, dan paling populer saat ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau Human Development Indeks (HDI). Alat ukur ini diluncurkan oleh Mahbub ul Haq dalam bukunya yang berjudul *Reflections on Human Development* (1995), dan telah disepakati dunia melalui United Nation Development Programme (UNDP). Besarnya angka indeks tersebut, secara simultan perlu diteliti beberapa faktor yang diduga berpengaruh terhadap naik turunnya IPM.

Tabel 1  
Perkembangan IPM menurut Kabupaten/Kota di DIY, 2006-2013

Kabupaten/Kota	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Kulonprogo	72,01	72,76	73,26	73,77	74,49	75,04	75,33	75,95
Bantul	71,96	72,78	73,38	73,75	74,53	75,05	75,51	76,01
Gunung Kidul	69,44	69,68	70,00	70,17	70,45	70,84	71,11	71,64
Sleman	76,22	76,70	77,24	77,70	78,20	78,79	79,39	79,97
Yogyakarta	77,81	78,14	78,95	79,28	79,52	79,89	80,24	80,51
DIY	73,70	74,15	74,88	75,23	75,77	76,31	76,75	77,37

Sumber : Statistik Daerah Istimewa Yogyakarta 2014

Secara umum, perkembangan IPM DIY selama tahun 2006-2013 memiliki pola yang sama dengan dengan angka IPM nasional. Namun demikian, level IPMDIY masih jauh di atas level IPM nasional. Hal ini mengisyaratkan level pencapaian pembangunan manusia di DIY yang relatif lebih baik dibandingkan dengan rata-rata pencapaian pembangunan manusia secara nasional. Berdasarkan levelnya, angka IPM DIY pada tahun 2013 berada di peringkat 33 kedua tertinggi secara nasional setelah Provinsi DKI Jakarta. Peringkat ini membaik setelah sebelumnya selalu berada di peringkat keempat tertinggi sesudah Provinsi DKI Jakarta, Sulawesi Utara serta Riau sejak tahun 2008. Perbedaan laju perubahan IPM selama periode waktu tertentu dapat diukur menggunakan rata-rata reduksi shortfall per tahun. Nilai shortfall mengukur keberhasilan dipandang dari segi jarak antara apa yang telah dicapai dengan apa yang harus dicapai, yaitu jarak dengan nilai maksimum. Nilai reduksi shortfall IPM DIY selama periode 2012-2013 tercatat sebesar 2,67.

Pencapaian pembangunan manusia di semua kabupaten/kota DIY pasca krisis ekonomi 1997/1998 menunjukkan perkembangan yang semakin membaik. Hal ini terlihat dari nilai IPM selama periode 1999-2012 di semua kabupaten/kota yang cenderung meningkat secara bertahap. Secara umum, kualitas pembangunan manusia yang tertinggi dicapai oleh Kota Yogyakarta dan diikuti oleh Kabupaten Sleman dan Bantul. Sebaliknya, pencapaian pembangunan manusia di Kabupaten Gunungkidul selama satu dekade terakhir selalu berada di peringkat terakhir. Pencapaian IPM di seluruh kabupaten di DIY sampai dengan tahun 2013 termasuk dalam kategori “menengah sedang” atau memiliki nilai IPM antara 66-80, bahkan khusus untuk Kota Yogyakarta termasuk dalam kategori “tinggi” karena memiliki nilai IPM di atas 80.

IPM tertinggi tahun 2013 masih disandang oleh Kota Yogyakarta dengan nilai 80,51. Posisi selanjutnya adalah Kabupaten Sleman (IPM sebesar 79,97) dan Bantul (IPM sebesar 76,01). Sebaliknya, IPM terendah terjadi di Gunungkidul dengan nilai 71,64. Gambaran perbandingan pencapaian IPM Kabupaten Gunungkidul dengan Kota Yogyakarta menjadi sebuah perbandingan yang kontras. Fenomena ini secara tidak langsung menggambarkan adanya kesenjangan yang cukup lebar dalam hal pembangunan ekonomi dan sosial antar wilayah di DIY. Ke depan, perlu dipikirkan upaya-upaya yang lebih intensif untuk mengurangi kesenjangan ini. Salah satu cara yang bisa ditempuh adalah melalui pengembangan infrastruktur dan ekonomi yang berbasis lokal. Gunungkidul dikenal sebagai wilayah yang memiliki potensi wisata alam yang luar biasa, sehingga jalinan kerja sama antara pemerintah selaku fasilitator dengan pihak swasta maupun masyarakat untuk pengembangan potensi ini menjadi penting untuk dilakukan. Kegiatan investasi yang masih terpusat di Kota Yogyakarta dan sekitarnya harus diperluas cakupannya dan diarahkan untuk pengembangan wilayah-wilayah yang memiliki potensi tetapi infrastrukturnya masih tertinggal.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riil atau pendapatan nasional riil. Jadi perekonomian dikatakan tumbuh atau berkembang bila terjadi pertumbuhan output riil. Definisi pertumbuhan ekonomi yang lain adalah bahwa pertumbuhan ekonomi terjadi bila ada kenaikan output perkapita. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan kenaikan taraf hidup diukur dengan output riil per orang. Sementara negara-negara miskin berpenduduk padat dan banyak hidup pada taraf batas hidup dan mengalami kesulitan menaikannya, beberapa negara maju menikmati taraf hidup tinggi dan terus bertambah. Berkaitan dengan hal itu, strategi alokasi belanja daerah memainkan peranan yang tidak kalah penting guna meningkatkan penerimaan daerah. Dalam upaya untuk meningkatkan kontribusi publik terhadap penerimaan daerah, alokasi belanja modal hendaknya lebih ditingkatkan. Belanja Modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah diantaranya pembangunan dan perbaikan sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, sehingga masyarakat juga menikmati manfaat dari pembangunan daerah.

Anggaran belanja modal ini didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan maupun untuk fasilitas publik. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih banyak digunakan untuk belanja rutin yang relatif kurang produktif. Pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif, misal untuk melakukan aktivitas pembangunan, dengan kata lain belanja modal dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/inventaris yang memberikan manfaat lebih dari satu periode akuntansi, termasuk di dalamnya adalah pengeluaran untuk biaya pemeliharaan yang sifatnya mempertahankan atau menambah manfaat dan meningkatkan kapasitas serta kualitas aset.

Berdasarkan uraian di atas menunjukkan bahwa indeks pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi dan belanja operasional secara simultan berdampak terhadap jumlah alokasi belanja modal. Indeks pembangunan manusia dicerminkan oleh pembangunan berbagai macam sarana prasarana dan infrastruktur guna meningkatkan taraf kualitas fisik dan non fisik penduduk serta tingkat kesejahteraan masyarakat baik dari aspek pendidikan, kesehatan dan kebutuhan akan ketersediaan perumahan yang layak. Untuk ini maka pemerintah DIY Yogyakarta memerlukan alokasi belanja modal untuk mewujudkan pencapaian indeks pembangunan manusia yang baik.

## Rumusan Masalah

1. Seberapa besar pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Seberapa besar pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Seberapa besar pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Seberapa besar pengaruh Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Seberapa besar pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Tujuan Penelitian, Tujuan penelitiannya adalah :

1. Ingin mengetahui pengaruh Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila pendapatan perkapita meningkat akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.
2. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan meningkat akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.
3. Ingin mengetahui pengaruh Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum meningkat akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia juga meningkat.
4. Ingin mengetahui pengaruh Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila Gini Rasio menurun akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat.
5. Ingin mengetahui pengaruh jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia, apabila jumlah penduduk miskin menurun akan menyebabkan Indeks Pembangunan Manusia meningkat.

Kebijakan otonomi daerah merupakan pendelegasian kewenangan yang disertai dengan penyerahan dan pengalihan pendanaan, sarana dan prasarana dan sumber daya manusia (SDM) dalam kerangka desentralisasi fiskal. Beberapa manfaat melaksanakan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kinerja pemerintah lokal, meningkatkan ketertanggapan pemerintah terhadap kebutuhan-kebutuhan masyarakat, terutama kebutuhan dasar yang ditunjukkan dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau disebut juga dengan Human Development Index (HDI) adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi. IPM juga digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup (UNDP, 1996).

IPM mulai digunakan oleh UNDP sejak tahun 1990 untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara. IPM merupakan indikator komposit tunggal yang digunakan untuk mengukur pencapaian pembangunan manusia yang telah dilakukan di suatu wilayah (UNDP, 2004). Walaupun tidak dapat mengukur semua dimensi dari pembangunan, namun mampu mengukur dimensi pokok pembangunan manusia yang dinilai mencerminkan status kemampuan dasar (*basic capabilities*) penduduk.

IPM merupakan gabungan dari tiga unsur utama pembangunan manusia, yaitu lamanya hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*) yang diukur oleh tingkat melek orang dewasa (dengan timbangan dua pertiga) serta rata-rata tahun bersekolah (timbangan : satu pertiga), standar hidup layak (*standard of living*) yang diukur oleh PDB per kapita setelah disesuaikan dengan paritas daya beli (*purchasing power Parity /PPP*).

Pembangunan manusia yang dimaksudkan dalam IPM tidak sama dengan pengembangan sumber daya manusia yang biasanya dimaksudkan dalam teori ekonomi. Sumber daya manusia menunjuk pada manusia sebagai salah satu faktor produksi, yaitu sebagai tenaga kerja yang produktivitasnya harus ditingkatkan. Dalam hal ini manusia hanya sebagai alat (input) untuk mencapai tujuan yaitu peningkatan output barang dan jasa. Sedangkan manusia di dalam IPM lebih diartikan sebagai tujuan pembangunan yang berorientasi akhirnya pada peningkatan kesejahteraan manusia (Gevisioner, 2004).

Salah satu ukuran IPM adalah besarnya pendapatan nasional yang digunakan untuk belanja pendidikan (Kuncoro, 2004). Konsekuensi penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengakibatkan perlunya perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang menyebabkan terjadinya transfer yang cukup signifikan didalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut untuk memberi pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang mungkin tidak penting. Hakekat pembangunan pada dasarnya adalah pembangunan manusia (Suyanto, 2009). Secara umum kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) adalah kemampuan pemerintah daerah untuk menghimpun pendapatan berdasarkan sumber-sumber yang dimiliki.

Pada tahun 1990, UNDP memperkenalkan suatu indikator yang telah dikembangkannya, yaitu suatu indikator yang dapat menggambarkan perkembangan pembangunan manusia secara terukur dan representatif, yang dinamakan Human Development Index (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

Angka IPM berkisar antara 0 hingga 100. Semakin mendekati 100, maka hal tersebut merupakan indikasi pembangunan manusia yang semakin baik. Berdasarkan nilai IPM, UNDP membagi status pembangunan manusia suatu negara atau wilayah ke dalam tiga golongan, yaitu:

1.  $IPM < 50$  (rendah)
2.  $50 \leq IPM < 80$  (sedang/menengah)
3.  $IPM \geq 80$  (tinggi)

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari tiga indeks dari dimensi yang menggambarkan kemampuan dasar manusia dalam memperluas pilihan-pilihan. Rumus umum yang dipakai adalah sebagai berikut (UNDP, 2004)

$$IPM = \frac{1}{3}(Y_1 + Y_2 + Y_3)$$

Dengan penjelasan:

IPM = Indeks Pembangunan Manusia

Y1 = Indeks Harapan Hidup

Y2 = Indeks Pendidikan

Y3 = Indeks Standard Hidup Layak

Teori pembentukan IPM diukur dengan 3 dimensi, yaitu (UNDP-2004) : Berumur panjang dan sehat di tunjukan oleh harapan hidup ketika lahir, yang dirumuskan menjadi Angka harapan hidup. Berdimensi ilmu pengetahuan yang diukur dengan tingkat baca tulis dan rata-rata lama sekolah, kedua komponen tersebut membentuk Indeks Pendidikan. Dimensi standar hidup layak ditunjukan oleh pengeluaran riil perkapita, yang di bakukan dalam Indeks Pendapatan.

IPM merupakan indeks komposit yang dihitung sebagai rata-rata sederhana dari indeks harapan hidup ( $e_0$ ), indeks pendidikan (angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indeks standar hidup layak.

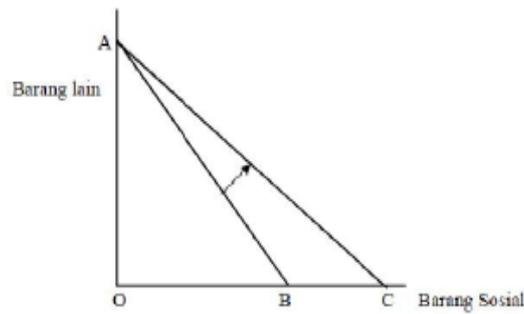
Komponen IPM adalah usia hidup (*longevity*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent living*). Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup atau  $e_0$  yang dihitung menggunakan metode tidak langsung (metode Brass, varian Trussel) berdasarkan variabel rata-rata anak lahir hidup dan rata-rata anak yang masih hidup.

Komponen pengetahuan diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah yang dihitung berdasarkan data Susenas Kor. Sebagai catatan, UNDP dalam publikasi tahunan HDR sejak 1995 menggunakan indikator partisipasi sekolah dasar, menengah, dan tinggi sebagai pengganti rata-rata lama sekolah karena sulitnya memperoleh data rata-rata lama sekolah secara global. Indikator angka melek huruf diperoleh dari variabel kemampuan membaca dan menulis, sedangkan indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan; yaitu tingkat/kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.

Komponen standar hidup layak diukur dengan indikator rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan. Sebagai catatan, UNDP menggunakan indikator PDB per kapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) sebagai ukuran komponen tersebut karena tidak tersedia indikator lain yang lebih baik untuk keperluan perbandingan antar negara.

Pemerintah dalam hal ini memiliki berbagai peran dalam perekonomian. Terdapat tiga peran utama yang harus dapat dilaksanakan dengan baik dalam perekonomian oleh pemerintah, menurut Guritno (2001) yaitu: (1) Peran Stabilisasi, Pemerintah lebih berperan sebagai stabilisator untuk menjaga agar perekonomian berjalan normal. Menjaga agar permasalahan yang terjadi pada satu sektor perekonomian tidak merembet ke sektor lain. (2) Peran Distribusi, Pemerintah harus membuat kebijakan-kebijakan agar alokasi sumber daya ekonomi dilaksanakan secara efisien agar kekayaan suatu negara dapat terdistribusi secara baik dalam masyarakat. (3) Peran Alokasi, Pada dasarnya sumber daya yang dimiliki suatu negara adalah terbatas. Pemerintah harus menentukan seberapa besar dari sumber daya yang dimiliki akan dipergunakan untuk memproduksi barang-barang publik, dan seberapa besar akan digunakan untuk memproduksi barang-barang individu. Pemerintah harus menentukan dari barang-barang publik yang diperlukan warganya, seberapa besar yang harus disediakan oleh pemerintah, dan seberapa besar yang dapat disediakan oleh rumah tangga perusahaan.

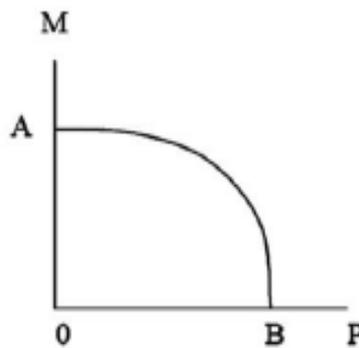
Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sukirno, 2000) yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Tujuan dari kebijakan fiskal ini adalah dalam rangka menstabilkan harga, tingkat output maupun kesempatan kerja dan memacu pertumbuhan ekonomi. Secara teoritis efek pengeluaran pemerintah jika dihubungkan dengan konsep budget line dapat dijelaskan sebagai berikut :



Gambar 1. Perubahan Budget Line Karena Adanya Pengeluaran Pemerintah  
 Sumber: Sukirno (2000)

Semula dengan anggaran tertentu area konsumsi berada pada pilihan yang dibatasi oleh garis anggaran AB. Adanya pengeluaran pemerintah untuk barang sosial, misalnya : subsidi untuk meringankan sekolah membuat garis anggaran bergeser ke kanan yakni garis AC. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengeluaran pemerintah dapat memperluas pilihan manusia. Dalam konteks ini semakin besar Belanja Daerah akan memberi peluang yang lebih luas untuk meningkatkan IPM.

Menurut Todaro (2006), pendekatan yang sederhana dalam masalah distribusi pendapatan dan kemiskinan adalah dengan memakai kerangka kemungkinan produksi. Untuk melukiskan permasalahannya, produksi dalam suatu daerah atau negara dibedakan menjadi dua kelompok barang, yaitu barang kebutuhan pokok (makanan, minuman, pakaian dan perumahan) serta yang kedua barang mewah. Dengan asumsi semua faktor produksi telah dimanfaatkan secara penuh, maka permasalahan yang muncul adalah bagaimana menentukan kombinasi barang yang akan diproduksi dan bagaimana masyarakat menurut pilihannya. Gambar 2.4 berikut ini memberikan gambaran mengenai masalah ini.



Gambar 2. Kurva Kemungkinan Produksi

Sumbu vertikal menunjukkan jumlah produksi barang mewah, sementara sumbu horizontal menunjukkan jumlah produksi barang kebutuhan pokok. Kurva kemungkinan produksi merupakan tempat kedudukan titik-titik kombinasi kedua barang yang diproduksi secara maksimum. Titik A dan B memberikan gambaran tentang kombinasi produksi antara barang mewah dengan barang kebutuhan pokok dalam tingkat pendapatan yang sama besar. Pada titik A lebih banyak barang mewah yang diproduksi bila dibandingkan dengan kebutuhan pokok.

Sebaliknya pada titik B lebih sedikit barang mewah dihasilkan untuk masyarakat dibandingkan dengan barang kebutuhan pokok.

Menurut Kamus Bahasa Indonesia kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi kekurangan hal-hal yang biasa untuk dipunyai seperti makanan, pakaian, tempat berlindung dan air minum, hal-hal ini berhubungan erat dengan kualitas hidup. Kemiskinan kadang juga berarti tidak adanya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan yang mampu mengatasi masalah kemiskinan dan mendapatkan kehormatan yang layak sebagai warga negara. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan. Istilah “negara berkembang” biasanya digunakan untuk merujuk kepada negara-negara yang “miskin”.

Penduduk miskin akan lebih banyak atau bahkan seluruh pendapatannya digunakan untuk kebutuhan makanan, dibandingkan penduduk kaya. Akibatnya penduduk miskin tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan dan pelayanan kesehatan yang layak jika hanya mengandalkan pendapatannya. Di sinilah perlunya campur tangan pemerintah untuk membantu penduduk yang kurang mampu atau miskin (Charisma Kuriata Ginting, 2008).

Kemiskinan akan menghambat individu untuk mengonsumsi nutrisi bergizi, mendapatkan pendidikan yang layak serta menikmati lingkungan yang menunjang bagi hidup sehat. Dari sudut pandang ekonomi kesemuanya itu akan menghasilkan sumber daya manusia yang kurang berkualitas, atau dapat dikatakan memiliki tingkat produktivitas yang rendah. Hal ini juga berimbas pada terbatasnya upah/pendapatan yang dapat mereka peroleh. Sehingga dalam perkembangannya hal ini akan mempengaruhi tingkat pembangunan manusia di suatu daerah.

Lanjouw, dkk (dalam Whisnu Adhi Saputra, 2011) menyatakan pembangunan manusia di Indonesia identik dengan pengurangan kemiskinan. Investasi di bidang pendidikan dan kesehatan akan lebih berarti bagi penduduk miskin dibandingkan penduduk tidak miskin, karena bagi penduduk miskin aset utama adalah tenaga kasar mereka. Adanya fasilitas pendidikan dan kesehatan murah akan sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas, dan pada akhirnya meningkatkan pendapatan.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Ilham Irawan yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia menemukan adanya hubungan positif antara PDB, anggaran pengeluaran pemerintah, dan penanaman modal asing terhadap IPM sedangkan penanaman modal dalam negeri tidak berpengaruh signifikan tetapi memberikan pengaruh yang positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia.

Ravi Kanbur dan Lyn Squire (1999) menjelaskan bahwa tingkat kesehatan dan pendidikan dapat mempengaruhi kemiskinan. Perbaikan di bidang kesehatan yang dilakukan pemerintah dapat meningkatkan kesehatan masyarakat, dan anak-anak usia sekolah dapat bersekolah dan menerima pelajaran dengan baik. Tingkat pendidikan membuat pekerja mempunyai keterampilan dan pengetahuan yang selanjutnya menyebabkan produktivitas meningkat dan pendapatannya juga meningkat. Hal ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi akan meningkat yang kemudian akan menyebabkan tingkat kemiskinannya berkurang.

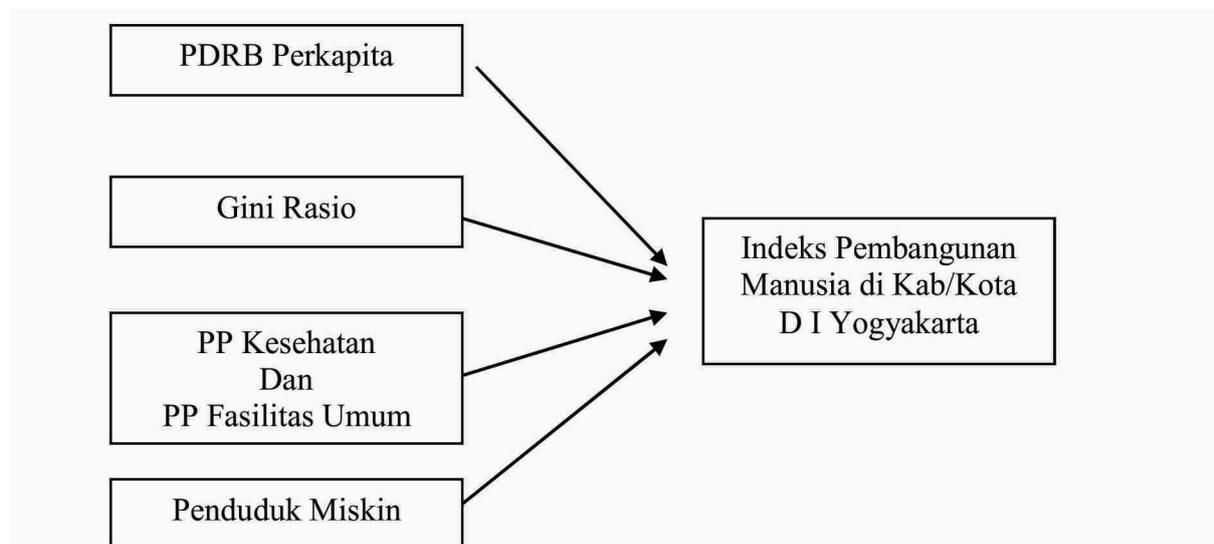
Terdapat hubungan penting antara IPM dan kapasitas pendapatan produktif. Pendapatan merupakan penentu utama dan hasil dari pembangunan manusia. Orang miskin menggunakan tenaga mereka untuk berpartisipasi dalam pertumbuhan ekonomi, tetapi kemiskinan – akibat kurangnya pendidikan, serta gizi dan kesehatan yang buruk – mengurangi kapasitas mereka untuk bekerja. Dengan demikian, akibat rendahnya IPM adalah orang miskin tidak dapat mengambil keuntungan oportunitas pendapatan produktif karena terjadinya pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, penyediaan pelayanan sosial dasar merupakan unsur penting dalam

penanganan kemiskinan (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

Tingkat pendapatan dan IPM mempunyai korelasi yang luas. Namun pertumbuhan pendapatan tidak secara otomatis meningkatkan IPM. Demikian pula, perbaikan kesehatan dan pendidikan yang menyebabkan peningkatan IPM tidak selalu mengarah pada peningkatan pendapatan. Hal ini disebabkan sumber daya yang dihasilkan oleh pertumbuhan ekonomi tidak dapat digunakan untuk mempromosikan perbaikan indikator lainnya. Selain itu, struktur dan proses yang terjadi di masyarakat tidak dapat memberikan manfaat bagi kaum miskin. Misalnya, berbagai peningkatan hasil panen hanya menguntungkan pemilik tanah dan bukan tenaga kerja. Akan tetapi, kondisinya bisa berubah. Masyarakat miskin dapat memperoleh manfaat ganda dari pertumbuhan pendapatan serta peningkatan IPM jika pemerintah menggunakan manfaat dari pertumbuhan untuk membiayai pelayanan kesehatan dan akses pendidikan. Selain itu, struktur dan proses yang ada di masyarakat sudah tepat, sehingga manfaat pertumbuhan ekonomi juga dinikmati kaum miskin. Menurut World Development Report, kemajuan pada kedua bidang saling memperkuat satu sama lain dan yang satu tanpa yang lain tidak cukup (Ravi Kanbur dan Lyn Squire, 1999).

## METODE PENELITIAN

Berdasarkan telaah pustaka, dalam upaya peningkatan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta, maka akan diteliti variabel-variabel yang berhubungan dengan perkembangan IPM di Daerah Istimewa Yogyakarta, yaitu: Belanja Daerah, Gini rasio (ukuran ketimpangan distribusi pendapatan), proporsi pengeluaran konsumsi non makanan (ukuran besarnya pendapatan masyarakat), dan rasio ketergantungan dengan kerangka pemikiran seperti pada gambar 4.



Gambar 3. Kerangka Konseptual

Pada kerangka pemikiran dijelaskan bahwa secara bersama-sama dan simultan, besaran variabel pendapatan perkapita, pengeluaran pemerintah untuk kesehatan, pengeluaran pemerintah untuk fasilitas umum, gini rasio dan jumlah penduduk miskin akan berpengaruh terhadap pencapaian angka Indeks Pembangunan Manusia pada setiap Kabupaten/Kota di Daerah istimewa Yogyakarta. Setelah melalui telaah pustaka, dan dengan mengacu pada teori-teori yang dikemukakan, maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pendapatan Perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
2. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran pemerintah untuk Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
3. Diduga ada pengaruh positif dan signifikan antara Pengeluaran pemerintah untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
4. Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara Ketimpangan distribusi pendapatan yang diukur dengan Gini rasio terhadap Indeks Pembangunan Manusia.
5. Diduga ada pengaruh negatif dan signifikan antara jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Data panel adalah gabungan antara data runtut waktu (*time series*) dan data silang (*cross section*). Menurut Agus Widarjono (2009) penggunaan data panel dalam sebuah observasi mempunyai beberapa keuntungan yang diperoleh. Pertama, data panel yang merupakan gabungan dua data *time series* dan *cross section* mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan lebih menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar. Kedua, menggabungkan informasi dari data *time series* dan *cross section* dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel (*omitted-variabel*). Hsiao (1986), mencatat bahwa penggunaan panel data dalam penelitian ekonomi memiliki beberapa keuntungan utama dibandingkan data jenis *cross section* maupun *time series*. Pertama, dapat memberikan peneliti jumlah pengamatan yang besar, meningkatkan *degree of freedom* (derajat kebebasan), data memiliki variabilitas yang besar dan mengurangi kolinieritas antara variabel penjelas, di mana dapat menghasilkan estimasi ekonometri yang efisien. Kedua, panel data dapat memberikan informasi lebih banyak yang tidak dapat diberikan hanya oleh data *cross section* atau *time series* saja. Dan Ketiga, panel data dapat memberikan penyelesaian yang lebih baik dalam inferensi perubahan dinamis dibandingkan data *cross section*.

Menurut Wibisono (2005) keunggulan regresi data panel antara lain : Pertama. Panel data mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu. Kedua. Kemampuan mengontrol heterogenitas ini selanjutnya menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks. Ketiga, data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*. Keempat, tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif, dan kolinieritas (*multikolinieritas*) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan (*degree of freedom/df*) lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien. Kelima, data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang kompleks. Dan Keenam, Data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

**ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Model Regresi Data Panel, Model Regresi Panel dari judul diatas sebagai berikut ini:

$$Y = \alpha + b1X1it + b2X2it + e$$

Keterangan:

- Y = Variabel dependen (LDR)
- $\alpha$  = Konstanta
- X1 = Variabel independen 1
- X2 = Variabel independen 2
- $b_{(1...2)}$  = Koefisien regresi masing-masing variabel independen
- e = *Error term*
- t = Waktu
- i = Perusahaan

Metode Estimasi Model Regresi Panel, Dalam metode estimasi model regresi dengan menggunakan data panel dapat dilakukan melalui tiga pendekatan, antara lain:

a. *Common Effect Model*

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena hanya mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*. Pada model ini tidak diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu..

b. *Fixed Effect Model*

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model *Fixed Effects* menggunakan teknik *variable dummy* untuk menangkap perbedaan intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian sloponya sama antar perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variable (LSDV)*.

c. *Random Effect Model*

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model (ECM)* atau teknik *Generalized Least Square (GLS)*.

Output hasil Uji Heteroskedastisitas dengan menggunakan Uji Park yang ditunjukkan pada tabel dibawah ini:

TABEL 2  
Uji Heterokedastisitas dengan Uji Park

Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob.
LOG(PDRBPERC?)	-0.564633	-0.681746	0.5006
LOG(PPKES?)	0.078019	0.101422	0.9199
LOG(PPFASUM?)	-1.418092	-1.658184	0.1077
RGINI?	22.03158	1.783891	0.0846
LOG(JPMIS?)	2.053842	1.559589	0.1293

Sumber : Data diolah

Keterangan :

\*\*\* = signifikan 1%    \*\* = signifikan 5%    \* = signifikan 10%

Dari tabel 2, maka dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

Uji Multikolinearitas adalah keadaan dimana antara variabel-variabel bebas dalam model regresi berganda ditemukan adanya korelasi (hubungan) antara satu dengan yang lain. Uji Multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi ini ditemukan adanya korelasi tersebut. Apabila terjadi multikolinearitas, maka koefisien regresi dari variabel bebas akan tidak signifikan dan mempunyai standard error yang tinggi. Semakin kecil korelasi antar variabel bebas, maka model regresi akan semakin baik (Santoso, 2005).

Hasil R<sup>2</sup> yang sangat tinggi namun sebagian besar variable independen yang tidak signifikan, hal ini menjadi gejala awal terjadinya multikolinieritas yang sempurna (lihat Gujarati, 200... ). Dengan nilai R<sup>2</sup> sebesar 0,679 yang berarti nilainya tidak tinggi dan hampir sebagian besar variabel independent signifikan dalam mempengaruhi variabel dependen, sehingga dapat kita deteksi tidak terjadi multikolinearitas.

Dalam analisa model data panel terdapat tiga macam pendekatan yang dapat digunakan, yaitu pendekatan kuadrat terkecil (*ordinary/pooled least square*), pendekatan efek tetap (*fixed effect*), dan pendekatan efek acak (*random effect*). Pengujian statistik untuk memilih model pertama kali adalah dengan melakukan uji Chow untuk menentukan apakah metode *Pooled least square* atau *Fixed effect* yang sebaiknya digunakan dalam membuat regresi data panel.

TABEL 3  
Hasil Regresi Data Panel

Variabel Dependen : Penyerapan Tenaga Kerja	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
LOG(PDRBPERC?)	0.217704	0.129856***	0.031921
LOG(PPKES?)	0.025665*	0.004025	0.015277*
LOG(PPFASUM?)	0.022976	0.003814	0.021683**
RGINI?	-0.184506	-0.034652	-0.306956**
LOG(JPMIS?)	0.090915***	0.044438	-0.068546**
R <sup>2</sup>	0.006024	0.982170	0.679578
F <sub>statistik</sub>		153.0104	12.30111
Probabilitas		0.000000	0.000002
Durbin-Watson stat	0.096524	0.749834	0.224616

Sumber: Data diolah

Keterangan : \*\*\* = signifikan 1%    \*\* = signifikan 5%    \* = signifikan 10%

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan dari kedua analisis yang dilakukan yaitu dengan menggunakan *Uji Likelihood* dan *Hausman Test* keduanya menyarankan untuk menggunakan *Fixed Effect*, dan dari perbandingan uji pemilihan terbaik maka model regresi yang digunakan dalam mengestimasi Pengaruh Pendapatan perkapita, Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan, Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas Umum, Rasio Gini dan jumlah Penduduk Misin terhadap Indek Pembangunan Manusia adalah *Random Effect Model*. Dipilihnya *Random Effect Model* karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen dari *Random Effect Model* lebih signifikan dibanding *Fixed Effect Model* atau *Common Effect Model* yang masing-masing variabel independennya tidak signifikan sehingga model yang lebih baik yaitu *Random Effect Model*.

Pemilihan metode pengujian data panel dilakukan pada seluruh data sample, uji Chow dilakukan untuk memilih metode pengujian data panel antara metode *Pooled least square* atau *Fixed Effect*. Jika nilai F statistik pada uji Chow signifikan, maka uji Hausman akan dilakukan untuk memilih antara metode *Fixed Effect* atau *Random Effect*. Hasil uji Hausman dengan nilai probabilitas yang kurang dari Alpha adalah signifikan, artinya metode *Fixed Effect* yang dipilih untuk mengolah data panel. Pemilihan metode pengujian dilakukan dengan menggunakan pilihan *Fixed Effect* dan *Random Effect* serta mengkombinasikan, baik *cross-section*, *period*, maupun gabungan *cross-section/period*.

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Common/Pool Effect Model*. Jika hasilnya menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah *Common Effect Model*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah *Fixed Effect Model*, dan pengujian akan berlanjut ke uji Hausman.

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel. Hipotesis dalam uji chow adalah:

- H0 : Common Effect Model atau pooled OLS
- H1 : Fixed Effect Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F hitung lebih besar (>) dari F tabel maka H0 ditolak yang berarti model yang paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya, jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabel maka H0 diterima dan model yang digunakan adalah Common Effect Model (Widarjono, 2009). Perhitungan F statistik didapat dari Uji Chow dengan rumus (Baltagi, 2005):

Hasil dari perhitungan F-hitung didapat sebesar 331.7 sedangkan F-tabel dari numerator 4 dan denumenator 24 pada  $\alpha$ : 5% adalah 2,776. Dari hipotesis diatas dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak karena F-hitung lebih besar dari F-tabel ( $331.7 > 2,776$ ), sehingga model yang dipakai dalam penelitian ini adalah Fixed Effect Model. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan penggunaan metode antara *Random Effect* dengan *Fixed Effect*. Jika dari hasil Uji Hausman tersebut menyatakan menerima hipotesis nol maka model yang terbaik untuk digunakan adalah model *Random Effect*. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah model *Fixed Effect*.

TABEL 4  
Uji Hausman

Correlated Random Effects - Hausman Test  
Pool: IPMPANEL  
Test period random effects

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Period random	1.844349	5	0.8702

Sumber: Data diolah

Berdasarkan tabel UjiHausman, nilai probabilitas *Cross-section random* adalah 0,87 yang lebih besar dari Alpha 0,05 sehingga menerima hipotesis nol. Jadi menurut uji hausman,

model yang terbaik digunakan adalah model dengan menggunakan metode *Random Effect*.

#### 1. Hasil Estimasi Model Data Panel Random Effect Model

Berdasarkan uji spesifikasi model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi yang digunakan adalah *Random Effect Model*. Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model *Random Effect* perbedaan intersep diakomodasi oleh *error terms* masing-masing perusahaan. Keuntungan menggunakan model *Random Effect* yakni menghilangkan heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan *Error Component Model* (ECM) atau teknik *Generalized Least Square* (GLS)

Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak 5 kabupaten/kota selama periode 2008-2014 (7 tahun).

TABEL 5  
Hasil Estimasi Random Effect Model

Variabel Dependen :	Model
LOG(IPM)	Random Effect
Konstanta	3.81705
Standar error	0.52819
Probabilitas	0.00000***
LOG(PDRBperc)	0.03192
Standar error	0.02719
Probabilitas	0.25000
LOG(PPKES)	0.01528
Standar error	0.00836
Probabilitas	0.07800*
LOG(PPFASUM)	0.02168
Standar error	0.00915
Probabilitas	0.02500**
RGINI	-0.30700
Standar error	0.13324
Probabilitas	0.02900**
LOG(JPMIS)	-0.06850
Standar error	0.02618
Probabilitas	0.0139**
R <sup>2</sup>	0.67958
F <sub>statistik</sub>	12.30111
Probabilitas	0.00000
Durbin-Watson stat	0.22462

Sumber: Hasil Pengolahan data panel

Dari hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Masyarakat di setiap kabupaten dan kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang di interpretasikan sebagai berikut:

$$\text{LOG (IPM)} = \beta_0 + \beta_1 * \text{LOG(PDRBPerc)} + \beta_2 * \text{LOG(PPKES)} - \beta_3 * \text{LOG(PPFASUM)} + \beta_4 * \text{RGINI} + \beta_5 * \text{LOG(JPMIS)} + \text{et}$$

Keterangan:

IPM	=	Indek Pembangunan Manusia
PDRBPerc	=	Pendapatan Perkapita Kabupaten/kota
PPKES	=	Pengeluaran Pemerintah Daerah Untuk Kesehatan
PPFASUM	=	Pengeluaran Pemerintah Daerah untuk fasilitas Umum
RGINI	=	Rasio Gini
JPMIS	=	Jumlah Penduduk Miskin
$\beta_0$	=	Konstanta
$\beta_1 - \beta_5$	=	Koefisien Parameter
et	=	Disturbance Error

Dimana diperoleh hasil regresi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM)} &= \beta_0 + \beta_1 * \text{LOG(PDRBPerc)} + \beta_2 * \text{LOG(PPKES)} - \beta_3 * \text{LOG(PPFASUM)} + \\ &\beta_4 * \text{RGINI} + \beta_5 * \text{LOG(JPMIS)} + \text{et} \\ \text{LOG(IPM)} &= 3.817 + 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC)} + 0.0153 * \text{LOG(PPKES)} + \\ &0.0217 * \text{LOG(PPFASUM)} - 0.307 * \text{RGINI} - 0.068 * \text{LOG(JPMIS)} \end{aligned}$$

- $\beta_1$  = Nilai 0.032 dapat diartikan bahwa ketika Pendapatan perkapita naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 0.032% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- $\beta_2$  = Nilai 0.0153 dapat diartikan bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah daerah untuk kesehatan meningkat sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 0.0153% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- $\beta_3$  = Nilai 0.0217 dapat diartikan bahwa ketika Pengeluaran Pemerintah daerah untuk fasilitas umum naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami kenaikan sebesar 0.0217% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- $\beta_4$  = Nilai -0.307 dapat diartikan bahwa ketika Gini Rasio naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 0.307% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.
- $\beta_5$  = Nilai 0.068 dapat diartikan bahwa ketika Jumlah Penduduk Miskin naik sebesar 1%, maka Indek Pembangunan manusia mengalami penurunan sebesar 0.068% dengan asumsi Faktor lain lain dianggap tetap.

Dari tabel 5.4, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia disetiap Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta yang diinterpretasi sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM\_BANTUL)} &= \text{PER\_EFFECT} + 3.817 + 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC\_} \\ &\text{BANTUL)} + 0.0153 * \text{LOG(PPKES\_BANTUL)} + 0.0217 * \text{LOG(PPFASUM\_} \\ &\text{BANTUL)} - 0.307 * \text{RGINI\_BANTUL} - 0.068 * \text{LOG(JPMIS\_BANTUL)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM\_GUNDUL)} &= \text{PER\_EFFECT} + 3.817 + 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC\_} \\ &\text{GUNDUL)} + 0.0153 * \text{LOG(PPKES\_GUNDUL)} + 0.0217 * \text{LOG(PPFASUM\_} \\ &\text{GUNDUL)} - 0.307 * \text{RGINI\_GUNDUL} - 0.0685 * \text{LOG(JPMIS\_GUNDUL)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM\_KULONPROGO)} = & \text{PER\_EFFECT} + 3.81704975567 + \\ & 0.0319212348385 * \text{LOG(PDRBPERC\_KULONPROGO)} \\ & + 0.0152774311838 * \text{LOG(PPKES\_KULONPROGO)} + \\ & 0.0216833690388 * \text{LOG(PPFASUM\_KULONPROGO)} - \\ & 0.306955918125 * \text{RGINI\_KULONPROGO} - 0.068545628375 * \text{LOG(JPMIS\_} \\ & \text{KULONPROGO)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM\_SLEMAN)} = & \text{PER\_EFFECT} + 3.81704975567 + \\ & 0.0319212348385 * \text{LOG(PDRBPERC\_SLEMAN)} \\ & + 0.0152774311838 * \text{LOG(PPKES\_SLEMAN)} + \\ & 0.0216833690388 * \text{LOG(PPFASUM\_SLEMAN)} - 0.306955918125 * \text{RGINI\_} \\ & \text{SLEMAN} - 0.068545628375 * \text{LOG(JPMIS\_SLEMAN)} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{LOG(IPM\_YOGYAKARTA)} = & \text{PER\_EFFECT} + 3.81704975567 \\ & + 0.0319 * \text{LOG(PDRBPERC\_YOGYAKARTA)} + \\ & 0.0152774311838 * \text{LOG(PPKES\_YOGYAKARTA)} + \\ & 0.0216833690388 * \text{LOG(PPFASUM\_YOGYAKARTA)} - \\ & 0.306955918125 * \text{RGINI\_YOGYAKARTA} - 0.068545628375 * \text{LOG(JPMIS\_} \\ & \text{YOGYAKARTA)} \end{aligned}$$

Pada model estimasi di atas, terlihat bahwa tidak adanya pengaruh variabel Random Effect di setiap kabupaten dan kota yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap Indeks Pembangunan Manusia di setiap Kabupaten dan Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan karena luas Daerah Istimewa Yogyakarta sangat kecil, sehingga tidak ada batas setiap wilayah kabupaten/kota, penduduk sangat mudah untuk berpindah aktivitas ekonomi, menyekolahkan anak-anak mereka di kabupaten lain, serta mencari fasilitas kesehatan di tempat lain.

Pengaruh pendapatan perkapita terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis di atas (table 5.4) terlihat bahwa pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena nilai probabilitas  $0.25 > 0.05$ . Pendapatan perkapita yang tidak memiliki pengaruh terhadap IPM dapat dianalisis melalui pertumbuhan rata-rata pendapatan perkapita di 5 kabupaten/kota selama tahun 2008-2014 meningkat sebesar 29 persen, tetapi IPM pada periode itu 3.02 persen, sehingga dapat disimpulkan kenaikan rata-rata pendapatan perkapita belum bisa mendorong kenaikan perkapita, dengan kata lain kenaikan pendapatan perkapita belum efektif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara umum.

Menurut Mazumdar dalam Rana dan Dzathor (2008) terdapat empat teori yang menjelaskan hubungan antara pendapatan nasional dan pembangunan manusia yang masing-masing teori didukung oleh hasil penelitian empiris. Salah satunya menyatakan bahwa perubahan pendapatan nasional tidak berhubungan dengan perubahan pembangunan manusia. Karena dapat saja pertumbuhan ekonomi tidak mampu meningkatkan kesejahteraan individu.

Rana dan Dzathor (2008) melakukan penelitian terhadap hubungan antara indikator-indikator dalam IPM dengan pendapatan per kapita menggunakan data Amerika Serikat, Jerman, dan Jepang tahun 1995-2004. IPM diukur menggunakan 5 indikator, yaitu kondisi lingkungan, kesehatan, perubahan teknologi, kekayaan, kemiskinan. Hasil penelitian menunjukkan tidak terdapat korelasi yang signifikan antara indikator-indikator IPM dengan pendapatan per kapita.

### Pengaruh Pengeluaran Kesehatan terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari table 5.4 dapat kita lihat bahwa Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas  $0.078 < 0.10$ ), karena Kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas SDM, SDM meningkat akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada ujungnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Kesehatan merujuk pada ketersediaan gizi yang cukup dan pelayanan kesehatan yang memadai demi mengurangi angka kematian bayi dan ibu

### Pengaruh Pengeluaran Untuk Fasilitas Umum terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis dapat kita lihat bahwa ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas umum dengan Indeks Pembangunan manusia (nilai probabilitas  $0.025 < 0.05$ ), peningkatan fasilitas umum berakibat pada ekonomi biaya murah, ekonomi biaya murah berarti telah terjadi peningkatan skala ekonomi dan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

### Pengaruh Rasio Gini terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Dari hasil analisis terdapat hubungan negative signifikan antara rasio gini dan indeks pembangunan manusia (Hal ini karena nilai probabilitas  $0.029 < 0,05$ ), kenaikan rasio gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dan akhirnya dapat menurunkan indeks pembangunan manusia.

### Pengaruh Jumlah Penduduk Miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia

Hasil analisis diatas bahwa jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas  $0.0139 < 0.05$ ), Kemiskinan dapat dilihat dari tingkat kekurangan sumber daya yang dapat digunakan memenuhi kebutuhan hidup serta meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Kemiskinan diartikan sebagai kondisi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Kemiskinan berdampak pada turunnya produktivitas sebagian masyarakat, turunnya produktivitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan Indeks Pembangunan manusia.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil analisis dapat disimpulkan sebagai berikut : Pendapatan perkapita tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Indeks Pembangunan Manusia karena nilai probabilitas  $0.25 > 0.05$ , perubahan pendapatan perkapita tidak berhubungan dengan perubahan pembangunan manusia. Karena dapat saja pertumbuhan pendapatan perkapita tidak mampu meningkatkan kesejahteraan individu akibat pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi dengan pemerataan. Pengeluaran Pemerintah Untuk Kesehatan memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas  $0.078 < 0.10$ ), karena Kesehatan memegang peranan penting untuk meningkatkan kualitas SDM, SDM meningkat akan berdampak pada peningkatan produktivitas masyarakat, yang pada ujungnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. Dari hasil analisis dapat kita lihat bahwa ada hubungan positif antara Pengeluaran Pemerintah untuk fasilitas umum dengan Indeks Pembangunan manusia (nilai probabilitas  $0.025 < 0.05$ ), peningkatan fasilitas umum berakibat pada ekonomi biaya murah, ekonomi biaya murah berarti telah terjadi peningkatan skala ekonomi dan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, dan pada akhirnya akan meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.

Rasio gini dan indeks pembangunan manusia memiliki pengaruh negative signifikan (Hal ini karena nilai probabilitas  $0.029 < 0,05$ ), kenaikan rasio gini berarti telah terjadi peningkatan ketidakmerataan distribusi pendapatan, hal ini berarti terjadi peningkatan jumlah penduduk miskin, dan akhirnya dapat menurunkan indek pembangunan manusia. Hasil analisis diatas bahwa jumlah penduduk miskin memiliki pengaruh negatif terhadap Indeks Pembangunan Manusia (nilai probabilitas  $0.0139 < 0.05$ ), Kemiskinan berdampak pada turunya produktivitas sebagian masyarakat, turunya produktivitas masyarakat berakibat pada bertambahnya orang miskin baru, dan pada gilirannya akan menurunkan Indeks Pembangunan manusia.

Dari hasil analisis dapat kita ambil langkah-langkah untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/Kota di daerah istimewa Yogyakarta sebagai berikut : Dalam upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, perlu kebijakan penganggaran dengan memperbesar komposisi anggaran belanja supaya lebih terfokus pada program sasaran, dan memperkecil belanja yang berupa upah/gaji/honor birokrat atau mitra pelaksana program. Program sasaran yang dimaksud adalah di bidang kesehatan, dan bidang peningkatan fasilitas umum untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sebagai bekal mencapai kehidupan yang layak. Upaya peningkatan Indeks Pembangunan Manusia pada di 5 kabupaten/kota di Daerah Istimewa Yogyakarta perlu terus menerus dilakukan dengan prioritas pada variabel gini ratio, belanja daerah, laju pertumbuhan ekonomi, yang merupakan cerminan dari besarnya pendapatan masyarakat, adanya ketimpangan pendapatan, anggaran belanja daerah, dan laju pertumbuhan ekonomi yang berpengaruh positif pada perkembangan Indeks Pembangunan Manusia..

## DAFTAR PUSTAKA

- Agus Widarjono. (2009). *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya*. Edisi Ketiga. EKONISIA. Yogyakarta.
- Amartya. (1992). *“Inequality Reexamined”*. Oxford University Press Inc. New York. (On-line), diakses tanggal 29 Agustus 2011
- Badan Pusat Statistik , (2007).. *Indeks Pembangunan Manusia 2006-2007*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2008). *Analisis Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Distribusi Pendapatan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. (2007). *Data dan Informasi Kemiskinan*. Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. 2006 - 2014. *Daerah istimewa Yogyakarta Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.

- \_\_\_\_\_ (2014). *Profil Ketenagakerjaan Daerah istimewa Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2006-2004. *Pemerataan Pendapatan dan Pola Konsumsi Daerah istimewa Yogyakarta*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ 2006-2014. *Indikator Kesejahteraan Rakyat*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- \_\_\_\_\_ (2007). *Statistik Sosial dan Kependudukan Daerah istimewa Yogyakarta Hasil SUSENAS 2010*. Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah istimewa Yogyakarta, Yogyakarta.
- BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001-2004. *Indonesia Human Development Report 2001-2004*. BPS-Statistics Indonesia, Bappenas dan UNDP Indonesia. Jakarta.
- Brata, Aloysius Gunadi, (2002), “Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regional Indonesia ”, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 7, No. 22. (2002), hal. 113-122.
- Charisma Kuriata Ginting S, (2008), Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia, Thesis, Universitas Sumatra Utara.
- Gujarati, Damodar. (2007), *Dasar-dasar Ekonometrika*. Terjemahan oleh Julius A. Mulyadi. Penerbit Erlangga, Jakarta. (On-line) diakses tanggal 17 januari 2011.
- Ginting, Charisma Kuriata S. (2008). “Analisis Pembangunan Manusia di Indonesia”. *Tesis*. Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, Medan. (Tidak dipublikasikan).
- Hsiao (1986): *Analysis of Panel Data*, Cambridge: Cambridge University
- Handayani, Titik. (2008). *Kebangkitan Nasional dan Pembangunan Manusia*. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Jakarta.
- Harjowiryono, Marwanto. (2009). “Kebijakan Penganggaran dan Pengaruh Belanja Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia”. *Disertasi*. Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. (tidak dipublikasikan).
- Hausman, J. A, (1978), “Specification Test in Econometrics ”, *Econometrica Journal*, Vol. 46, No. 6. (November, 1978), pp. 1251-1271.
- Hsiao, Cheng. (2003). *Analysis of Panel Data*. Second Edition. Cambridge University Press (On-line), diakses tanggal 18 Januari 2011.

- Kanbur, Ravi and Lyn Squire. (1999). The Evolution of Thinking about Poverty: Exploring The Interactions. <http://kanbur.dyson.cornell.edu/papers.htm>.
- Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart, (1998). Economic Growth and Human Capital. *QEH Working Paper* No. 18.
- Richard, Pierre Agenor. *The Economics of Adjustment and Growth*. LA Editorial UPR (On-line), diakses tanggal 21 September 2011.
- Saleh, Samsubar (2002), Jurnal Faktor-faktor Penentu Tingkat Kemiskinan di Indonesia ,Kajian Ekonomi Negara Berkembang *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Hal: 87 – 102 JEP Vol 7, No. 2, 2002 87
- Sanjoyo. (2009). *Forum Diskusi Ekonometrik* (On-line), diakses tanggal 29 Agustus 2011
- Sukirno, Sadono.(2000). *Makro ekonomi Modern: Perkembangan Pemikiran Dari Klasik Hingga Keynesian Baru*. PT Raja Grafindo Pustaka, Jakarta
- Todaro, Michael P dan Stephen C. Smith. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Edisi ke-9. Terjemahan oleh Haris Munandar dan Puji A.I. Erlangga. Jakarta (On-line)
- Tulus H. Tambunan, (1997), *Perekonomian Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- UNDP. 1990 – 2009. Human Development Report. UNDP (On-line), diakses tanggal 30 Januari 2011
- Ustama, Dicky Djatnika. (2009). Peranan Pendidikan dalam Pengentasan Kemiskinan. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*.Vo. 6. 1, Januari 2009: 1-12.
- Whisnu Adhi Saputra. (2011). Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, PDRB, IPM, dan Pengangguran Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten/Kota Jawa Tengah. Skripsi.Tidak diterbitkan. Semarang: UNDIP
- Yuwanti,Sri .(2004),”Penelitian Upaya Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah”. Balitbang Prov.Jawa Tengah.

## PENGARUH TEKANAN ANGGARAN TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN *JOB RELEVANT INFORMATION* SEBAGAI VARIABEL MEDIATOR

Zaenal Afifi<sup>1</sup>  
Nanik Ermayanti<sup>2</sup>

**Abstract:** *Effect of Managerial Performance Against Budget Pressure With Variable Job Relevant Information as Mediator.* The purpose of this study was to obtain empirical evidence of the effect of budget pressures on managerial performance, to obtain empirical evidence of the effect of budget pressures on job relevant information and to obtain empirical evidence of the effect of job relevant information on managerial performance. The population in this study are all officials SKPD Holy District. Collecting data using questionnaires. Of the 138 questionnaires sent questionnaires, only 120 questionnaires were returned and ready to be used to test the hypothesis. The analysis showed that the direct effect of test variables budgetary pressures on the performance shows the value of P-value > 0.05, whereas the effect of budgetary pressures on job relevant information and effect of budget participation on managerial performance showed the value of P-value < 0.001. It shows that the H1, H2 and H3 are acceptable. Thus the variable job relevant information is a mediator variable that connects the budgetary pressure on managerial performance.

**Abstrak:** *Pengaruh Tekanan Anggaran Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Job Relevant Information sebagai Variabel Mediator.* Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tekanan anggaran terhadap kinerja manajerial, untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tekanan anggaran terhadap *job relevant information* dan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh *job relevant information* terhadap kinerja manajerial. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pejabat SKPD Kabupaten Kudus. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Dari kuesioner yang dikirimkan sebanyak 138 kuesioner, hanya 120 kuesioner yang kembali dan siap digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa uji pengaruh langsung variabel tekanan anggaran terhadap kinerja menunjukkan nilai P-value > 0,05, sedangkan pengaruh tekanan anggaran terhadap *job relevant information* dan pengaruh Partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial menunjukkan nilai P-value < 0,001. Hal tersebut menunjukkan bahwa H<sub>1</sub>, H<sub>2</sub> dan H<sub>3</sub> dapat diterima. Dengan demikian variabel *job relevant information* merupakan variabel mediator yang menghubungkan antara tekanan anggaran terhadap kinerja manajerial.

**Kata Kunci:** Tekanan Anggaran, *job relevant information*, Kinerja Manajerial.

### PENDAHULUAN

Pemberlakuan UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah memberikan dampak perubahan pada sistem pemerintahan yang mulanya menganut pola pertanggungjawaban

---

<sup>1</sup> Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.

<sup>2</sup> Dosen Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Muria Kudus.

terpusat beralih menjadi pola desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan luas untuk mengelola dan bertanggung jawab secara nyata atas potensi daerah yang dimiliki. Kewenangan luas tersebut tidak berlaku untuk urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan menjadi urusan pemerintah, meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional serta agama. Dengan adanya sistem otonomi daerah tersebut, mengakibatkan pergeseran orientasi pemerintah dari command and control menjadi berorientasi pada tuntutan dan kebutuhan publik.

Salah satu tujuan diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia dimaksudkan sebagai strategi untuk memperkuat perekonomian daerah dalam rangka memperkuat perekonomian nasional untuk menghadapi era perdagangan bebas. Tujuan otonomi daerah akan terealisasi apabila segenap lapisan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Langkah awal untuk merealisasikan keberhasilan tersebut dapat dilakukan dengan perwujudan reformasi sektor publik.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, anggaran merupakan managerial plan of action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran dapat digunakan untuk merencanakan berbagai aktifitas suatu pusat pertanggung jawaban agar dalam pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Proses penyusunan anggaran APBD di atur dalam Permendagri No.1 tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain kedua peraturan tersebut, terdapat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal (19) tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa Satuan Perangkat Daerah (SKPD) menyusun rencana kerja dengan pendekatan berdasarkan prestasi kerja yang dicapai, yang biasa disebut dengan Anggaran Berbasis Kinerja. Anggaran berbasis kinerja yang dimaksud dalam penyusunan RKA-SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh oleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Undang-Undang tersebut membawa konsekuensi atau pertanggung jawaban bagi pemerintah daerah dalam bentuk tekanan anggaran atas pengalokasian dana yang dimiliki dengan cara yang efektif dan efisien, khususnya dalam upaya peningkatan kesejahteraan dan pelayanan umum kepada masyarakat.

Kinerja SKPD Kabupaten Kudus tahun 2014 menunjukkan kinerja yang kurang maksimal dan perlu dilakukan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi, ditunjukkan dengan tidak bisa tercapainya target anggaran Pendapatan Daerah (PD), dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar 98,51%, diakibatkan oleh dua komponen pendapatan daerah yang realisasinya kurang dari target, yakni pendapatan transfer dan lain-lain yang sah. Sedangkan untuk Pendapatan Asli Daerah (PAD), realisasinya mencapai 100% dari target. Bupati Kudus H Musthofa, menyampaikan hal itu, pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Kudus dengan agenda Penjelasan Bupati Kudus terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kudus TA 2015, Selasa (isknews.12/7/15).

Melalui tekanan anggaran, bawahan/ pelaksana anggaran bertanggung jawab untuk merealisasikan anggaran yang telah ditetapkan. Dalam organisasi sektor publik seperti pemerintah daerah dapat dianggap sebagai pusat pertanggung jawaban. Pusat pertanggung jawaban besar ini dapat dipecah-pecah lagi menjadi pusat-pusat pertanggung jawaban yang lebih kecil hingga pada level pelayanan atau program misalnya dinas-dinas atau subdinas-subdinas.

Penelitian mengenai pengaruh tekanan dalam anggaran terhadap kinerja menjadi topik yang menarik karena hasil penelitian ini telah menimbulkan debat yang berkepanjangan di kalangan peneliti-peneliti dalam bidang akuntansi. Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa pengaruh tekanan dalam anggaran terhadap kinerja menunjukkan hasil yang saling bertentangan, sebagaimana penelitian Hopwood (1972;1974) menjelaskan bahwa penekanan anggaran yang kaku dan bersifat menghukum dapat meningkatkan ketegangan hubungan kerja, Sedangkan Otley (1978) menemukan bahwa tekanan dalam anggaran dapat meningkatkan kinerja.

Perbedaan penelitian Hopwood (1972;1974) dan Otley (1978) seakan-akan melandasi setiap penemuan hasil penelitian yang berbeda-beda di dalam penelitian-penelitian selanjutnya (Brownell 1982a, 1982b; Hirst, 1987b). Beberapa peneliti menemukan dimensi ini meningkatkan kinerja (Merchant, 1981, 1985; Otley, 1978) sedangkan peneliti yang lain menemukan hubungan yang negatif (Hirst, 1987b; Imoisili, 1989). Faktor yang menyebabkan hasil penelitian terhadap hubungan antara tekanan anggaran dan kinerja tidak konsisten adalah faktor kontinjensi. Faktor kontinjensi yang akan di gunakan dalam penelitian ini adalah job relevant information yang menghubungkan antara tekanan anggaran dan kinerja.

Hasil penelitian yang berbeda mengenai tekanan anggaran terhadap kinerja disebabkan oleh faktor kontinjensi. Faktor kontinjensi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah job relevant information, sehingga dalam penelitian ini akan menguji pengaruh antara tekanan anggaran dan kinerja dengan menggunakan variabel job relevant information sebagai mediator. Dari uraian di muka, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial?
2. Apakah tekanan anggaran berpengaruh positif terhadap job relevant information?
3. Apakah job relevant information berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial?

Pendekatan Kontinjensi (Contingency Approach), Pendekatan teori kontinjensi mengidentifikasi bentuk-bentuk optimal pengendalian organisasi di bawah kondisi operasi yang berbeda dan mencoba untuk menjelaskan bagaimana prosedur operasi pengendalian organisasi tersebut. Pendekatan akuntansi pada akuntansi manajemen didasarkan pada premis bahwa tidak ada sistem akuntansi secara universal selalu tepat untuk dapat diterapkan pada setiap organisasi, tetapi hal ini tergantung pada faktor kondisi atau situasi yang ada dalam organisasi.

Berdasarkan teori kontinjensi Jika dalam organisasi anggaran merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur kinerja bawahan, maka kondisi ini dinamakan tekanan anggaran atau budget emphasis ( Mulyani, 2012). Ketika anggaran digunakan sebagai alat pengukur kinerja bawahan dalam suatu organisasi, maka akan terjadi tekanan anggaran dari atasan kepada bawahan untuk merealisasikan anggaran yang telah direncanakan, sehingga akan terjadi ketegangan kerja yang mengakibatkan penurunan prestasi kerja. Peran job relevant information dalam keadaan seperti ini sangat di perlukan untuk memediasi hubungan antara tekanan anggaran terhadap kinerja manajerial supaya kinerja manajerial bawahan meningkat.

Penganggaran sektor publik terkait dengan proses penentuan jumlah alokasi dana untuk tiap-tiap program dan aktivitas dalam satuan moneter. Proses penganggaran organisasi sektor publik dimulai ketika perumusan strategi dan perencanaan strategi telah selesai dilakukan. Anggaran merupakan artikulasi dari hasil perumusan strategi dan perencanaan strategi yang telah dibuat. Tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang sudah disusun. Anggaran merupakan managerial plan for action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. (Mardiasmo, 2005).

Proses penyusunan RKPD Kabupaten Kudus Tahun 2014 diawali dengan penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2013 yang

berpedoman pada Surat Gubernur Jawa Tengah tanggal 8 Pebruari 2013 Nomor 050/02832, perihal: Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2014 dan penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2013. Musrenbang merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah. Pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud yaitu pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang efektif dan partisipatif. Hasil kegiatan pelaksanaan Musrenbang menjadi bahan penyusunan rancangan akhir RKPD Tahun 2014, untuk ditetapkan dengan Peraturan Bupati. RKPD Tahun 2014 menjadi dasar perumusan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2014, penyusunan rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2014. KUA dan PPAS tersebut selanjutnya dibahas Bupati bersama DPRD untuk disepakati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dalam rangka efektivitas serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah dan optimalisasi pencapaian sasaran pembangunan daerah, Bupati bersama DPRD menindaklanjuti program dan kegiatan yang telah disepakati dalam forum Musrenbang RKPD ke dalam KUA, PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2014.

Penilaian kinerja adalah penentuan secara periodik efektifitas operasional suatu organisasi, bagian organisasi, dan karyawannya berdasarkan standard sasaran dan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya (Mulyadi, 1993 hal 419). Kinerja manajerial yang diperoleh atasan merupakan salah satu faktor yang dapat di pakai untuk meningkatkan efektifitas organisasi. Karena organisasi pada dasarnya dijalankan oleh manusia, maka penilaian kinerja sesungguhnya merupakan penilaian atas perilaku manusia dalam melaksanakan peran yang mereka mainkan didalam organisasi. Dalam organisasi sektor publik tingkat atas mendelegasikan sebagian wewenangnya kepada manajemen ditingkat bawahannya disertai dengan alokasi sumber daya yang diperlukan, penggunaan wewenang dan konsumsi sumber daya dalam pelaksanaan dipertanggung jawabkan dalam bentuk pengukuran kinerja. Berdasarkan hasil penilaian kinerja tersebut, atasan memberikan penilaian terhadap kinerja bawahan, dan sebaliknya bagi bawahan akan mendapatkan umpan balik mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka (Mulyadi, 1993 hal 423).

Dalam pencapaian sasaran atas peningkatan kinerja maka diperlukan suatu pertimbangan atas faktor-faktor yang dapat mempengaruhi masalah tersebut. Hal ini penting sebagai tolak ukur dari suatu pelaksanaan konsep dalam usaha meningkatkan kinerja. Kinerja merupakan faktor penting yang digunakan untuk mengukur efektifitas dan efisiensi organisasi. Oleh karena itu, kinerja manajerial sangat penting dalam menentukan keberhasilan organisasi.

Tekanan anggaran atau Budget emphasis menurut (Hirst, 1981, 1083; Merchant dan Manzoni, 1989) dalam operasionalnya sangat menekankan pada aspek ukuran performansi akuntansi seperti target anggaran, disamping pentingnya pengendalian biaya sebagai kriteria performansi atau kinerja manajerial (Kenis 1979). Evaluasi kinerja cenderung berhubungan sangat dekat dengan sistem penghargaan, maka kriteria evaluasi kinerja menjadi pusat perhatian dan semakin menarik (Siegel dan Marconi, 1989) karena kriteria tersebut akan mempengaruhi penghargaan atau kompensasi atas performansi subordinat dalam bentuk remunerasi, bonus, promosi dan lain-lain (baik secara intrinsik maupun ekstrinsik). Budget emphasis juga dapat diartikan desakan dari atasan pada bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah dibuat dengan baik, yang berupa sanksi jika kurang dari target anggaran dan kompensasi jika mampu melebihi target anggaran.

Mardiasmo (2005) menyatakan bahwa tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, anggaran merupakan managerial plan of action untuk memfasilitasi tercapainya tujuan organisasi. Dalam fungsinya sebagai alat perencanaan, anggaran dapat digunakan untuk merencanakan berbagai aktifitas suatu pusat pertanggung jawaban agar dalam pelaksanaan aktivitasnya sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sering kali, suatu organisasi menggunakan anggaran sebagai satu-satunya untuk mengukur kinerja. Anggaran dapat pula berfungsi sebagai alat pengendalian bilamana anggaran digunakan sebagai tolak ukur kinerja suatu pusat pertanggung jawaban. Jika dalam organisasi anggaran merupakan faktor yang paling dominan dalam mengukur kinerja bawahan, maka kondisi ini dinamakan tekanan anggaran atau budget emphasis (Mulyani, 2012). Ketika anggaran digunakan sebagai alat pengukur kinerja bawahan dalam suatu organisasi, maka akan terjadi tekanan anggaran dari atasan kepada bawahan untuk merealisasikan anggaran yang telah disusun, kondisi seperti ini akan mengakibatkan terjadinya keterganggan kerja sehingga diperlukan suatu model perencanaan anggaran melalui partisipasi anggaran untuk meningkatkan kinerja.

Organisasi-organisasi bergantung pada informasi kualitas tinggi untuk mengembangkan rencana strategis, mengidentifikasi masalah dan berinteraksi dengan organisasi lain. Informasi disebut berkualitas tinggi apabila informasi tersebut memiliki karakteristik-karakteristik yang menjadikannya bermanfaat untuk tugas ini. Karakteristik-karakteristik informasi yang bermanfaat dapat dibagi menjadi tiga kategori luas yaitu (Daft, 2006):

1. Waktu. Informasi harus ada dan tersedia ketika dibutuhkan, up to date, dan berkaitan dengan periode waktu yang tepat (masa lalu, sekarang atau masadepan).
2. Isi. Informasi yang bermanfaat bebas dari kesalahan, sesuai dengan kebutuhan pengguna, lengkap, ringkas, relevan (yaitu informasi tersebut meniadakan data yang dibutuhkan), dan merupakan ukuran kinerja yang akurat.
3. Bentuk. Informasi harus tersedia dalam bentuk yang mudah dipahami pengguna dan dalam tingkat detail yang memenuhi kebutuhan pengguna. Penyajiannya harus disusun dan menggunakan kombinasi kata, angka, dan diagram yang sangat membantu pengguna. Selain itu, informasi harus disajikan dengan menggunakan medium yang bermanfaat (dokumen tercetak, pertunjukan video, suara).

Baiman (1982) dalam Kren (1992) mengidentifikasi 2 jenis informasi utama dalam organisasi yaitu decision influencing dan job relevant information (JRI), yakni informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. Baiman (1982) dalam Yusfaningrum (2005) menambahkan bahwa JRI membantu bawahan/pelaksana anggaran dalam meningkatkan pilihan tindakannya melalui informasi usaha yang berhasil dengan baik. Kondisi ini memberikan pemahaman yang lebih baik pada bawahan mengenai alternatif keputusan dan tindakan yang perlu dilakukan dalam mencapai tujuan (Ompusung dan Banowo, 2006).

Kren (1992) dalam penelitiannya tentang job relevant information (JRI) memahami JRI sebagai informasi yang memfasilitasi pembuatan keputusan yang berhubungan dengan tugas. JRI meningkatkan kinerja melalui pemberian perkiraan yang lebih akurat mengenai lingkungan sehingga dapat dipilih rangkaian tindakan efektif yang terbaik (Ompusung dan Banowo, 2006).

Lau dan Ian (1997) menguji apakah interaksi tekanan anggaran, partisipasi anggaran, dan kesukaran tugas mempengaruhi kinerja manajerial. Selanjutnya, beliau menguji apakah ada pengaruh lintas budaya bangsa dalam interaksi tersebut. Dalam penelitiannya Lau dan Ian (1997) melakukan penelitian dengan memilih sampel secara acak sebanyak 197 manajer menengah dari lembaga keuangan, dengan perincian 90 berasal dari Australia dan 107 dari Singapura. Hasil penelitian mereka mendapati bahwa (1) Interaksi antara tekanan anggaran, partisipasi anggaran dan kesukaran tugas mempengaruhi kinerja manajerial adalah tidak signifikan. Tetapi, tekanan

anggaran dan partisipasi anggaran keduanya sangat signifikan dan berpengaruh positif pada kinerja manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh yang bermanfaat dari kombinasi yang sesuai dari tingginya tekanan anggaran dan partisipasi anggaran dalam situasi kesukaran tugas yang rendah sebagaimana hasil penemuan Brownell dan Dunk (1991) dapat digeneralisasikan pada sektor lembaga keuangan, (2) Tekanan anggaran yang tinggi, tanpa melihat partisipasi anggaran, adalah berkaitan dengan peningkatan kinerja manajerial dalam situasi kesukaran tugas yang rendah. (3) Partisipasi anggaran yang tinggi, tanpa melihat tekanan anggaran, adalah berkaitan dengan peningkatan kinerja manajerial dalam situasi kesukaran tugas yang tinggi, dan (4) Tidak ada pengaruh budaya nasional dalam interaksi antara tekanan anggaran dan partisipasi anggaran mempengaruhi kinerja bawahan pada sektor lembaga keuangan.

Kusnasriyanti (2013) menguji pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information sebagai variabel intervening pada perusahaan manufaktur di Indonesia. pada organisasi sektor publik. Hasil penelitian ini partisipasi anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ( $p=0,002$ ), (2) partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif terhadap komitmen tujuan anggaran tetapi besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan, (3) partisipasi dalam penyusunan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap JRI pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ( $p=0,007$ ), (4) komitmen tujuan anggaran berpengaruh positif terhadap JRI namun besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan, (5) terdapat pengaruh positif dan signifikan antara komitmen tujuan anggaran terhadap kinerja manajerial pada tingkat signifikansi probabilitas di bawah 0,05 ( $p=0,027$ ) dan (6)

JRI berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial namun besarnya pengaruh tersebut tidak signifikan. Peneliti menduga, hasil yang tidak signifikan pada beberapa pengujian hipotesis dalam penelitian ini karena adanya penerapan dimensi budaya organisasi powerdistance yang lebar pada perusahaan manufaktur di Indonesia dimana otoritas atasan adalah mutlak sehingga tujuan yang ditetapkan cenderung bersifat subyektif.

Afifi (2015) menguji tentang hubungan antara tekanan anggaran, budget planning models dan kinerja pada pemerintah daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budget planning models sepenuhnya memediasi pengaruh tekanan anggaran pada kinerja manajerial dan organisasi. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin baik tekanan anggaran melalui budget planning models akan meningkatkan kinerja di pemerintah daerah.

Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah:

H1: Tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial.

H2 : Tekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap job relevant information

H3 : job relevant information berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Manajerial

## **METODE PENELITIAN**

Desain Penelitian, Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara survei untuk mengumpulkan data dilapangan guna memperoleh gambaran tentang pengaruh tekanan anggaran terhadap kinerja manajerial. Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat penjelasan (eksploratory research) karena merupakan penelitian yang menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis. Dalam Penelitian ini akan menguji pengaruh tekanan anggaran terhadap kinerja manajerial pemerintah daerah melalui variabel job relevant information sebagai variabel mediator.

Populasi yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah Kudus (SKPD) yang meliputi 12 kantor dinas, 2 sekretariat, Inspektorat, RSUD, 3 badan, 6 kantor, 9 kecamatan dan 9 kelurahan. Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah pengelola unit kerja atau pejabat struktural pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Kudus level middle management dengan jumlah responden sebanyak 551 yang terdiri dari kepala SKPD, sekretaris SKPD, kepala sub bagian/kepala sub bidang, dan kepala seksi. Pemilihan Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dijadikan obyek penelitian karena tidak bisa tercapainya target anggaran Pendapatan Daerah (PD), dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kudus Tahun Anggaran (TA) 2015 sebesar 98,51%, dengan tidak tercapainya target anggaran pendapatan daerah anggaran tersebut menjelaskan bahwa kinerja manajerial Pemerintah Kabupaten Kudus menurun, maka hal yang harus dilakukan adalah dengan penghematan anggaran dan tekanan anggaran supaya tujuan anggaran dapat tercapai, namun tetap mengutamakan pelayanan pada masyarakat. Pemilihan SKPD (Satuan Kerja pemerintah Daerah) menjadi tempat penelitian karena instansi tersebut merupakan satuan kerja pemerintah, yang berarti menyusun, menggunakan dan melaporkan realisasi anggaran atau sebagai pelaksana anggaran dari pemerintah daerah (Abdullah, 2004) dalam Sardjito (2007).

Arikunto (2002) mengatakan bahwa : “Sampel adalah bagian dari populasi.” Sampel penelitian adalah sebagian dari populasi yang diambil sebagian sumber data dan dapat mewakili seluruh populasi karena jumlah populasi lebih dari 100 orang, maka penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan sampel secara acak (Random sampling). Sedangkan teknik pengambilan sampel menggunakan rumus dari Taro Yamane atau Slovin (dalam Riduwan, 2006 :65) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1}$$

Keterangan:

N = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

d<sup>2</sup> = Presesi (ditetapkan 10% dengan tingkat kepercayaan 95%)

Berdasarkan rumus tersebut diperoleh jumlah sampel sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{N \cdot d^2 + 1} = \frac{551}{(551) \cdot 0,12 + 1} = \frac{551}{6,51} = \frac{84,63}{6,51} = \approx 85 \text{ responden}$$

Dengan ukuran populasi (N) sebanyak 551 dan dengan persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang dapat ditolerir atau diinginkan (d<sup>2</sup>) 0,1 maka diperoleh 85 responden, tetapi untuk mendapatkan suatu hasil penelitian yang lebih baik penelitian ini menggunakan 120 responden. Penentuan responden mana saja yang akan dipilih adalah dengan menggunakan teknik simple convenience sampling. Sampel dipilih dengan teknik convenience sampling yang maksudnya mengambil sampel yang sesuai dengan ketentuan atau persyaratan sampel dari populasi tertentu, yang paling mudah dijangkau atau didapatkan.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan pendekatan Structural Equation Model (SEM) dengan menggunakan metode alternatif Partial Least Square (PLS). Software yang digunakan adalah Software Warp PLS 3.0. PLS merupakan model persamaan struktural (SEM) yang berbasis komponen atau (variance). PLS merupakan pendekatan alternatif yang bergeser dari pendekatan SEM yang berbasis covariance menjadi berbasis varian (Ghozali dan Latan, 2012).

PLS merupakan metode pengukuran yang tidak mensyaratkan adanya asumsi distribusi tertentu untuk estimasi parameter, maka teknik parametrik untuk menguji atau mengevaluasi signifikansi tidak diperlukan (Chin 1998; Chin dan Newsted 1999 dalam Ghozali dan Latan, 2012). Model evaluasi PLS dilakukan dengan menilai outer model dan inner model.

Evaluasi model pengukuran atau outer model dilakukan untuk menilai validitas dan reabilitas model (Ghozali dan Latan, 2012). Dalam penelitian ini tidak menggunakan outer model, hal tersebut dikarenakan setiap variabel hanya menggunakan satu indikator pengukur. Evaluasi model struktural atau inner model bertujuan untuk memprediksi hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen (Ghozali dan Latan, 2012).

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Obyek dalam penelitian ini adalah pejabat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) Pemerintah Kabupaten Kudus yang terlibat dalam proses penyusunan anggaran. Pejabat tersebut terdiri dari kepala SKPD, sekretaris SKPD, kepala sub bagian/kepala sub bidang, dan kepala seksi. Jumlah SKPD di Kabupaten Kudus sebanyak 53 SKPD yang meliputi 12 kantor dinas, 2 sekretariat, Inspektorat, RSUD, 3 badan, 6 kantor, 9 kecamatan dan 9 kelurahan. Sampel penelitian ini di pilih menggunakan metode *random sampling*/ teknik pengambilan sampel secara acak, karena populasi bersifat homogen atau mempunyai karakteristik yang sama.

Pengujian *outer loading* sama halnya dengan pengujian kualitas data yang dimaksudkan untuk menghindarkan adanya bias yang diperoleh dari data penelitian dalam menjelaskan konstruk variabel yang akan diukur atau menguji validitas dan reliabilitas konstruk. Sebagaimana diketahui analisis PLS adalah analisis berbasis factor yang dalam juga dapat direferensikan sebagai bentuk analisis untuk pengujian validitas dari suatu konstruk.

Penelitian ini menggunakan indikator refleksif untuk masing-masing variable laten. Pengujian mengenai *outer weight* menunjukkan pengujian terhadap masing-masing indikator dalam menjelaskan konstruk variable latennya. Nilai yang signifikan menunjukkan hasil yang baik. Hasil pengujian *factor weight* diperoleh dalam berikut,

	TA	KM	JRI	SE	P Value	VIF
TA1	(0.233)	0.000	0.000	0.071	<0.001	1.516
TA2	(0.241)	0.000	0.000	0.071	<0.001	1.707
TA3	(0.237)	0.000	0.000	0.071	<0.001	1.611
TA4	(0.245)	0.000	0.000	0.071	<0.001	1.748
TA5	(0.255)	0.000	0.000	0.071	<0.001	2.044
TA6	(0.178)	0.000	0.000	0.071	0.007	1.302
KM1	0.000	(0.177)	0.000	0.071	0.007	1.997
KM2	0.000	(0.124)	0.000	0.071	0.042	1.648
KM3	0.000	(0.164)	0.000	0.071	0.012	1.993
KM4	0.000	(0.189)	0.000	0.071	0.005	2.593
KM5	0.000	(0.116)	0.000	0.071	0.053	1.619
KM6	0.000	(0.170)	0.000	0.071	0.009	1.877
KM7	0.000	(0.157)	0.000	0.071	0.015	1.553
KM8	0.000	(0.195)	0.000	0.071	0.004	2.297
KM9	0.000	(0.159)	0.000	0.071	0.014	1.755
JRI1	0.000	0.000	(0.203)	0.071	0.003	2.364
JRI2	0.000	0.000	(0.208)	0.071	0.002	3.022
JRI3	0.000	0.000	(0.188)	0.071	0.005	2.037
JRI4	0.000	0.000	(0.219)	0.071	0.001	2.942
JRI5	0.000	0.000	(0.198)	0.071	0.003	2.078
JRI6	0.000	0.000	(0.076)	0.071	0.145	1.121
JRI7	0.000	0.000	(0.132)	0.071	0.033	1.592
JRI8	0.000	0.000	(0.118)	0.071	0.050	1.588
JRI9	0.000	0.000	(0.103)	0.071	0.075	1.605

Hasil pengolahan dengan menggunakan dapat dilihat pada Tabel tersebut diperoleh nilai *weight* secara umum masih menunjukkan adanya indikator yang baik, dimana sebagian besar signifikan dalam hubungannya dengan variabel laten dengan kata lain nilai p kurang dari 0,05 dan nilai VIF kurang dari 3,3 (kock, 2013). Hasil tabel nilai *weight* diatas ada bebarapa yang tidak signifikan namun peneliti tetap mempertahankannya karena dihapusnya salah satu indikator formatif dapat mengubah isi keseluruhan (Hair dkk, 2013).

Pengujian Validitas diskriminan dimaksudkan untuk menguji bahwa masing-masing pengukuran kontruk variable yang satu berbeda dengan pengukuran lainnya. Pengujian validitas diskriminan dilakukan dengan nilai *cross loadings* yaitu dengan membandingkan nilai loading dari kontruk variable yang diuji dengan konstruk lainnya. Jika sebuah indicator memiliki nilai loading yang besar terhadap kontruk lain maka mengindikasikan lemahnya validitas diskriminan dari variablepenelitian. Hasil pengujian validitas diskriminan dengan menggunakan nilai *cross loading* diperoleh sebagai berikut:

	<b>TA</b>	<b>KM</b>	<b>JRI</b>
<b>TA1</b>	(0.755)	-0.189	0.021
<b>TA2</b>	(0.693)	0.244	-0.049
<b>TA3</b>	(0.778)	-0.208	0.029
<b>TA4</b>	(0.771)	0.051	-0.018
<b>TA5</b>	(0.747)	0.223	-0.065
<b>TA6</b>	(0.532)	-0.196	0.118
<b>KM1</b>	-0.030	(0.742)	-0.020
<b>KM2</b>	0.113	(0.495)	-0.030
<b>KM3</b>	-0.143	(0.649)	0.042
<b>KM4</b>	-0.070	(0.741)	0.059
<b>KM5</b>	-0.093	(0.382)	0.156
<b>KM6</b>	-0.052	(0.658)	0.080
<b>KM7</b>	0.188	(0.671)	-0.044
<b>KM8</b>	-0.061	(0.911)	-0.061
<b>KM9</b>	0.187	(0.770)	-0.150
<b>JRI1</b>	-0.054	-0.266	(0.981)
<b>JRI2</b>	-0.017	-0.373	(1.058)
<b>JRI3</b>	-0.176	-0.266	(0.970)
<b>JRI4</b>	0.000	-0.198	(0.977)
<b>JRI5</b>	0.130	-0.152	(0.808)
<b>JRI6</b>	-0.226	-0.141	(0.497)
<b>JRI7</b>	0.204	0.600	(0.071)
<b>JRI8</b>	-0.061	0.911	(-0.061)
<b>JRI9</b>	0.187	0.770	(-0.150)

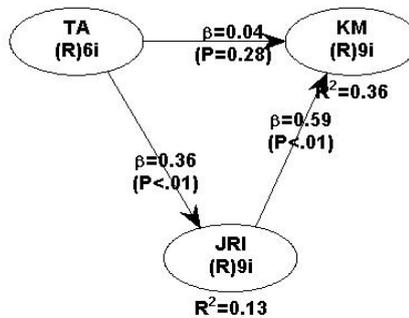
Hasil pengolahan diperoleh nilai *cross loading* atau korelasi antara konstruk dengan variabel yang sesuai secara umum sudah mendukung konsep pengukuran masing-masing variable karena memiliki *loading factor* yang paling besar diibandingan dengan nilai *loading factor* terhadap variabel lain mekipun pada indikator masih relative lemah namun tetap akan digunakan dalam analisis.

Kriteria validitas dan reliabilitas juga dapat dilihat dari nilai Reliabilitas suatu konstruk dan nilai *Average Variance Extracted* (AVE) dari masing-masing konstruk. Konstruk dikatakan memiliki reliabilitas yang tinggi jika nilai 0,70 dan AVE berada diatas 0,50. Pada tabel berikut akan disajikan nilai Composite Reliability dan AVE untuk selutuh variabel.

	C o m p o s i t e Reliability	Cronbach's alpha	AVE
TA	0.862	0.807	0.514
KM	0.884	0.850	0.464
JRI	0.864	0.819	0.437

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa semua konstruk memenuhi kriteria Reliabel.Hal ini ditunjukkan dengan nilai *Composite reliability* variabel kinerja di atas 0,70. Namun demikian Pengukuran Average Variance Extract (AVE) masih ada yang memiliki nilai i bawah 0,50. Kondisi ini masih tetap diterima.

Pengujian *inner model* atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk. Pengujian Inner model juga merupakan pengujian dari hubungan antar variabel laten yang dihipotesiskan. Signifikansi parameter yang diestimasi memberikan informasi yang sangat berguna mengenai hubungan antara variabel-variabel penelitian.



Sumber : Data yang diolah dengan menggunakan Warp PLS 5.0, 2016

Tabel berikut memberikan *output estimasi* untuk pengujian model struktural.

	Koef	SE	P Value	Keterangan
TA-KM	0.041	0.071	0.281	Tidak. Sig
TA-JRI	0.363	0.071	<0.001	Sig
JRI-KM	0.588	0.071	<0.001	Sig

Hipotesis pertama yang menyatakan bahwa tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial dapat **diterima** Hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel Tekanan Anggaran terhadap Kinerja manajerial (KM) menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,041 dengan arah positif dan dengan p-value = 0,281 > 0,05. Hasil ini berarti bahwa Tekanan Anggaran tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Kinerja Manajerial. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan afifi (2015) yang menyatakan bahwa variabel tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja sehingga diperlukan variabel meditor supaya kinerja bawahan dapat meningkat dan rencana anggaran dapat tercapai.

Hipotesis kedua yang menyatakan bahwa tekanan anggaran berpengaruh positif terhadap *job relevant information* dapat **diterima** karena hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel Tekanan anggaran terhadap *job relevant information* menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,363 dengan arah positif dan dengan p-value <0,001 . Hasil ini berarti bahwa Tekanan Anggaran memiliki pengaruh positif signifikan terhadap *job relevant information*.

Hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa *job relevant information* berpengaruh positif terhadap kinerja manajerial dapat **diterima** karena hasil pengujian menunjukkan bahwa pengaruh variabel *job relevant information* terhadap kinerja manajerial menunjukkan nilai koefisien sebesar 0,588 dengan arah positif dan dengan p-value <0,001 maka berarti *job relevant information* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial. Dengan peningkatan *job relevant information* akan meningkatkan kinerja manajerial.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan atas dasar hasil pengujian hipotesis maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel tekanan anggaran tidak berpengaruh terhadap kinerja manajerial pemerintah. Dengan hipotesis yang menyatakan tekanan anggaran berpengaruh negatif terhadap kinerja manajerial, maka hipotesis tersebut diterima kebenarannya.
2. Variabel tekanan anggaran berpengaruh terhadap *job relevant information*. Dengan hipotesis yang menyatakan tekanan anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap *job relevant information*, maka hipotesis tersebut diterima kebenarannya.
3. Variabel *job relevant information* berpengaruh terhadap kinerja manajerial. Dengan hipotesis yang menyatakan *job relevant information* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja manajerial, maka hipotesis tersebut diterima kebenarannya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affi, Zaenal (2015). “Pengaruh Tekanan Anggaran, Budget Planning Models terhadap Kinerja Manajerial Pemerintah Daerah. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Arikunto, Suharsimi. (2002). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Edisi Revisi VI. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Brownell, P. (1982a). The role of accounting data in performance evaluation budgetary participation, and organizational effectiveness. *Journal of Accounting Research*. 20(1): 12-27.
- Brownell, P. (1982b). Notes: A field study examination of budgetary participation and locus of control. *The Accounting Review*. LVII(4): pp. 766-777.
- Brownell, P. (1982). articipation in Budgeting Process: When it Works and When it Doesn.t. *Journal of Accounting Literature*. Pp. 124-153.
- Ghozali, Imam. (2005). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. (2013). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- Kung, F.H (2013), “An examination of the relationships among budget emphasis, budget planning models and performance”, *Management Decision*, Vol. 51 Iss 1 pp. 120-140.
- Kren, L. (1992). Budgetary participation and managerial performance: The impact of information and environmental volatility. *The Accounting Review*.67(3): 511-526.
- Latan, H., and Ghozali, I. (2012a). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik dan Aplikasi SmartPLS 2.0 M3*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Lau, C.M. and Ian. (1997), “The interactive effect of budget emphasis, participation and task difficulty on managerial performance: a cross#cultural study”, *Accounting, Auditing & Accountability Journal*, Vol. 10 Iss 2 pp.175 - 197
- Merchant, K. A. and Manzoni, J. F., (1989). The achievability of budget targets in profit centers: a field study, *The Accounting Review*, 64, 539–558.
- Sardjito. (2007). “Pengaruh Partisipasi Penyusunan Anggaran Terhadap Kinerja Aparat Pemerintah Daerah: Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Variable Moderating”. Disampaikan pada Simposium Nasional Akuntansi (SNA) X. Unhas Makassar, 26—28 Juli 2007.
- Setiadi. (2013). “pengaruh partisipasi anggaran Terhadap kinerja manajerial Melalui komitmen organisasi dan Budget emphasis sebagai variabel Intervening (studi kasus pada skpd pemerintah Kabupaten boyolali)”. Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Van der Stede, W.A. (2001), “Measuring tight budgetary control”, *Management Accounting Research*, Vol. 12 No. 1, pp. 119-37.
- Yusfaningrum (2005). pengaruh partisipasi anggaran terhadap kinerja manajerial melalui komitmen tujuan anggaran dan job relevant information sebagai variabel intervening. Tesis. Universitas Diponegoro, Semarang.

## PERENCANAAN KARIR UNTUK MENINGKATKAN KESADARAN KARIR PADA MAHASISWA PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NIAGA POLITEKNIK NSC SURABAYA

Dyah Widowati<sup>1</sup>

***Abstract:** Career Planning To Raise Awareness of Careers in Student Administration Program Politenik NSC Surabaya. This study aims to determine the extent of career planning students study business administration program to raise awareness of his career. A quantitative descriptive study. With the sample was two and a half semester students of four totaling 33 people. The sampling technique used in this study is saturated sampling. Techniques used in the main data collection was a questionnaire, while the observation is support techniques. Collected data were analyzed using data analysis the average (mean). From the analysis of the data showed that the average career planning students with career planning aspects have in the future and also know the weaknesses and advantages in making career choices each with a mean of 4.36 so that the student already has a career awareness by doing career planning as early as maybe when they choose courses at the college. While most aspects contained in the low income to find out information and promotion of various types of work with the mean of 3.76. Concluded that students of business administration already has a career awareness so they have been planning a career as an administrator and a secretary if they have completed their education.*

**Abstrak:** Perencanaan Karir Untuk Meningkatkan Kesadaran Karir Pada Mahasiswa Program Studi Administrasi Niaga Politenik NSC Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perencanaan karir program administrasi bisnis studi siswa untuk meningkatkan kesadaran karirnya. Sebuah penelitian deskriptif kuantitatif. Dengan sampel adalah dua setengah semester mahasiswa dari empat berjumlah 33 orang. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah sampling jenuh. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data utama adalah kuesioner, sementara pengamatan adalah teknik dukungan. Data yang dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan analisis data rata-rata (mean). Dari analisis data menunjukkan bahwa rata-rata perencanaan karir siswa dengan aspek perencanaan karir harus di masa depan dan juga mengetahui kelemahan dan kelebihan dalam membuat pilihan karir masing-masing dengan rata-rata 4,36 sehingga siswa sudah memiliki kesadaran karir dengan melakukan karir perencanaan sedini mungkin ketika mereka memilih kursus di kampus. Sementara sebagian besar aspek yang terkandung dalam berpenghasilan rendah untuk mengetahui informasi dan promosi berbagai jenis pekerjaan dengan rata-rata 3,76. Menyimpulkan bahwa mahasiswa administrasi bisnis sudah memiliki kesadaran karir sehingga mereka telah berkarir sebagai administrator dan sekretaris jika mereka telah menyelesaikan pendidikan mereka.

**Kata Kunci:** perencanaan karir, kesadaran karir.

---

<sup>1</sup> Dosen Politeknik NSC Surabaya, email: diahayudw@gmail.com

## PENDAHULUAN

Politeknik merupakan pendidikan vokasi sebagai sub sistem dari pendidikan tinggi memberikan kontribusi yang signifikan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia sesuai dengan KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang tertuang dalam Undang Undang Pendidikan Tinggi No. 12 tahun 2012. Dengan KKNI diharapkan lulusan pendidikan vokasi mempunyai kompetensi yang dipersyaratkan sehingga dapat terserap dalam dunia industri dan dunia usaha.

Akhir daripada suatu pendidikan tentunya, para lulusan dapat segera mendapatkan pekerjaan yang diinginkan dan diidamkannya. Hal ini merupakan tantangan bagi penyelenggara pendidikan vokasi yang kurang mampu menghadapi perubahan yang dinamis, agar kenyataan yang sering terjadi banyaknya lulusan yang tidak memperoleh pekerjaan dapat ditekan sedemikian rupa. Dengan masa depan yang belum pasti akan dihadapi, setiap mahasiswa hendaknya mencoba meramalkan dan merencanakan masa depannya, perencanaan karir bagi mahasiswa hendaknya sedini mungkin sudah harus direncanakan begitu mereka memilih program studi untuk mengamankan kehidupan masa depannya. Perencanaan karir bagi mahasiswa akan membantu mereka merasa nyaman dengan program studi yang dipilihnya.

Perencanaan karir, mahasiswa harus sangat memahami masyarakat, mengkonfirmasi target akhir, membangun struktur pengetahuan yang wajar, berpartisipasi aktif dalam kegiatan sosial di lingkungan kampus, dan menumbuhkan kualitas yang baik, dan membangun jejaring kerja yang kuat.

Fenomena bahwa pendidikan vokasi diharapkan dapat menjadi jembatan link and match bagi DUDI ternyata juga belum memenuhi harapan, dikarenakan lulusan pendidikan vokasi bukan saja kurang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu dan teknologi tetapi juga kurang mampu mengembangkan diri dan karirnya ditempat kerja (Depdiknas, 2004:1). Hal ini sejalan dengan Sesuai Renstra Kemdiknas 2010-2014, salah satu strategi pembangunan pendidikan nasional lima tahun mendatang adalah pendidikan tinggi yang bermutu dan berkesetaraan jender di semua provinsi, kabupaten/kota.

Berdasarkan pengamatan pada mahasiswa program studi administrasi niaga 50% belum memiliki kesadaran karir melalui kematangan perencanaan karir yang berkaitan erat dengan pemahaman karir itu sendiri, dikarenakan masih banyaknya mahasiswa pada saat ditanya mengapa memilih program studi ini dan setelah lulus berkeinginan berkarir sebagai apa? Dari hal tersebut perlunya mengenalkan perencanaan karir untuk meningkatkan kematangan kesadaran karirnya.

Kemampuan merencanakan karir yang matang berkaitan erat dengan pemahaman mahasiswa mengenai karirnya, sehingga diharapkan mahasiswa mengenal dirinya dan akhirnya dapat memutuskan pilihan yang tepat.

Menurut teori Ginzberg, dimana siswa harus mampu memikirkan atau merencanakan karirnya berdasarkan minat, kapasitas atau kemampuan, dan nilai-nilai atau potensi yang dimilikinya. Hal ini sejalan dengan penemuan Tarigan dan Wimbarti (2011) yang menyatakan bahwa program perencanaan karir efektif untuk meningkatkan CSSE (Career Search Self Efficacy). Didukung temuan Kayalar & Ozmutaf (2009) yang menyatakan bahwa perencanaan karir individu meningkatkan kepuasan kerja, serta temuan dari Rizqi (2014) menyatakan bahwa layanan informasi karier dapat meningkatkan kemampuan perencanaan karier siswa kelas XI Administrasi Perkantoran (AP) 1 SMK Negeri 2 Tegal.

Perencanaan karir adalah proses bertahap yang dimulai dengan berbagai aktivitas dalam kehidupan seperti belajar tentang informasi karir, membicarakan perencanaan karirnya dengan orang yang tepat, berpartisipasi aktif dalam kegiatan positif atau mengikuti pelatihan yang

disukai. Sehingga setidaknya mahasiswa sebagai calon pencari kerja memiliki gambaran dan rencana yang baik untuk masa depan yang diinginkannya.

Dan juga perencanaan karir adalah rekayasa jangka panjang, perencanaan dalam perguruan tinggi hanya sebuah langkah awal yang harus diambil sebagai inti dan proyek penting dari tujuan pendidikan, mengeksplorasi dan membantu mahasiswa mempunyai sasaran kerja yang tepat, merencanakan karir sejak pemilihan program studi, meningkatkan standar ilmu pengetahuan yang mendukung perencanaan karir.

Permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah “Sejauh mana tingkat perencanaan karir dalam meningkatkan kesadaran karir mahasiswa program studi Administrasi Niaga Politeknik NSC Surabaya?”

Pekerjaan merupakan aspek terpenting dari kehidupan dan keinginan manusia dimanapun mereka beraktifitas. Seorang yang tidak bekerja secara jelas akan gelisah dan susah serta merasa stres dan frustrasi. Kerja memberikan seseorang arah, tantangan, pemenuhan diri dan pengembangan diri (Baruch, 2004). Pekerjaan (occupation, vocation, career) merupakan salah satu aspek terpenting dalam kehidupan manusia dewasa yang sehat, di mana pun dan kapan pun mereka berada. Betapa orang akan merasa sangat susah dan gelisah jika tidak memiliki pekerjaan yang jelas, apalagi kalau sampai menjadi penganggur.

Pekerjaan itu sendiri tidak serta merta merupakan pilihan karir. Sedangkan karir (career) lebih menuju pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya (Winkel dan Hastuti, 2007). Dengan demikian pemilihan karir memerlukan lebih banyak persiapan dan perencanaan yang matang dibandingkan mencari pekerjaan yang sementara waktu. Sehingga masalah karir tidak hanya tentang bagaimana untuk mendapatkan pekerjaan, tetapi juga mendapatkan karir yang tepat untuk memenuhi keinginan dan harapan seseorang (Tarigan & Wimbari, 2011).

Dalam dunia pendidikan dikalangan mahasiswa sering muncul beragam pertanyaan yang terkait dengan masa depannya, khususnya karir. Sebuah karir terdiri atas semua pekerjaan yang dipegang seseorang dalam kehidupan pekerjaannya.

Kata pekerjaan (work, job, employment) menunjuk pada setiap kegiatan yang menghasilkan barang atau jasa, sedangkan kata karier (career) lebih menunjuk pada pekerjaan atau jabatan yang ditekuni dan diyakini sebagai panggilan hidup, yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan seseorang, serta mewarnai seluruh gaya hidupnya. Pada dasarnya yang dimaksud dengan karir adalah suatu pilihan profesi atau pekerjaan yang menjadi tujuan bagi seorang individu. Karir juga dapat diartikan sebagai perkembangan dari perjalanan kehidupan kerja seseorang yang digeluti secara serius dan ditingkatkan semaksimal mungkin

Karir adalah seluruh kehidupan kerja seseorang, dimana setiap jenjang karir yang ditempuh mungkin terdiri dari satu atau beberapa jabatan, yang semakin meningkat seiring dengan pengalaman kerja (Corey, 2005). Karir merupakan posisi kerja yang dijabat selama siklus kehidupan pekerjaan seseorang (Rivai, 2004). Karir merupakan semua pekerjaan yang dipegang seseorang selama kehidupan dalam pekerjaannya (Davis & Werther dalam Mangkuprawira, 2011). Disimpulkan bahwa karir adalah suatu yang ditekuni seseorang untuk memajukan kehidupannya.

Komponen utama karir terdiri dari yaitu (1) Alur karir, merupakan pola pekerjaan yang berurutan yang membentuk karir seseorang; (2) Tujuan karir, merupakan pernyataan tentang posisi masa depan di mana seseorang berupaya mencapainya sebagai bagian dari karir hidupnya; (3) Perencanaan karir, merupakan proses dimana seseorang menyeleksi tujuan karir dan arus karir untuk mencapai tujuan tersebut; (4) Pengembangan karir, meliputi perbaikan-perbaikan personal yang dilakukan untuk mencapai rencana dan tujuan karirnya.

Menurut Holland (Dessler, 1998) mengatakan kepribadian seseorang (termasuk nilai, motivasi, dan kebutuhan) adalah penentu penting atas pilihan karir. Terdapat enam tipe atau orientasi kepribadian dasar:

Orientasi Realistik, tertarik pada pekerjaan fisik yang menuntut keterampilan, kekuatan, dan koordinasi. Orientasi Penyelidikan, tertarik pada kegiatan kognitif (berpikir, berorganisasi, memahami), Orientasi Sosial, tertarik pada kegiatan interpersonal. Orientasi Konvensional, menyukai kegiatan terstruktur, teratur. Orientasi Kewiraswastaan, kegiatan yang bertujuan mempengaruhi orang lain yang tertarik pada kepribadian wiraswasta. Orientasi Artistik, tertarik pada karir yang mencakup ekspresi diri, kreasi artistik, ekspresi emosi, kegiatan individualistik. Sesuai uraian tersebut di atas, karir merupakan sesuatu yang ditekuni untuk mensejahterakan kehidupannya, sehingga diperlukan perencanaan karir.

Dengan rencana, orang tidak akan bertindak tanpa arah sehingga dengan rencana lebih konkrit melaksanakan dan mengimplementasikan rencananya berdasarkan target yang telah ditetapkan. Langkah awal dari suatu perencanaan karir, yaitu pengenalan diri yang mengacu pada informasi oleh para mahasiswa untuk menentukan minat karir, nilai-nilai, bakat, dan kecenderungan perilakunya. Oleh karena itu perencanaan karir harus dibuat secara sadar dan sukarela, dan kesuksesan yang diraih harus dijabarkan dengan baik oleh mahasiswa itu sendiri.

Menurut Rivai (2005), perencanaan karir merupakan proses dimana kita menyeleksi tujuan karir dan jenjang karir menuju tujuan tertentu. sedangkan menurut Rosari (2002) menyatakan bahwa perencanaan karir adalah proses yang sengaja dibuat agar individu menjadi sadar akan atribut-atribut yang berkenaan dengan karir personal (personal career related) dan serangkaian panjang tahap-tahap yang menyumbang pada pemenuhan karirnya. Parsons (Winkel & Hastuti, 2004) menyatakan perencanaan karier sebagai proses yang dilalui sebelum melakukan pemilihan karier. Proses ini mencakup tiga aspek utama yaitu pengetahuan dan pemahaman akan diri sendiri, pengetahuan dan pemahaman akan pekerjaan, serta penggunaan penalaran yang benar antara diri sendiri dan dunia kerja.

Dengan dapat disimpulkan bahwa perencanaan karir merupakan proses berkelanjutan yang mana individu melakukan penilaian diri dan penilaian dunia kerja, merencanakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai pilihan karirnya dan mengambil keputusan mengenai karir yang diinginkan.

Parson (Winkel & Hastuti, 2006) menyatakan terdapat tiga aspek perencanaan karir, yaitu (1) pengetahuan dan pemahaman akan bakat, minat, kepribadian, potensi, prestasi akademik, ambisi, keterbatasan-keterbatasan, dan sumber yang dipunyainya; (2) pengetahuan dan pemahaman dunia kerja, yaitu pengetahuan mengenai syarat-syarat dan kondisi-kondisi yang dibutuhkan untuk sukses dalam pekerjaan, keuntungan dan kerugian, kompensasi, kesempatan, dan prospek kerja di berbagai bidang dalam dunia kerja; (3) penalaran yang realistik mengenai hubungan pengetahuan dan pemahaman diri sendiri dengan pengetahuan dan pemahaman dunia kerja .

Menurut Dillard (1985), langkah-langkah yang diperlukan dalam perencanaan karir sebagai berikut: Individu harus mengenali bakat Sehingga individu akan memiliki kesadaran tentang kekuatan dan kelemahan mental dan fisiknya sebagai dasar meramalkan sukses yang akan dicapai dalam karirnya. Individu perlu memperhatikan minat, Individu perlu memperhatikan nilai-nilai. Diperlukan identifikasi nilai-nilai yang dianut oleh individu dalam kaitannya dengan karir tertentu yang akan dipilihnya. Individu perlu memperhatikan kepribadiannya, Kesesuaian antara kepribadian dan karir yang dipilih merupakan suatu hal yang penting dalam perencanaan karir. Individu perlu memperhatikan kesempatan karir. Hendaknya lebih belajar menyesuaikan dan mengembangkan kesempatan karir yang sesuai dengan kemampuannya.

Individu perlu memperhatikan penampilan karir. Penampilan seseorang hendaknya selalu konsisten dengan perilaku dan harapan dalam karir sehingga dapat mempertahankan pekerjaannya. Individu perlu memperhatikan gaya hidup, Keberhasilan perencanaan karir tergantung pada cara individu mengintegrasikan gaya hidupnya dengan pilihan karirnya.

Berdasarkan uraian tersebut dikatakan tujuan perencanaan karir untuk meminimalkan kesalahan yang mungkin dibuat. Dengan Menggunakan perencanaan karir seumur hidup, individu dapat mengidentifikasi keahliannya dan melanjutkan untuk menilai kebutuhannya. Perencanaan harus dipertimbangkan terus-menerus. Individu harus merancang rencana sekarang sehingga akan beradaptasi dengan perubahan dan akan menyediakan alternatif untuk masa depan.

Winkel (2004) mengemukakan bahwa ada beberapa faktor yang mempengaruhi pilihan karir seseorang diantaranya :

1. Faktor internal, meliputi : nilai-nilai kepribadian, taraf intelegensi, bakat khusus, minat, sifat-sifat, pengetahuan, keadaan jasmani
2. Faktor eksternal, meliputi : masyarakat, keadaan sosial ekonomi negara, status
3. Sosial ekonomi keluarga, pengaruh keluarga, pendidikan sekolah, pergaulan teman sebaya dan tuntutan yang melekat pada masing-masing jabatan.

Pendidikan Vokasi, Pendidikan vokasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menghasilkan penelitian terapan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. (Yunus, 2013)

Namun demikian, pendidikan tinggi sebagai penghasil tenaga kerja terdidik ternyata berjarak dengan dunia kerja dan kenyataan di lapangan menunjukkan antara lain: (1) masih tingginya jumlah penganggur terbuka, (2) kualitas kompetensi pekerja belum memenuhi kebutuhan pasar kerja dan tingkat produktivitas kerja masih rendah, (3) kesenjangan upah antar pekerja masih relatif besar, (4) kesenjangan gender, (5) kesulitan daerah tertinggal untuk mendapatkan tenaga kerja yang profesional, disisi lain masih tinggi pengangguran di wilayah lain, (6) rendahnya penciptaan usaha baru dan kemampuan berwirausaha, (7) belum optimalnya informasi pasar kerja yang dinamis dan terkini, (8) kurang adanya komunikasi antara pasar kerja dengan dunia pendidikan, (9) internal dunia pendidikan (sarana dan prasarana, fasilitator, sistem pembelajaran) belum responsif atau selalu terlambat menyikapi perubahan pasar kerja, (10) upaya penyelesaian problem penyesuaian selama ini masih bersifat parsial dan sporadis, (11) belum siapnya masyarakat industri maupun tenaga kerja dalam menghadapi Asia China Free Trade Agreement (ACFTA) (Kemenristek Dikti, 2012).

Agar para lulusan dapat memperoleh jaminan jabatan atau pekerjaan yang memuaskan sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya, maka diperlukan pembekalan hard skill maupun soft skill dalam perencanaan karir secara matang.

Substansi dari pendidikan kejuruan harus menampilkan karakteristik pendidikan kejuruan yang tercermin dalam aspek-aspek yang erat dengan perencanaan kurikulum, yaitu kurikulum pendidikan kejuruan telah berorientasi pada proses dan hasil atau lulusan. Namun keberhasilan utama kurikulum pendidikan kejuruan tidak hanya diukur dengan keberhasilan pendidikan peserta didik di sekolah saja, tetapi juga Pengembangan kurikulum merupakan sesuatu hal yang dapat terjadi kapan saja sesuai kebutuhan (Oemar Hamalik, 2007:90).

Perguruan tinggi seharusnya tidak hanya memberikan mahasiswa pengetahuan profesional tertentu tetapi struktur pengetahuan yang wajar, dan menumbuhkan pemahaman berbagai kualitas, mendorong berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, melatih kemampuannya sendiri. Hendaknya pendidikan vokasi memperkuat belajar keterampilan profesional, dan meningkatkan keterampilan kerja dan kemampuan innovational sehingga mahasiswa dapat memecahkan masalah secara mandiri.

## METODE PENELITIAN

Populasi dalam penelitian ini adalah Mahasiswa program studi administrasi niaga Politeknik NSC Surabaya. Sampel hanya di ambil pada mahasiswa semester 2 dan 4, dikarenakan semester 2 dan semester 4 merupakan (1) mahasiswa yang belum mengetahui pentingnya perencanaan karir, (2) mahasiswa semester 6 saat penelitian ini sedang melaksanakan praktik kerja lapangan di dunia usaha dan dunia industri juga banyak yang sudah bekerja.

Tabel 1. Sampel

No	Semester	Jumlah
1	Semester 4	9
2	Semester 2	24
Total		33

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji validitas dan reliabilitas, Kuesioner yang disebar sejumlah 33 mahasiswa dan kembali semua. Semua pernyataan kuesioner tersebut valid mempunyai nilai lebih besar dari t tabel yaitu 0,239 (Sugiyono,2011). Demikian pula semua kuesioner menunjukkan realibilitas, dengan koefisien alpha, item pengukuran realibel memiliki nilai koefisien alpha lebih dari 0,6 (Sugiyono, 2011).

Tabel 2. Hasil Uji Validitasi dan Reliabilitas

No	Item	Valid	Alpha C
1	Persiapan karir	0,749	0,942
2	Alternatif pilihan karir	0,781	0,942
3	rencana karir masa dpn	0,755	0,943
4	Informasi karir	0,797	0,941
5	Sumber info karir	0,806	0,941
6	Keputusan karir	0,779	0,942
7	Pengetahuan memasuki dunia kerja	0,753	0,942
8	Info penghasilan & promosi jenis pekerjaan	0,606	0,946
9	Cara meraih sukses dalam karir	0,734	0,943
10	Pengetahuan jenis dan persyaratan pekerjaan	0,812	0,941
11	Faktor2 dan alasan pilihan karir	0,739	0,943
12	Mengetahui resiko2 dari pekerjaan	0,765	0,942
13	Kelemahan dan keunggulan pilihan karir	0,823	0,941
14	Hambatan pilihan karir	0,807	0,941
15	Manfaat keputusan yang realistik	0,704	0,943

Tabel 3. Mean

No	Item	Mean
1	Persiapan karir	4,24
2	Alternatif pilihan karir	3,97
3	Perencanaan karir masa dpn	4,36
4	Informasi karir	3,91
5	Sumber info karir	4,00
6	Keputusan karir	3,97
7	Pengetahuan memasuki dunia kerja	4,09
8	Info penghasilan & promosi jenis pekerjaan	3,76
9	Cara meraih sukses dalam karir	4,24
10	Pengetahuan jenis dan persyaratan pekerjaan	4,06
11	Faktor2 dan _able__ pilihan karir	4,09
12	Mengetahui resiko2 dari pekerjaan	4,06
13	Kelemahan dan keunggulan pilihan karir	4,36
14	Hambatan pilihan karir	4,06
15	Manfaat keputusan yang realistik	4,00

Secara keseluruhan dapat dipaparkan hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa semua mahasiswa program studi administrasi niaga Politeknik NSC Surabaya menyetujui pentingnya perencanaan karir sejak dini, dan hal ini dibuktikan semua jawaban kuesioner mengenai perencanaan karir yang terdiri dari 15 item pernyataan menunjukkan rata-rata mean 4,078.

Item pernyataan yang tertinggi dengan mean 4,36 mengenai mahasiswa mempunyai perencanaan karir di masa depan dan juga mahasiswa mengetahui kelemahan dan keunggulan diri dalam menentukan pilihan karir, sehingga hal ini dapat dikatakan mahasiswa sudah mempunyai kesadaran karir di masa depannya. Sedangkan mean yang paling rendah 3,76 mengenai mahasiswa perlu mengetahui informasi penghasilan dan promosi berbagai jenis pekerjaan. Dari jawaban mahasiswa tersebut menunjukkan bahwa perlunya pihak-pihak terkait bekerja sama dengan dunia usaha dan dunia able untuk lebih banyak memberikan informasi lowongan kerja.

Disamping mahasiswa sudah mempunyai kesadaran karir dengan melakukan perencanaan karir lebih awal, mereka juga merasa secara able orang yang bekerja mendapatkan status able yang lebih terhormat daripada yang tidak bekerja. Lebih jauh lagi orang yang memiliki pekerjaan secara psikologis akan meningkatkan harga diri dan kompetensi diri. Pekerjaan juga dapat menjadi wahana yang subur untuk mengaktualisasikan segala potensi yang dimilikinya.

Adapun perencanaan karir setelah mereka menyelesaikan kuliah di Politeknik NSC Surabaya program studi Administrasi Niaga dari 33 responden terlihat pada able di bawah ini

Tabel 4. Rencana Karir

No	Perencanaan Karir	Jum. responden
1	Wiraswasta	7
2	Sekretaris	8
3	Administrator	8
4	Public Relation	4
5	Front Office	2
6	Tidak punya pilihan	4
Total		33

Dengan berbagai macam perencanaan karir oleh mahasiswa program studi administrasi niaga hendaknya Politeknik NSC Surabaya melakukan pembimbingan karir yang dilakukan secara kontinu oleh pihak yang berwenang. Mahasiswa juga sangat mengharapkan bahwa bagian kerjasama (HUDER's) hendaknya selalu up data penawaran kerja dan kesesuaian dengan bidang keilmuan.

Politeknik NSC Surabaya, sebagai institusi pendidikan hendaknya memahami perencanaan karir merupakan proyek penting jangka panjang. Pihak-pihak terkait lebih mengeksplorasi dan membantu mahasiswa untuk mencapai sasaran kerja yang tepat, merencanakan pembimbingan karir mahasiswa secara tepat guna, dan yang paling penting banyak bekerja sama dengan berbagai perusahaan yang berkualitas.

## KESIMPULAN

Mahasiswa program studi administrasi niaga Politeknik NSC Surabaya telah mempunyai perencanaan karir dengan mean 4,078 sebelum menentukan program studi yang akan dipilihnya dalam melanjutkan pendidikan. Dengan perencanaan karir yang sudah dimilikinya mahasiswa telah memiliki kesadaran karir yang dipilihnya setelah menyelesaikan pendidikan di program studi administrasi niaga, dimana karir yang ingin dicapainya dalam bidang administrasi dan menjadi sekretaris..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Baruch, Yehuda, (2004), *Managing Career: Theory and Practice*, London: Prentice-Hall
- Corey, Gerald, (2005), *Teori dan Praktik Konseling dan Psikoterapi*, Bandung: Refika Aditama.
- Dessler, Gary, (1998), *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta, PT Prenhallindo.
- Dillard, J.M., (1985), *Life Long Career Planning*. Ohio: Charles E. Merrill Publishing Co.
- Hamalik, Oemar., (2007), *Psikologi Belajar & Mengajar*, Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Kayalar, Murat & Ozmutaf N. Metin, (2009), *The Effect of Individual Career Planning On Job Satisfaction: A Comparative Study On Academic and Administrative Staff*, *The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences* Y.2009, Vol.14, No.1 pp.239-254.
- Mangkuprawira, Tb., Sjafri, (2014), *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategik*, Bogor, Ghalia Indonesia.
- Rivai Veithzal, (2005), *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta, PT Rajagrafindo Persada.
- Rizqi, Priska, Rieftiana, (2014), *Upaya Meningkatkan Kemampuan Perencanaan Karier Siswa Melalui Layanan Informasi Karier Pada Siswa Kelas XI Administrasi Perkantoran (AP) 1 SMK Negeri 2 Tegal*, Skripsi, Fakultas Pendidikan, Universitas Negeri Semarang
- Sugiyono, (2011), *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, Alfabeta, Bandung, 2011
- Tarigan, Medianta & Wimbari, Supra, (2011), *Career Planning Program to Increase Career Search Self Efficacy in Fresh Graduates*, *Journal of Higher Education Theory and Practice* vol. 11(4) 2011.
- Winkel, W. S dan Hastuti Sri, (2007), *Bimbingan dan Konseling di Institusi Pendidikan*, Yogyakarta: Media Abadi.
- Yunus, Yuhanis, (2013), *Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia Melalui Pendidikan Vokasi*, Prosiding SNYuBe 2013.

**PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN REPUTASI PERUSAHAAN  
TERHADAP KEPUASAN NASABAH DAN LOYALITAS NASABAH  
PADA  
PD. BPR BKK KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN**

Murni Sulistyowati<sup>1</sup>  
Septiana Novita Dewi<sup>2</sup>  
Aris Tri Haryanto<sup>3</sup>

***Abstract:** Effect of Service Quality and the Customer Satisfaction Corporate Reputation and Customer Loyalty in PD. BPR BKK Karangmalang Sragen. Service quality research results and significant positive effect on customer satisfaction. The company's reputation and significant positive effect on customer satisfaction. Quality of service and no significant negative effect on customer loyalty. The company's reputation and significant positive effect on customer loyalty. Customer satisfaction and significant positive effect on customer loyalty. The F test results can be concluded jointly variable service quality, company reputation and customer satisfaction affects customer loyalty. R2 obtained a yield of 0.802 total this means that the Customer Loyalty In PD. BPR BKK Karangmalang Sragen explained by the variable quality of service, the company's reputation and customer satisfaction of 80.2%. The results of path analysis showed that the quality of services effectively through indirect pathways, because the results of the indirect effect is greater than the direct effect. The results of path analysis showed that the company's reputation effectively through direct path, because the result of the direct effect is greater than the indirect effect.*

**Abstrak:** Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Reputasi Perusahaan terhadap Kepuasan Nasabah dan Loyalitas Nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Hasil penelitian Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah. Reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hasil uji F dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan dan kepuasan nasabah mempengaruhi loyalitas nasabah. R2 total didapatkan hasil sebesar 0,802 ini berarti bahwa Loyalitas Nasabah Pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan dan kepuasan nasabah sebesar 80,2%. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kualitas pelayanan efektif melalui jalur tidak langsung, karena hasil pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa reputasi perusahaan efektif melalui jalur langsung, karena hasil pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung.

**Kata Kunci:** Kualitas Pelayanan, Reputasi Perusahaan, Kepuasan Nasabah, Loyalitas Nasabah.

1 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta.

2 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta, email: Septianadewi25@yahoo.co.id

3 Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AUB Surakarta.

## PENDAHULUAN

Terjadinya pergeseran objek pemasaran, yakni tidak lagi ditekankan pada ideas (ide), goods (barang), dan service (jasa), tetapi nasabah. Pengelolaan hubungan dengan nasabah, sebagaimana diungkapkan Utami, (2006) menjadi titik sentral untuk disiplin pemasaran. Suatu organisasi perlu mengenal masalah nasabah secara reaktif dan ekspektasi nasabah secara proaktif untuk menjamin hubungan jangka panjang dengan nasabah. Menurut Disney (dalam Utami, 2006), kebutuhan untuk fokus terhadap konsumen akan terus mengalami peningkatan. Pemahaman terhadap kebutuhan serta keinginan konsumen yang belum terpenuhi, maupun strategi yang membuat konsumen menjadi loyal pun menjadi hal yang krusial untuk terus dipikirkan oleh perusahaan. Karena tidak ada noda yang menyangkal bahwa memiliki nasabah yang loyal adalah segalanya bagi perusahaan. Seorang pakar pemasaran berpendapat (Kertajaya,dkk, 2003) bahwa “Customer loyalty is the DNA of marketing” yang artinya loyalitas nasabah adalah DNA pemasaran, karena loyalitas nasabah adalah jaminan keunggulan bersaing, pertumbuhan, laba dan sustainability (ketahanan) jangka panjang perusahaan.

Menyadari kenyataan yang dihadapi dalam kondisi ini, dunia bisnis seyogyanya membangun sistem kualitas modern agar mampu mempertahankan nasabah yang telah ada (customer loyalty) dan menarik konsumen yang menjadi nasabah dari perusahaan bisnis itu. Memfokuskan untuk mendengarkan suara nasabah, berarti menjamin bahwa kualitas bisa dibangun dalam produk-produk atau versi produk baru yang sudah ada dalam tahap desain awal. Secara spesifik, pentingnya meningkatkan kualitas pelayanan adalah untuk menciptakan kepuasan nasabah dengan menjadikan nasabah sebagai fokus utamanya. Jadi, persoalan kualitas pelayanan dan kepuasan konsumen kini menjadi sangat penting bagi perusahaan jasa. Oleh karena itu, perusahaan perlu membangun sistem manajemen kualitas jasa, mengidentifikasi kesenjangan yang mungkin terjadi, serta pengaruhnya bagi kepuasan konsumen dan perilaku konsumen purna layanannya. Melalui pemahaman ini diharapkan perusahaan jasa akan mampu mengeliminasi tuntutan konsumen dan mengoptimalkan kepuasan nasabahnya (Lupiyoadi & Hamdani, 2006).

Hasil penelitian Basuki dan Endang, (2014), Selvy, Srikandi, Andriyani (2013), Atika dan Ketut, (2013), hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan dan loyalitas nasabah. Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa organisasi yang bergerak dibidang jasa, merupakan salah satu dari sekian banyak organisasi yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Jasa perbankan merupakan bisnis yang berbasis pada asas kepercayaan yang menuntut perusahaan makin mengoptimalkan pelayanan kepada nasabah. Hal ini dilakukan agar kepuasan nasabah tetap terjaga yang artinya nasabah merasa puas apabila kebutuhannya terpenuhi, puas karena pelayanan yang diberikan oleh PD. BPR BKK Karangmalang.

Selain faktor kualitas layanan hal lain yang tidak kalah pentingnya adalah memperhatikan reputasi perusahaan. Dari hasil penelitian Rosidah (2011) tingkat loyalitas nasabah memiliki kecenderungan untuk lebih tinggi ketika persepsi dari reputasi perusahaan dan reputasi perusahaan sangat menguntungkan. Selain itu, penambahan interaksi antara kedua konstruk memberikan kontribusi untuk lebih menjelaskan loyalitas nasabah.

Sulistiari, (2008) menyatakan bahwa reputasi perusahaan (corporate reputation) adalah persepsi nasabah mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama perusahaan. Ini berarti nama perusahaan memberi pengaruh positif pada respon nasabah terhadap produk atau jasa. Semakin baik reputasi perusahaan, semakin bangga nasabah melakukan transaksi di perusahaan tersebut. Hasil penelitian Ikawati, (2011) hasilnya menunjukkan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepuasan nasabah dan loyalitas nasabah.

Berdasarkan hal tersebut, maka pentingnya reputasi perusahaan pada sebuah perbankan sangat menentukan perkembangan sebuah organisasi dalam menghadapi pesaingnya.

Tuntutan kinerja bank yang baik menjadi harapan bagi setiap bank untuk dapat melakukannya sebagai konsekuensi tuntutan masyarakat yang tidak dapat memilih alternatif yang baik baginya (*general customer*), kemudian berubah menjadi konsumen yang sudah dapat memilih yang baik (*enlightened customer*), kemudian berubah menjadi konsumen yang sudah memiliki informasi lebih dalam memilih produk yang hendak dikonsumsi (*informationalized customer*), bahkan inipun diperkirakan ada yang telah berubah menjadi konsumen yang mempunyai kekuatan bargaining yang tinggi untuk mewujudkan harapannya (*empowered customer*), Hermawan; 2005). Hal ini merupakan tantangan pihak bank untuk mewujudkan *performance* yang baik.

Lebih jauh, untuk mendapatkan loyalitas nasabah tentu bagi manajemen jasa perbankan perlu mengetahui kepuasan nasabahnya. Salah satunya bisa diimplementasikan saat para nasabah bisa mengetahui dan menggunakan fasilitas yang dimiliki sehingga memuaskan mereka. Ini menunjukkan bahwa kepuasan nasabah tergantung pada kinerja produk (Kotler, et. al 2001). Peningkatan loyalitas nasabah adalah stimulan paling penting bagi kinerja perbankan jangka panjang serta kualitas layanan maupun kepuasan nasabah yang bisa ditunjukkan sebagai kunci keberhasilan menjaga loyalitas nasabah.

Terciptanya pelayanan yang baik pada hakikatnya akan menimbulkan kepuasan bagi pihak yang mendapat pelayanan. Pada dasarnya kepuasan merupakan hal yang bersifat pribadi. Setiap individu akan merasakan tingkat kepuasan yang berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada dirinya. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan individu. Kepuasan dalam diri individu mempunyai peranan penting dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan. PD. BPR BKK Karangmalang sebagai organisasi pelaksana pelayanan di wilayah kerjanya harus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, karena pada hakikatnya kualitas ditentukan hanya oleh masyarakat. Salah satu cara untuk meningkatkan kualitas pelayanan adalah dengan memenuhi harapan masyarakat dengan cara meningkatkan mutu pelayanan. Rasa puas orang yang memerlukan kualitas pelayanan bisa diartikan dengan membandingkan bagaimana pandangan antara pelayanan yang diterima dengan harapan pelayanan yang diharapkan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ikawati (2011), melakukan pengujian tentang pengaruh reputasi perusahaan terhadap loyalitas nasabah. Penelitian lain yang berkaitan dengan reputasi perusahaan adalah penelitian yang dilakukan Selnes, (1993) “An examination of the effect of product performance on brand reputation, satisfaction and loyalty”. Hasilnya adalah reputasi yang dimiliki perusahaan akan mampu meningkatkan kepuasan nasabah sehingga akan membentuk sikap loyal nasabah terhadap perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Samraz dan Bahktiar, (2012) yang berjudul “The Impact of Service Quality, Customer Satisfaction and Loyalty Programs on Customer’s Loyalty: Evidence from Banking Sector of Pakistan” hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan mempunyai pengaruh positif terhadap kepuasan dan loyalitas.

Kemajuan perekonomian mempengaruhi kehidupan masyarakat. Peningkatan status sosial dan ekonomi masyarakat, berakibat pada perubahan persepsi dan gaya hidup. Perubahan tersebut pada akhirnya mempengaruhi kepuasan dan loyalitas terhadap suatu produk baik yang berwujud nyata ataupun jasa. Setiap perusahaan atau organisasi selalu berusaha untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah.

Berangkat dari fenomena dan pemikiran-pemikiran di atas dan untuk mendapatkan bukti empirik, maka diperlukan penelitian berkenaan dengan pengaruh kualitas pelayanan dan reputasi perusahaan terhadap kepuasan nasabah dan dampaknya terhadap loyalitas nasabah.

untuk itulah kiranya penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Reputasi Perusahaan Terhadap Kepuasan Nasabah Dan Loyalitas Nasabah Pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen”

Hubungan antar variabel kualitas pelayanan, reputasi terhadap kepuasan dan loyalitas didasari pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Basuki dan Endang, (2014), Atika dan Ketut, (2013), Selvi, Srikandi dan Andriyani, (2013), Onditi, (2012), Samraz Dan Bakhtiar, (2012). Hasilnya menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, reputasi mempunyai hubungan yang positif terhadap loyalitas. Hubungan pelanggan (relationship) adalah upaya menjalin relasi jangka panjang dengan para pelanggan. Asumsinya adalah bahwa relasi yang kokoh dan saling menguntungkan antara penyedia jasa dan pelanggan dapat membangun bisnis ulangan (repeat business) dan menciptakan loyalitas Pelanggan.

Membangun kepuasan pelanggan dapat dilihat dari aspek mutu pelayanan, yang membedakan pelayanan sebuah perusahaan adalah menyediakan secara konsisten pelayanan yang lebih tinggi dari kompetitornya. Kuncinya adalah memenuhi harapan-harapan konsumen tentang kualitas pelayanan yang diinginkan. Harapan-harapan konsumen dibentuk dari pengalaman konsumen melakukan pembelian di waktu lalu, saran dari teman atau kelompok sejawat, maupun janji-janji yang diberikan perusahaan maupun kompetitornya yang disebut dengan reputasi yang baik.

Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika kinerja berada dibawah harapan, pelanggan tidak puas. Jika kinerja memenuhi harapan, pelanggan puas. Jika kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang.

Hipotesis (Sugiyono, 2001) dapat diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah. Karena sifatnya masih sementara, maka perlu dibuktikan kebenarannya melalui data empirik yang terkumpul. Dari uraian sebelumnya, maka dapat ditarik hipotesis sebagai berikut:

- H1: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H2: Reputasi perusahaan berpengaruh terhadap kepuasan nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H3: Kualitas pelayanan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H4: Reputasi perusahaan berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.
- H5: Kepuasan nasabah berpengaruh terhadap loyalitas nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi penelitian pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen yang merupakan kantor pusat BPR BKK di Kabupaten Sragen, yang beralamatkan di Jl. Dewi Sartika, Karangmalang, Kode Pos: 57291 Sragen, Jawa Tengah. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari Variabel independen terdiri dari kualitas pelayanan (X1), reputasi perusahaan (X2), sedangkan variabel intervening adalah kepuasan nasabah dan variabel dependen adalah loyalitas nasabah (Y).

Populasi dalam penelitian ini adalah nasabah di PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen sekitar 950 nasabah. Sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari populasi yaitu sebesar 95 nasabah PD. BPR BKK Karangmalang dengan menggunakan teknik random sampling. Penelitian ini melakukan pengumpulan data melalui penyebaran daftar pertanyaan yang disusun secara berjenjang berdasarkan skala pengukuran Likert (Sugiyono, 2001), dengan

urutan lima yaitu: 1,2, 3, 4, 5 dan mempunyai kriteria jawaban sangat tidak setuju sampai jawaban sangat setuju.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1.  
Hasil Analisis Jalur Persamaan 1

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.075	1.417		1.464	.147
	Kualitas_pelayanan	.567	.094	.542	6.006	.000
	Reputasi_Perusahaan	.300	.093	.290	3.208	.002

a. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Tabel 2.  
Hasil Analisis Jalur Persamaan 2

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.372	1.516		2.883	.005
	Kualitas_pelayanan	-.120	.118	-.114	-1.018	.311
	Reputasi_Perusahaan	.366	.104	.352	3.509	.001
	Kepuasan_Nasabah	.552	.110	.551	5.006	.000

a. Dependent Variable: Loyalitas nasabah

Tabel 3.  
Hasil Uji t Persamaan 1

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	2.075	1.417		1.464	.147
	Kualitas_pelayanan	.567	.094	.542	6.006	.000
	Reputasi_Perusahaan	.300	.093	.290	3.208	.002

a. Dependent Variable: Kepuasan\_Nasabah

Tabel 4.  
Hasil Uji t Persamaan 2

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.372	1.516		2.883	.005
	Kualitas_pelayanan	-.120	.118	-.114	-1.018	.311
	Reputasi_Perusahaan	.366	.104	.352	3.509	.001
	Kepuasan_Nasabah	.552	.110	.551	5.006	.000

a. Dependent Variable: Loyalitas\_nasabah

Sumber : Data yang diolah, 2015

Tabel 5.  
Hasil Uji F Persamaan Pertama

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	849.245	2	424.623	65.851	.000 <sup>a</sup>
	Residual	593.239	92	6.448		
	Total	1442.484	94			

a. Predictors: (Constant), Reputasi Perusahaan, Kualitas pelayanan  
b. Dependent Variable: Kepuasan Nasabah

Tabel 6.  
Hasil Uji F Persamaan Kedua

ANOVA						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	792.970	3	264.323	36.653	.000 <sup>a</sup>
	Residual	656.251	91	7.212		
	Total	1449.221	94			

a. Predictors: (Constant), Kepuasan\_Nasabah, Reputasi\_Perusahaan, Kualitas\_pelayanan  
b. Dependent Variable: Loyalitas nasabah

Tabel 7.  
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.767 <sup>a</sup>	.589	.580	2.539

a. Predictors: (Constant), Reputasi\_Perusahaan, Kualitas pelayanan

Tabel 8.  
Hasil Koefisien Determinasi Persamaan 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.740 <sup>a</sup>	.547	.532	2.685

a. Predictors: (Constant), Kepuasan\_Nasabah, Reputasi\_Perusahaan, Kualitas pelayanan

Sumber : Data yang diolah, 2015

Tabel 9.  
Hasil Analisis Koefisien Korelasi

Correlations					
		Kualitas pelayanan	Reputasi Perusahaan	Kepuasan Nasabah	Loyalitas nasabah
Kualitas_pelayanan	Pearson Correlation	1	.672**	.737**	.528**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000
	N	95	95	95	95
Reputasi_Perusahaan	Pearson Correlation	.672**	1	.654**	.636**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000
	N	95	95	95	95
Kepuasan_Nasabah	Pearson Correlation	.737**	.654**	1	.697**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000
	N	95	95	95	95
Loyalitas_nasabah	Pearson Correlation	.528**	.636**	.697**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	
	N	95	95	95	95

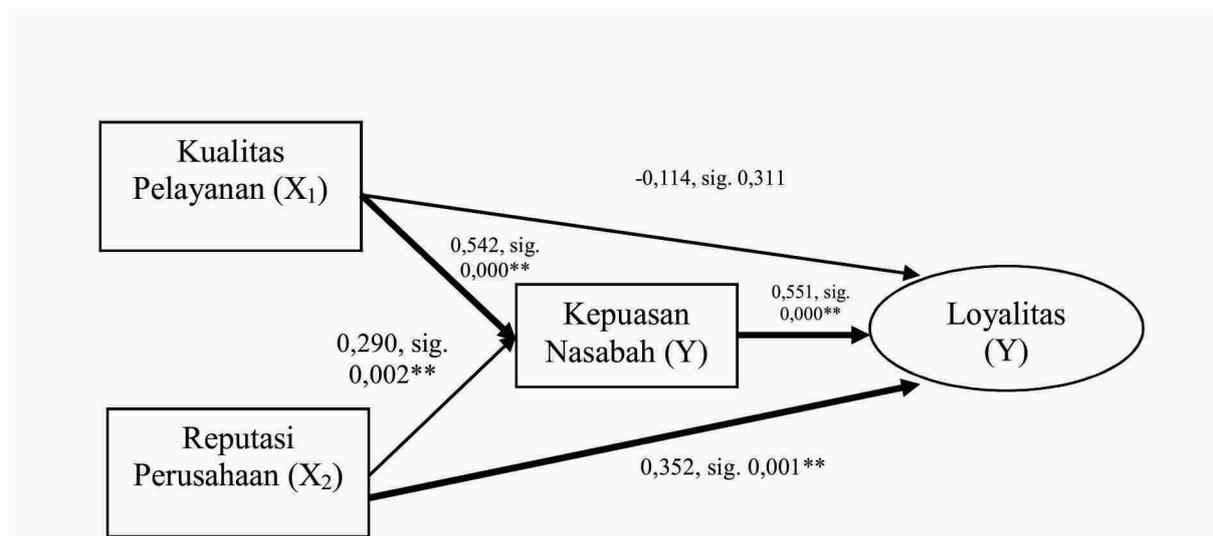
\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 10.  
Pengaruh Langsung Dan Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Koefisien Jalur		Total Pengaruh
	DE (Direct Effect)	IE (Indirect Effect)	
X1 ke Y	=P3=-0,114		
X2 ke Y	=P4=0,352		
X3 ke Y	=P5=0,551		
X1 melalui X6 Ke Y		= P1 X P5 =0,542 x 0,551 =0,298	=-0,114+0,298 =0,184
X2 melalui X6 Ke Y		= P2 X P5 =0,290 x 0,551 =0,159	=0,352+0,159 =0,511

Sumber : Data yang diolah, 2015

Dari tabel di atas ternyata kualitas pelayan, reputasi perusahaan dan kepuasan nasabah memiliki jalur ke loyalitas nasabah baik secara langsung maupun tidak langsung melalui kepuasan nasabah. Hubungan antar variabel dapat digambarkan dengan bagan sebagai berikut:



Gambar 1 Pengaruh Langsung Dan Tidak Langsung

Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Loyalitas. Secara teoritis dimensi kualitas pelayanan akan mampu meningkatkan kepuasan nasabah. (Parasuraman, et.,al. 2005). Konsep kualitas pelayanan dikembangkan untuk memenuhi harapan-harapan nasabah akan kualitas jasa, sejauh mana pelayanan yang diberikan mampu memenuhi harapan nasabah, sehingga tingkat kepuasan akan dirasakan oleh setiap nasabah. Berdasarkan teori tersebut, terbukti secara empiris yang menunjukkan hasil penelitian ini bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Artinya semakin baik tingkat kualitas pelayanan yang diberikan oleh PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Hasil penelitian Basuki dan Endang, (2014), Selvy, Srikandi, Andriyani (2013), Atika dan Ketut, (2013), hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap kepuasan.

Keberadaan kualitas layanan tetap dipandang sebagai salah satu faktor penting dalam menumbuhkan kemauan nasabah untuk membeli kembali, membeli lebih jenis layanan lainnya

dan merekomendasikan pengalamannya kepada orang lain. Kemudian dapat diartikan bahwa kualitas layanan akan berdampak positif terhadap loyalitas nasabah Tjiptono (2009:65). Berdasarkan uji statistik hasil penelitian ini tidak mendukung teori yang disampaikan oleh Tjiptono (2009:65). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen.

Hasil tersebut juga tidak mendukung hasil penelitian Basuki dan Endang, (2014), Selvy, Srikandi, Andriyani (2013), Atika dan Ketut, (2013), hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh signifikan kualitas pelayanan terhadap loyalitas nasabah. Hal ini kemungkinan terjadi bahwa PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen merupakan BPR BKK pusat di Kabupaten Sragen dengan memiliki 14 cabang di Kabupaten Sragen dan jumlah nasabah berkisar ribuan nasabah yang rata-rata adalah nasabah lama dan selalu menggunakan jasa-jasa yang ditawarkan oleh PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, sehingga nasabah tersebut sudah percaya dengan kemampuan PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dalam melayani nasabah, sehingga peningkatan kualitas pelayanan tidak begitu diperhatikan oleh nasabah PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen, karena nasabah sudah merasa puas atas pelayanan yang diberikan saat ini.

Kualitas pelayanan dapat meningkatkan kepuasan nasabah, oleh sebab itu PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen perlu melakukan peningkatan kualitas pelayanan tujuannya adalah untuk meningkatkan kepuasan nasabah. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah dengan cara:

Memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya keramahan, tanggap terhadap masalah, tepat dalam memberikan solusi dan kecepatan melayani nasabah.

Biaya di PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen lebih murah dibandingkan perbankan lainnya, misalnya adanya bunga pinjaman yang rendah dan tingkat Bunga yang tinggi pada simpanan.

Adanya peralatan yang lengkap yang dapat memberikan kemudahan dalam melayani nasabah, misalnya adanya mesin dalam antrian nasabah, adanya fasilitas ruang tunggu yang nyaman. Peningkatan kondisi fisik yang dapat dirasakan langsung oleh nasabah, misalnya tersedianya tempat parkir yang sejuk dan luas, adanya tempat ibadah yang memadai.

Pengaruh Reputasi Perusahaan Terhadap Loyalitas. Sulistiarini, (2008) menyatakan bahwa reputasi perusahaan (corporate reputation) adalah persepsi nasabah mengenai kualitas yang dihubungkan dengan nama perusahaan. Ini berarti nama perusahaan memberi pengaruh positif pada respon nasabah terhadap produk atau jasa. Semakin baik reputasi perusahaan, semakin bangga nasabah melakukan transaksi di perusahaan tersebut, yang artinya tingkat kepuasan nasabah tinggi.

Secara empiris teori tersebut didukung oleh hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikawati, (2011) hasilnya menunjukkan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan kepuasan nasabah.

Pada penelitian yang dilakukan Blomer dan Ruyter (1997) Reputasi adalah suatu persepsi yang kompleks dari nasabah mengenai perusahaan tersebut yang didasarkan pada atribut yang melekat padanya. Nasabah akan melakukan penilaian terhadap atribut tersebut dengan cara melihat, mendengar dan merasakan, kemudian hasil dari kegiatan tersebut akan dibandingkan dengan informasi yang telah diperoleh sebelumnya dari nasabah yang lain untuk kemudian dijadikan dasar dalam melakukan evaluasi terhadap perusahaan tersebut. Carmeli dan Tisher (2004) menjelaskan bahwa reputasi adalah merupakan salah satu bagian penting

dalam menghadapi persaingan dalam lingkungan usaha dan salah satu faktor yang dapat meningkatkan loyalitas nasabah.

Secara empiris teori tersebut sejalan dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah. Hasil penelitian ini juga didukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Ikawati, (2011) hasilnya menunjukkan bahwa reputasi perusahaan berpengaruh positif terhadap peningkatan loyalitas nasabah.

Berdasarkan hasil penelitian, maka PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen sebaiknya meningkatkan reputasi perusahaan agar menjadi lebih baik kembali, tujuannya adalah untuk dapat meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah. Langkah-langkah yang dapat dilakukan adalah dengan cara: Meningkatkan kompetensi perusahaan terhadap core bussinessnya, yaitu dapat dilakukan dengan cara adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Meningkatkan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya, misalnya adanya keunggulan dengan hadiah-hadiah besar seperti mobil, sepeda motor, dll yang ditawarkan bagi nasabah yang selalu aktif menggunakan jasa PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Meningkatkan kepercayaan nasabah terhadap perusahaan, misalnya adanya jaminan pelayanan, seperti keamanan dalam menyimpan dana di PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Meningkatkan pengalaman perusahaan dalam bidang industri yang dimasukinya, misalnya peningkatan dengan cara adanya survey lapangan, dengan hal tersebut dapat mengetahui kebutuhan nasabah pada saat ini, sehingga PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dapat menyediakannya.

Dengan adanya beberapa peningkatan yang dapat dilakukan di atas, diharapkan tingkat loyalitas nasabah PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen menjadi lebih optimal.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan, Kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Reputasi perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Kepuasan nasabah berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen. Hasil uji F pada persamaan kedua diketahui besarnya nilai  $F = 36.653$  signifikansi  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan secara bersama-sama variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan dan kepuasan nasabah mempengaruhi loyalitas nasabah.  $R^2$  total didapatkan hasil sebesar 0,802 atau 80,2% ini berarti bahwa Loyalitas Nasabah Pada PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen dijelaskan oleh variabel kualitas pelayanan, reputasi perusahaan dan kepuasan nasabah sebesar 80,2% dan sisanya 19,8% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak ikut terobservasi, misalnya lokasi dan harga. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa kualitas pelayanan efektif melalui jalur tidak langsung, karena hasil pengaruh tidak langsung lebih besar dibandingkan pengaruh langsung. Hasil analisis jalur menunjukkan bahwa reputasi perusahaan efektif melalui jalur langsung, karena hasil pengaruh langsung lebih besar dibandingkan pengaruh tidak langsung.

Saran, Berdasarkan hasil penelitian disarankan bahwa membangun kepuasan pelanggan dapat dilihat dari aspek mutu pelayanan, yang membedakan pelayanan sebuah perusahaan adalah menyediakan secara konsisten pelayanan yang lebih tinggi dari kompetitornya. Kuncinya adalah

memenuhi harapan-harapan konsumen tentang kualitas pelayanan yang diinginkan. Harapan-harapan konsumen dibentuk dari pengalaman konsumen melakukan pembelian di waktu lalu, saran dari teman atau kelompok sejawat, maupun janji-janji yang diberikan perusahaan maupun kompetitornya yang disebut dengan reputasi yang baik. Upaya meningkatkan kepuasan dan loyalitas nasabah bagi PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen perlu dilakukan, misalnya dengan cara : Memberikan pelayanan yang lebih baik, misalnya keramahan, tanggap terhadap masalah, tepat dalam memberikan solusi dan kecepatan melayani nasabah. Biaya di PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen lebih murah dibandingkan perbankan lainnya, misalnya adanya bunga pinjaman yang rendah dan tingkat Bunga yang tinggi pada simpanan. Meningkatkan kompetensi perusahaan terhadap core bussinnesnya, yaitu dapat dilakukan dengan cara adanya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten. Meningkatkan keunggulan perusahaan dibandingkan dengan kompetitornya, misalnya adanya keunggulan dengan hadiah-hadiah besar seperti mobil, sepeda motor, dll yang ditawarkan bagi nasabah yang selalu aktif menggunakan jasa PD. BPR BKK Karangmalang Kabupaten Sragen..

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, (2001). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek Edisi ketiga*.
- Atika Dan Ketut, (2013). *Pengaruh Kualitas Layanan Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Garuda Indonesia Di Denpasar*. *Jurnal Manajemen, Strategi Bisnis, Dan Kewirausahaan* Vol. 7, No. 20 1, Februari 2013.
- Basuki dan Endang, (2014). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Hubungan Pelanggan Dan Citra Perusahaan Terhadap Loyalitas Melalui Kepuasan Nasabah*. *ADVANCE Edisi Pebruari 2014 Vol 1. No. 2 ISSN : 2337 -5221*.
- Bolton, Ruth N and james H. Drew, (2001), “ A Multi Stage Model of Customers Assessment of Service Quality and Value”, *Journal of Consumer Research*, Januari, 1-9.
- Brown, Stephen W., (2001), “A Multi Stage Model of Customers Assesment of Service Quality and Value”, *Journal of Marketing*, April, pp. 92-98.
- Fornell, Claes; Johnson, Michael D ; Anderson, Eugene W ; Cha, Jaesun; Bryant, Barbara Everitt (2006), “The American Customer Satisfaction Index : Nature, Purpose, and Findings”. *Journal of Marketing*, 60 (10). (7 – 18).
- Ikawati, reni, (2011). *Pengaruh Reputasi Perusahaan Dan Kepercayaan Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna ATM Pasca Isu CYBERCRIME (Studi Pada Nasabah BCA Di Purworejo)*. *Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Purworejo*.
- Kertajaya, hermawan, (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi, Bagaimana Meneliti dan Menulis Tesis?* Jakarta. Erlangga.

- Kotler, Philip dan A.B Susanto. (2001). *Manajemen Pemasaran di Indonesia*. Jakarta. Salemba Empat.
- Kotler, Philip.(2003), *Marketing Management*, 11th ed. Upper Saddle River, New Jersey : Prentice Hall, Inc.
- Liu, Tsung-Chi and Li Wei Wu (2007), “Customer retention and cross-buying in the banking industry : An Integration of service attributes, satisfaction and trust” *Journal of Financial Service Marketing*, Vol.12 No.2 p.132-145.
- Lupiyoadi, Hamdani. (2006). *Manajemen Pemasaran Jasa*, Edisi Kedua. Jakarta : Penerbit Salemba Empat.
- Margaretha M, (2004), “Study Mengenai Loyalitas Pasien Pada Divisi Asuransi Kumpulan AJB Bumi Putera 1912 (Studi khusus di Jawa Tengah)”, *Jurnal Sains Pemasaran Indonesia*, Vol III, No.3, Desember 2004. (289-308).
- Oliver, Richard L. (2007), “ Satisfaction : A Behavioral Perspective on the Customer”, McGraw-Hill, New York, NY.
- Onditi, (2012). *Implications Of Service Quality On Customer Loyalty In The Banking Sector. A Survey Of Banks In Homabay County, Kenya*. *International Journal Of Business And Social Science*. Vol. 3 No. 21; November 2012.
- Parasuraman, A., Zeithaml, Valarie. A., and Berry, Leonard L. (2005). *A Conceptual Model of Service Quality and Its Implications for Future Research*. *Journal of Marketing* (pre-1986), Vol. 49, pp. 41- 50.7.
- Rosidah, Chikmiatur. *The Influence of Corporate Reputation and Trust To Consumer Loyalty of ATM Users After Cybercrime Issues (Study at BCA Consumers in Surabaya)*. *Jurnal Business and Economics*, 21 Mei 2011.
- Samraz Dan Bakhtiar, (2012). *The Impact Of Service Quality, Customer Satisfaction And Loyalty Programs On Customer’s Loyalty: Evidence From Banking Sector Of Pakistan*. *International Journal Of Business And Social Science*. Vol. 3 No. 16 [Special Issue – August 2012].
- Selnes, (1993). *An examination of the effect of product performance on brand reputation, satisfaction and loyalty*. *European Journal of Marketing* 27.9 (1993): 19.
- Selvi, Srikandi Dan Andriyani, (2013). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Pelanggan, Citra Perusahaan Dan Loyalitas Pelanggan Survei Padatamu Pelanggan Yang Menginap Di Hotel Pelangi Malang*. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB) | Vol. 6 No. 2 Desember 2013*.
- Solomon, Michael (2006), *Consumer Behavior*, 3th edition, McGraw Hill.

- Sugiyono, (2001). Metodologi Penelitian Bisnis, Cetakan Keenam, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sulistriani, Endang. (2008), pengaruh Economic, Resource dan Social Conten Terhadap Kepercayaan, Kepuasan dan Komitmen Nasabah serta Terhadap Relatinship Intention (Universitas Airlangga).
- Tjiptono, Fandi, (2009), Prinsip-prinsip Total Quality Service (TQS) , Andi Offset, Yogyakarta.
- Utami, (2006). Analisis Pengaruh Kualitas Pelayanan Dalam Kaitannya Dengan Loyalitas Pasien Rawat Inap Di Rumah Sakit Negeri. Tesis. Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, Medan.
- Zeithaml, Valarie A. Mry Jo Bitner. (2008). Services Marketing: Integrating Customer Focus Across The Firm, Second Edition Hill. . New York: McGraw.

## **WASTE UTILIZATION OF RENEWABLE ENERGY SOURCES KNOW TO BE USEFUL ( BIOGAS )**

Noor Azis<sup>1</sup>  
Masruki Kabib<sup>2</sup>  
Dwi Soegiarto<sup>3</sup>

**Abstract: Waste Utilization of Renewable Energy Sources Know to be Useful (Biogas).** *The existence of the business know as processing and distribution know has a role and functions in supporting and success of development programs in the food sector . At first processed products 100 tons per year . The process of cooking out using 3 processed kitchen , businesses know has a very disturbing side effects, especially community wastewater Problems faced by partners are : Disposal of waste that cause odor . Expected diversification of product processing , among others, biogas and organic fertilizer can improve the economic conditions and the partners can address the problem of environmental pollution . Water is widely used as a wash and boil soy for the production process . As a result of the amount of water consumption in the process of making tahu and tempe, the waste generated is also quite large In utilizing liquid waste into renewable sources of energy ( biogas ) performed by the method of making bio-gas is pressurized tank 2 pieces and biogas digester was ready at the beginning of the study . During the installation of pressure vessel manufacturing activity takes place , the optimization and improvement of production of bio- gas system . Substances to be used in the purification is liquid and solid . Liquids such as NaOH , KOH , Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> , while for purification using solid phase is NaOH, natural and synthetic zeolites . Bioprocess biogas production through the use of waste out as samples , can reduce the impact of environmental pollution from industrial wastes out. In addition, biogas production from waste out in addition to creating alternative energy, also can generate more income for people who want pursue.*

**Abstrak: Pemanfaatan Limbah Sumber Energi Terbarukan Tahu Menjadi Berguna (Biogas).** Keberadaan bisnis kenal sebagai pengolahan dan distribusi tahu memiliki peran dan fungsi dalam mendukung dan mensukseskan program pembangunan di sektor pangan. Pada awalnya diproses produk 100 ton per tahun. Proses memasak menggunakan 3 dapur diproses, bisnis tahu memiliki efek samping yang sangat mengganggu, terutama air limbah masyarakat Permasalahan yang dihadapi oleh mitra adalah: Pembuangan limbah yang menyebabkan bau. diversifikasi diharapkan pengolahan produk, antara lain, biogas dan pupuk organik dapat meningkatkan ekonomi kondisi dan mitra dapat mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Air secara luas digunakan sebagai pencuci dan mendidih kedelai untuk proses produksi. Sebagai hasil dari jumlah air Konsumsi dalam proses pembuatan tahu dan tempe, limbah yang dihasilkan juga cukup besar Dalam memanfaatkan limbah cair ke sumber energi terbarukan (biogas) dilakukan dengan metode pembuatan bio-gas bertekanan tangki 2 buah dan biogas digester siap pada awal belajar . Selama instalasi aktivitas manufaktur tekanan pembuluh berlangsung, optimasi dan peningkatan produksi sistem gas bio. Bahan yang harus digunakan dalam pemurnian adalah cair dan padat. Cairan seperti NaOH, KOH, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, sedangkan untuk pemurnian menggunakan fasa

---

1 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, email: azisfeumk@yahoo.co.id

2 Dosen Fakultas Teknik, Universitas Muria Kudus, email: maskabib@yahoo.com

3 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muria Kudus, email: Dwi\_soegiarto@yahoo.com

padat adalah NaOH, zeolit alami dan sintetis. produksi biogas bioproses melalui penggunaan limbah sebagai sampel, dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari industry limbah keluar. Selain itu, produksi biogas dari limbah tahu selain untuk menciptakan energi alternatif, juga dapat menghasilkan lebih banyak pendapatan bagi orang yang ingin mengejar.

**Kata Kunci:** Tahu Industrial Hygiene, Cair dan Gas Limbah Bio

## PENDAHULUAN

Kudus merupakan kabupaten terkecil di Jawa Tengah dengan luas wilayah mencapai 42.516 Ha yang terbagi dalam 9 kecamatan. Kudus merupakan daerah industri dan perdagangan, dimana sektor ini mampu menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi yang besar terhadap PDRB. Bidang pangan juga ikut memberikan citra industri Kota Kudus, seperti tahu dan tempe. Dalam rangka mengantisipasi semakin memburuknya permasalahan energi di Indonesia, pemerintah telah merumuskan kebijakan strategis pengelolaan energi nasional melalui Peraturan Presiden Indonesia Nomor 5 Tahun 2006. Pada dasarnya, Pemerintah Indonesia telah membuat kebijakan energi nasional yang berprinsip pada kebijakan harga, konservasi energi dan diversifikasi energi. Diversifikasi energi adalah pemanfaatan energi alternatif, diantaranya adalah energi dari biomassa misalnya biogas.

Kabupaten Kudus mempunyai visi dan misi pembangunan daerah “menjadikan kabupaten Kudus pada tahun 2010 sebagai pusat ekonomi Jawa Tengah yang didukung oleh sektor pertanian, agroindustri dan industri kecil menengah serta adanya pelabuhan Juwana dalam rangka mewujudkan ekonomi daerah yang kuat yang ditandai dengan meningkatnya sumberdaya manusia, pelayanan umum dan pemberdayaan potensi ekonomi secara optimal menuju masyarakat yang sejahtera”. Dengan memiliki potensi industri yang kuat diharapkan memberikan kontribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Tahu dan tempe merupakan makanan yang digemari masyarakat, baik masyarakat golongan bawah hingga atas. Keberadaannya sudah lama dan diakui sebagai makanan yang sehat, bergizi dan harganya murah. Hampir di setiap kota di Indonesia dijumpai industri tahu dan tempe. Pada umumnya industri tahu dan tempe termasuk ke dalam industri kecil yang dikelola oleh rakyat dan beberapa di antaranya masuk dalam wadah Koperasi Pengusaha Tahu dan Tempe (KOPTI).

Satu pengolahan tahu yang terorganisasi dengan baik adalah UD Langgeng Joyo, yang berlokasi di Desa Papringan Kecamatan Kaliwungu Kudus. Usaha ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 2004 dengan karyawan 12 orang yang terdiri dari masyarakat sekitar. Pada awalnya mempunyai karyawan 8 orang dan sekarang telah berkembang menjadi 12 orang. Wilayah kerja UD Langgeng Joyo tersebar di Kota Kudus dan Kota Jepara. Keberadaan UD Langgeng Joyo sebagai pengolahan dan distribusi tahu mempunyai peran dan fungsi yang sangat besar dalam mendukung dan mensukseskan program pembangunan di sektor pangan. Pada awalnya produk olahannya 100 ton per tahun. Proses pemasakan tahu menggunakan 3 buah dapur olahan. Setelah berkembang dilaksanakan diversifikasi usaha pengolahan produk antara lain bio gas dan pupuk organik. Dalam proses pengolahan tahu kapasitas produksi mencapai 400 kilogram/hari. Kegiatan produksi dilakukan dengan memberdayakan tenaga kerja dari masyarakat setempat.

Pemasaran hasil produksi UD Langgeng Joyo meliputi daerah Jawa Tengah, yaitu Kudus dan Jepara. Pengembangan pemasaran masih terbuka luas hingga ekspor. Pembuangan limbah cair juga masih dilakukan dengan cara membuang ke sungai sehingga ketika kemarau sungai menjadi sangat bau. Limbah cair ini akan diolah menjadi gas bio dan pupuk organik

yang sangat bermanfaat bagi pertanian, dan meningkatkan pendapatan ke pengusaha mitra.

Tabel 1  
Nama dan Kondisi Mitra

No	Kegiatan	UD Langgeng Joyo	UD Sumber Rejeki
1	Nama Usaha, Bentuk Usaha	Langgeng Joyo, perorangan	Sumber Rejeki, perorangan
2	Spesifikasi Produk	Tahu	Tahu
3	Kapasitas Produksi & Efektif Produksi/hari	Kedelai 8 kwintal per hari	Kedelai 6,5 kwintal per hari
4	Inovasi Teknologi	Alat pembuat pupuk organik	Alat pembuat pupuk organik
5	Jumlah Karyawan	12 orang	10 orang
6	Akses Pembayaran	Modal sendiri	Modal sendiri
7	Laporan Keuangan (ada/tidak)	Tidak	Tidak
8	Mesin Peralatan Utama, Jumlah	Sumur Pengolahan 3 buah	Sumur pengolahan 4 buah

Sumber : Data Ibm Kelompok Usaha Makanan Kecil

Permasalahan yang dihadapi oleh mitra ialah: Pembuangan limbah cair yang menimbulkan bau. Diharapkan diversifikasi usaha pengolahan produk antara lain biogas dan pupuk organik bisa meningkatkan kondisi ekonomi mitra dan bisa mengatasi masalah pencemaran lingkungan. Air banyak digunakan sebagai bahan pencuci dan merebus kedelai untuk proses produksinya. Akibat dari besarnya pemakaian air pada proses pembuatan tahu dan tempe, limbah yang dihasilkan juga cukup besar. Pada saat ini sebagian besar industri tahu tempe masih merupakan industri kecil skala rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan unit pengolah air limbah, sedangkan industri tahu dan tempe yang dikelola koperasi beberapa diantaranya telah memiliki unit pengolah limbah. Unit pengolah limbah yang ada umumnya menggunakan sistem anaerobik dengan efisiensi pengolahan 60-90%. Dengan sistem pengolah limbah yang ada, maka limbah yang dibuang ke perairan kadar zat organiknya (BOD) masih terlampaui tinggi yakni sekitar 400 – 1 400 mg/l. Sebagai contoh limbah industri tahu tempe di Semanan, Jakarta Barat kandungan BOD 5 mencapai 1 324 mg/l, COD 6698 mg/l, NH 4 84,4 mg/l, nitrat 1,76 mg/l dan nitrit 0,17 mg/l (Prakarindo Buana, 1996). Jika ditinjau dari Kep-03/MENKLH/11/1991 tentang baku mutu limbah cair, maka industri tahu dan tempe memerlukan pengolahan lebih lanjut agar kandungan zat organik di dalam air limbah memenuhi standar air buangan yang boleh dibuang ke saluran umum.

Biogas dihasilkan oleh instalasi yang disebut sebagai biodigester berdasarkan prinsip digester anaerob. Dalam ruang digester terjadi proses penguraian oleh bakteri anaerob yang hasil akhir berupa beberapa gas lain dan material padat. Pada umumnya semua jenis bahan organik bisa diproses untuk menghasilkan biogas, namun demikian hanya bahan organik (padat dan cair) homogen seperti kotoran dan urine (air kencing) hewan ternak yang cocok untuk sistem biogas sederhana. Di samping itu juga sangat mungkin menyatukan saluran pembuangan di kamar mandi atau WC ke dalam sistem biogas.

Di daerah yang banyak industri pemrosesan makanan antara lain tahu, tempe, ikan pindang atau brem menyatukan saluran limbahnya ke dalam sistem biogas, sehingga limbah industri tersebut tidak mencemari lingkungan di sekitarnya. Hal ini memungkinkan karena limbah industri tersebut di atas berasal dari limbah organik yang homogen. Jenis bahan organik

yang diproses sangat mempengaruhi produktivitas sistem biogas disamping parameter-parameter lain seperti temperatur digester, pH, tekanan, dan kelembaban udara. Salah satu cara menentukan bahan organik yang sesuai untuk menjadi bahan masukan sistem biogas adalah dengan mengetahui perbandingan karbon (C) dan nitrogen (N) atau disebut ratio CIN. Beberapa percobaan yang telah dilakukan menunjukkan bahwa aktivitas metabolisme dari bakteri methanogenik akan optimal pada nilai ratio CIN sekitar 8.

Dari digester anaerobik akan didapatkan biogas dengan komponen penyusunnya adalah gas metana (50% -75%), karbon dioksida (25%-50%) (Dahl, A. 2003), dan beberapa gas lainnya dalam jumlah yang sangat kecil. Dari pembakaran tiap kilogram gas metana akan didapat energi sebesar 55 MJ. Sebagai pembandingan, pembakaran satu kilogram minyak tanah akan menghasilkan energi 46 MJ (Zahid et al, 2004)). Produksi energi terbarukan, pencegahan pencemaran lingkungan udara dan air, pengurangan jumlah limbah pertanian peternakan, dan pemanfaatan hasil samping digester sebagai pupuk merupakan beberapa faktor yang menjadikan teknologi ini semakin menarik untuk diterapkan.

Tabel 2.  
Komposisi biogas

Komponen	Satuan	Komposisi, % volume				
		1	2	3	4	5
Metana(CH4)	%Vol	55-75	50-75	55-70	40-70	50-60
Karbon dioksida(CO2)	%Vol	25-45	25-4	30-45	30-60	50-60
Nitrogen(N2)	%Vol	0-0,3	<2	0-2	-	-
Hidrogen(H2)	%Vol	1-5	<1	0	0-1	-
Hidrogen sulfida(H2S)	ppm	0-3	<2	<500	0-3	<100
Oksigen(O2)	ppm	0,1-0,5	<2	-	-	-

Sumber: 1. (Anonim, 2010 <http://www.kolumus.fi/suomen.biok.asukeskus/enJenperus.html>)  
2. Hambali, et al, (2007). 3. Monnet, 2003: 4.Muryanto, et al, 2006: 5. Pellerin Dan Walker, (1988)

Penggunaan biogas untuk pembangkitan panas merupakan cara pemanfaatan yang paling sederhana dan paling umum. Pembakaran biogas biasanya dilakukan dengan menggunakan burner baik untuk keperluan rumah tangga, memasak di dapur maupun pembangkitan steam! uap menggunakan boiler di industri. Namun demikian, penggunaan biogas secara langsung sebagai bahan bakar tanpa pemurnian terlebih dahulu akan mempunyai nilai kalor rendah karena adanya kandungan uap air dan gas karbon dioksida yang tinggi. Cara pengolahan yang paling sederhana adalah dengan memisahkan uap air yang mengembun (kondensat) di jaringan perpipaan. Setelah dilakukan pemisahan kondensat dan partikulat, biogas ditekan, didinginkan dan dihedrasi kemudian dialirkan melalui sistem perpipaan untuk digunakan sebagai bahan bakar. Bila menggunakan burner gas alam, akan diperlukan modifikasi sederhana karena kandungan kalornya rendah.

Manfaat Secara Ekonomis Pemanfaatan Biogas

1. Implementasi bahan bakar gas metana dari biogas ke masyarakat (UKM)
2. Pemanfaatan potensi energi alternatif melalui sistem integrasi dengan pemanfaatan energi di UKM
3. Memperkenalkan energi alternatif yang ramah lingkungan yang dapat mensubstitusi penggunaan energi yang sudah ada.
4. Pemberdayaan biogas melalui sistem penyimpan gas metana untuk lebih berdaya dan berhasil guna ke masyarakat

5. Termanfaatkannya sumber daya alam yang melimpah di Indonesia dan meningkatnya nilai fungsi dan tambah dari limbah cair produksi tahu
6. Didapatkannya bahan bakar biogas yang bersih
7. Substitusi ke bahan bakar minyak tanah, yaitu untuk menunjang kemandirian (energi alternatif)

Kelompok usaha tahu dijadikan sasaran kegiatan ini karena mitra sangat terdorong minatnya untuk memperbaiki lingkungan dan mengembangkan usaha. Kemampuan yang dimiliki mitra sangatlah memadai untuk memproduksi pupuk organik dan gas bio. Selain itu keberadaannya sangat potensial dalam hal penyerapan tenaga kerja bagi penduduk sekitar. Dari observasi yang telah dilakukan, ditemukan beberapa masalah yang dihadapi mitra yaitu: Pembuangan limbah cair yang langsung ke sungai yang menimbulkan bau yang tidak sedap ketika musim kemarau. Mitra belum menguasai pembuatan laporan keuangan, pembuatan pajak dan penguasaan manajerial produksi, serta manajerial pemasaran.

Tabel 3  
Jenis luaran yang akan dihasilkan berupa

No	Indikator kinerja	Metode pengukuran Tahun 2014
1	Pemanfaatan limbah untuk biogas dan pupuk	2 buah alat biogas dan pupuk
2	Pemahaman dan implementasi di bidang laporan keuangan manajemen keuangan, dan manajemen produksi serta manajemen pemasaran	2 buah laporan keuangan, Pelatihan pembuatan pajak, Pelatihan manajemen produksi serta pelatihan manajemen pemasaran.
3	Jumlah serapan tenaga kerja	Penambahan Karyawan dari 12 menjadi 14

## METODE PENELITIAN

Dalam memanfaatkan limbah cair menjadi sumber energi terbarukan (biogas) dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Diskusi dengan mitra tentang pengembangan instalasi pengolahan biogas dari limbah cair, solusi yang ditawarkan dengan penerapan teknologi yang sederhana. Mitra dikenalkan dengan teknologi pembuatan gas bio.
- b) Pengembangan instalasi bio gas dengan kemampuan mengolah limbah cair 2000 liter perhari dengan hasil biogas 10 liter.
- c) Pelatihan dengan mitra untuk pemakaian alat tersebut. Mitra dilatih agar dapat mengoperasikan dan merawat alat-alat yang telah diberikan, untuk meningkatkan nilai ekonomis dari limbah tahu
- d) Membuat pengolahan limbah cair menjadi gas bio.

Metode pembuatan gas bio yaitu tangki bertekanan 2 buah dan digester biogas yang sudah siap pada awal penelitian. Selama kegiatan pembuatan instalasi tangki bertekanan berlangsung, dilakukan optimasi dan penyempurnaan sistem produksi bio gas. Zat yang akan digunakan dalam pemurnian adalah cair dan padat. Cairan berupa NaOH, KOH, Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub>, sedangkan untuk pemurnian menggunakan fasa padat adalah NaOH, zeolit alam dan sintesis. Setelah instalasi tangki bertekanan pada biogas di UKM Tahu selesai dibuat, tahapan kedua adalah melakukan produksi biogas secara terpadu, biogas dialirkan rata-rata, 1 m<sup>3</sup> / detik, kadar metana 55% (v/v) dan ditekan ke tangki 200l sampai pada tekanan 1,5 kg / m<sup>2</sup> dan dikontakan dengan adsorben cair dan adsorben pada di dalam tabung *scrubber*. Sampel gas dianalisa menggunakan alat orsat untuk mengetahui efektifitas sistem pemurnian.

Parameter kemurnian gas metana adalah tekanan biogas dan waktu pembakaran untuk mendapatkan kemurnian gas metana optimum dengan proses adsorpsi dan absorpsi. Tekanan biogas dari digester dalam disain penelitian dibagi 3 masing - masing :  $4,5 \times 10^2$  ;  $6,0 \times 10^2$  dan  $7,0 \times 10^2$  em kolom H<sub>2</sub>O. Waktu pembakaran masing -masing 1 dan 2 jam. Biogas hasil pemumian di tekan untuk di masukan ke tangki penyimpanan, volume 400 liter, kadar metana (88,41 -88,94 ) % (v/v) dengan tekanan sampai 500 mBar dan akan digunakan sebagai bahan bakar untuk mendidihkan air , membuat uap dan menggoreng tahu dan generator listrik kapasitas 3000 Watt., sedangkan listrik akan digunakan sebagai penerangan dan pompa air untuk kebutuhan proses tahu.

Sistem penyimpanan biogas tersebut diharapkan dapat menjadi sistem hybrid energi yang dapat mengurangi kebutuhan energi dari luar sistem yang bisa ditambahkan dalam proses pembuatan tahu tersebut. Mitra perlu dilatih agar menguasai pembuatan laporan keuangan, pembuatan pajak dan penguasaan manajerial produksi, serta manajerial pemasaran.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Khalayak sasaran antara yang strategis Satu pengolahan tahu yang terorganisasi dengan baik adalah UD Langgeng Joyo dan UD Sumber Rejeki, yang berlokasi di Desa Papringan Kecamatan

Kaliwungu Kudus. Usaha ini didirikan pada tanggal 28 Agustus 2004 dengan karyawan 12 orang yang terdiri dari masyarakat sekitar. Pada awalnya mempunyai karyawan 8 orang dan sekarang telah berkembang menjadi 12 orang. Wilayah pemasaran produk tahu UD Langgeng Joyo tersebar di Kota Kudus dan Kota Jepara.

Pelaksanaan kegiatan Kegiatan ini tindak lanjut dari Program Dinas Perindustrian dan Koperasi Kudus untuk membuat pabrik tahu bersih dan higienis. Disamping merupakan bentuk pembinaan dari LPM UMK. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan untuk membantu memecahkan permasalahan yang di hadapi mitra UD langgeng Joyo dan dan UD Sumber Rejeki. Adapun pelaksanaan kegiatan sebagai berikut:

1) Observasi tempat produksi dan pengelolaan limbah. Kegiatan ini dilakukan untuk memotret kondisi

sebenarnya UD langgeng Joyo dan dan UD Sumber Rejeki dalam melaksanakan proses produksi tahu dan tingkat kebersihan dan higienitas selama kegiatanberlangsung. Kegiatan pemeriksaan dilaksanakan tanggal 5 – 10 Juni Pemeriksaan dilakukan terhadap :

- a. Kondisi tempat penggilingan
- b. Kondisi tempat memasak
- c. Kondisi penampungan air
- d. Kondisi tempat mencetak tahu
- e. Kondisi penampungan limbah cair
- f. kondisi selokan air

2. Perawatan kebersihan tempat produksi Kegiatan ini dilakukan untuk meningkatkan kebersihan tempat dan peralatan produksi, sehingga tempat produksi tahu lebih higienis. Kegiatan dilakukan tanggal : 15 – 18 Juni 2014

Kegiatan perawatan kebersihan meliputi :

- a. Kebersihan tungku memasak
- b. Kebersihan mesin penggilingan kedelai
- c. Kebersihan alat pencetak tahu
- d. Kebersihan Alat memasak
- e. Kebersihan tempat tahu

3. Pelatihan penanganan limbah produksi tahu Kegiatan ini dimaksudkan untuk memberikan ketrampilan dalam mengolah limbah tahu agar tidak mencemari lingkungan. Kegiatan dilakukan tanggal 24-26 Juni 2014, dengan materi ;

- 1. Kandungan zat di limbah
- 2. Pemanfaatan limbah tahu untuk biogas
- 3. Desain instalasi biogas
- 4. Evaluasi kegiatan pendampingan

Kegiatan ini dimaksudkan memonitor penanganan kebersihan dan pengelolaan limbah produksi tahu. Kegiatan dilaksanakan tanggal 27 September – 1 Oktober 2012.

Hasil dari kegiatan pelatihan dan pendampingan di UD Langgeng Joyo dan UD Sumber Rejeki adalah sebagai berikut :

Peningkatan kebersihan lantai kerja.

Gambar 1. Kebersitahan lantai kerja



Peningkatan kebersihan tempat pencucian kedelai

Gambar 2. Kebersihan tempat pencucian kedelai



Peningkatan kebersihan peralatan penggilingan kedelai.

Gambar 3. Kebersihan tempat penggilingan kedelai



Peningkatan kebersihan tempat memasak

Gambar 4. Kebersihan tempat memasak



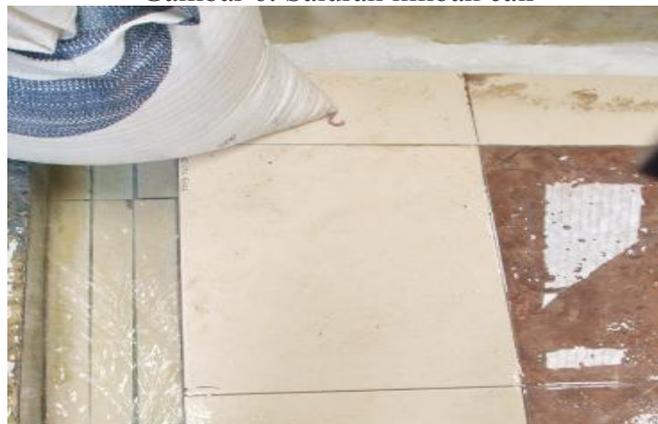
Peningkatan kebersihan tempat mencetak tahu

Gambar 5. Kebersihan tempat mencetak tahu



Peningkatan pengolahan limbah cair

Gambar 6. Saluran limbah cair



Dalam hal pembuatan biogas maka udara sama sekali tidak diperlukan dalam bejana pembuat. Keberadaan udara menyebabkan gas  $CH_4$  tidak akan terbentuk. Untuk itu maka bejana pembuat biogas harus dalam keadaan tertutup rapat.

a. Tahap Awal; 1) Pembelian peralatan 2) Pembelian bahan

b. Tahap Pelaksanaan; Alat; Bak pengisi, Bak digester, Tabung pengontrol gas, Bak enampung gas, Pipa penyalur gas, Bak output digester. Bahan; Limbah cair tahu, Kelat besi, Larutan NaOH.

Cara kerja :

1. Pengambilan sampel Pengambilan sampel dilakukan dengan cara mengambil langsung dari limbah industri pengolahan tahu. Kita hanya membutuhkan limbah cairnya saja, bukan limbah padatnya



2. Proses pembuatan sampel menjadi biogas di dalam digester

a. Saluran masuk slurry ( air limbah/ kotoran segar ) Saluran ini digunakan untuk memasukkan slurry kedalam reaktor utama. Pencampuran ini berfungsi untuk memaksimalkan potensi biogas, memudahkan pengaliran, serta menghindari terbentuknya endapan pada saluran masuk.



b. Saluran keluar residu Saluran ini digunakan untuk mengeluarkan kotoran yang telah difermentasi oleh bakteri. Saluran ini bekerja berdasarkan prinsip kesetimbangan tekanan hidrostatik. Residu yang keluar pertama kali merupakan *slurry* masukan yang pertama setelah waktu retensi tertentu ( 20 – 30 hari ).



c. Katup pengaman tekanan ( control valve) Katup pengaman ini digunakan sebagai pengatur tekanan gas dalam reaktor biogas. Katup pengaman ini menggunakan prinsip pipa T. Bila tekanan gas dalam saluran gas lebih tinggi dari kolom air, maka gas akan keluar melalui pipa T, sehingga tekanan dalam reaktor biogas akan turun.



d. Saluran Gas Saluran gas ini disarankan terbuat dari bahan polimer atau plastik seperti pipa paralon untuk menghindari korosi. Ujung saluran pipa bisa disambung dengan pipa baja anti karat untuk bagian pembakaran gas.



e. Tangki Penyimpanan Gas, Terdapat dua jenis tangki penyimpanan gas, yaitu sumur pencerna bersatu dengan tangki pengumpul gas (*floating dome*) dan terpisah dengan pengumpul gas (*fixed dome*). Untuk tangki terpisah, konstruksi dibuat khusus sehingga tidak bocor dan tekanan yang terdapat dalam tangki seragam, serta dilengkapi H<sub>2</sub>S *removal* untuk mencegah korosi.



3. Proses fermentasi an-aerobik. Pada digester terjadi proses fermentasi an-aerob. Proses fermentasi anaerobik untuk menghasilkan biogas berlangsung selama 8-10 hari. Dan dalam proses fermentasi an-aerobik ini terjadi dalam 3 tahap secara berantai, yaitu:

a. Hidrolisis, pada tahap ini terjadi penguraian bahan-bahan organik mudah larut dan pencernaan bahan organik yang komplek menjadi sederhana, perubahan struktur bentuk polimer menjadi bentuk monomer.

b. Pengasaman, pada tahap pengasaman komponen monomer (gula sederhana) yang terbentuk pada tahap hidrolisis akan menjadi bahan makanan bagi bakteri pembentuk asam. Produk akhir dari perombakan gula-gula sederhana ini yaitu asam asetat, propionat, format, laktat, alkohol, dan sedikit butirir, gas karbondioksida, hidrogen dan ammonia. Metanogenik, pada tahap metanogenik terjadi proses pembentukan gas metan. Bakteri pereduksi sulfat juga terdapat dalam proses ini, yaitu mereduksi sulfat dan komponen sulfur lainnya menjadi hidrogen sulfida.

4. Pemurnian biogas Teknologi pemisahan yang digunakan untuk pemurnian biogas tergantung kepada komposisi biogas dan tujuan penggunaannya (Monnet, F., 2003). Tujuan penggunaan biogas biasanya mensyaratkan standar komposisi tertentu sehingga diperlukan pemurnian bahan baku agar memenuhi spesifikasi yang ditetapkan. Sebagai contoh, agar memiliki nilai kalor tinggi dapat dilakukan dengan memisahkan kandungan gas karbon dioksida dan hidrogen sulfidanya.

- Penambahan NaOH secara kontinu ke dalam reaktor. Penambahan larutan NaOH secara terus menerus ke dalam reaktor dimaksud untuk mengurangi kadar CO<sub>2</sub>, NaOH mengabsorb CO<sub>2</sub> sehingga perbandingan CO<sub>2</sub> dan NH<sub>4</sub> dalam biogas menjadi lebih tinggi NH<sub>4</sub>.

- Absorpsi H<sub>2</sub>S



Sebagaimana diketahui bahwa H<sub>2</sub>S merupakan salah satu polutan dalam gas H<sub>2</sub>S. Usaha mengurangi kandungan H<sub>2</sub>S sama artinya dengan meningkatkan kemurnian biogas. Absorpsi H<sub>2</sub>S dilakukan dengan proses kimia yaitu dengan mengabsorpsi H<sub>2</sub>S menggunakan kelat besi. Cara ini dianggap efisien mereduksi H<sub>2</sub>S dari biogas karena kemampuan yang tinggi dari kelat besi dalam mengabsorpsi H<sub>2</sub>S sehingga pemakaian bahan kimia tidak banyak. Sifat kelat besi yang pseudo katalis menyebabkan kelat besi dapat dipakai berulang – ulang sehingga menghemat biaya pemurnian H<sub>2</sub>S.

Hasil Yang Dicapai. Pengelolaan limbah tahun ini memberikan hasil antara lain:

1. Berkurangnya tingkat pencemaran lingkungan akibat limbah tahu bagi masyarakat sekitar.
2. Dihasilkannya biogas sebagai bahan bakar alternatif untuk keperluan memasak.
3. Penataan lingkungan sekitar IKM menjadikan tidak lagi kumuh sehingga meningkatkan tingkat kesehatan dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar.
4. Proses ini mampu mengurangi penggunaan kayu bakar, minyak tanah, maupun LPG sehingga dapat mengurangi emisi GRK yang dihasilkan.
5. Dengan inovasi bidang pemanfaatan limbah menjadi energi yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat otomatis dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemerintah daerah mengingat terjadi penghematan terhadap konsumsi bahan bakar untuk kebutuhan energinya.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan pada percobaan kali dapat disimpulkan bahwa pembuatan biogas melalui bioproses yang menggunakan limbah tahu sebagai sampel, dapat mengurangi dampak pencemaran lingkungan dari limbah industri tahu. Selain itu juga pembuatan biogas dari limbah tahu selain dapat menciptakan energi alternative, juga dapat menghasilkan pendapatan yang lebih bagi orang yang mau menggelutinya. Saran pada pelaksanaan Iptek Bagi Masyarakat ini masih terbatas hanya pada dua industri tahu dan diharapkan dapat di sosialisasikan dan di informasikan kepada masyarakat yang lebih luas lagi yaitu khususnya industri tahu yang selama ini tidak pernah memanfaatkan limbah cir tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Boyd, C.E. (1990). *Water Quality in ponds foraquaculture*. Alabama: Auburn University, hlm. 482.
- Darsono,V. (2007). *Pengolahan Limbah cair Tahu Secara Anaerob dan Aerob, Jurnal Teknologi Industri*, Vol. 9 No.1, hlm. 9-19.
- Hariyadi Sigid. (2004). *BOD dan COD sebagai Parameter Pencemaran Air dan Baku Mutu Air Limbah*. Bogor: Institut Pertanian Bogor.
- <http://onlinebuku.com/2009/01/15/limbahtahu-cair-menjadi-biogas/> (31 Agustus 2010)
- Oesman Raliby, Retno Rusdjijati, Imron Rosyidi. *Pengolahan Limbah Cair Tahu Menjadi Biogas Sebagai Bahan Bakar Alternatif Pada Industri Pengolahan Tahu*.
- Pambudi, N. Agung. "Biogas sebagai Energi Alternatif". <http://www.dikti.org/?q=node/99> (30 Agustus 2010).
- Sri Harti, Takiyah Salim, Sukirno. (2004). *Teknologi Penanganan Limbah Cair Tahu*. Subang:
- UPT Balai Pengembangan Teknologi Tepat Macklin, Boy. *Limbah Tahu Cair Menjadi Biogas*.

## OPTIMALISASI PEMANFAATAN ASET TERMINAL KARTASURA SEBAGAI SUMBER PENDAPATAN ASLI DAERAH KAB. SUKOHARJO

Triyanto<sup>1</sup>  
Betty Eliya Rokhmah<sup>2</sup>  
Ahmad Sidiq<sup>3</sup>

**Abstract:** *Optimizing asset utilization as a Source Terminal Kartasura Local Revenue District Sukoharjo. Kartasura Terminal is a terminal located in Sukoharjo, Central Java. Until now, the use of the terminal is not yet optimal, it is seen from Terminal state in terms of both infrastructure and use of which has not been maximized by all parties concerned. Therefore in this study will examine the contribution of Terminal Kartasura to PAD Sukoharjo district, an opportunity to raise donations Terminal as well as how to enhance the contribution of the Kartasura Terminal. The results showed that the timeframe of 2013 to 2015 Terminal revenue has not contributed significantly to revenue Sukoharjo district. Opportunities to improve donation Terminal can be improved in terms of budget, location, amenities, and law enforcement. Thus in order to enhance the contribution to the PAD Kartasura Terminal Sukoharjo the need for reforms to these opportunities.*

**Abstrak:** **Optimalisasi Pemanfaatan Aset Terminal Kartasura Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.** Terminal Kartasura merupakan Terminal yang terletak di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Hingga saat ini pemanfaatan dari Terminal ini belumlah optimal, hal ini terlihat dari keadaan Terminal baik dari segi sarana dan prasarana serta penggunaannya yang belum dimaksimalkan oleh seluruh pihak terkait. Oleh karena itu dalam penelitian ini akan meneliti tentang sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo, peluang untuk meningkatkan sumbangan Terminal serta bagaimana cara untuk meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari rentang waktu tahun 2013 hingga 2015 pendapatan Terminal belum memberikan kontribusi yang signifikan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Peluang untuk meningkatkan sumbangan Terminal bisa ditingkatkan dari segi anggaran, lokasi, fasilitas, serta penegakan hukum. Dengan demikian agar dapat meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo maka perlu pembenahan untuk peluang-peluang tersebut.

**Kata Kunci:** optimalisasi terminal, Terminal Kartasura, PAD Kabupaten Sukoharjo, peluang Terminal Kartasura, Sumbangan Terminal Kartasura.

---

1 Dosen STIE Atma Bhakti Surakarta

2 Dosen STIE Atma Bhakti Surakarta

3 Dosen STIE Atma Bhakti Surakarta

## PENDAHULUAN

Aset daerah merupakan sumberdaya penting bagi pemerintah daerah sebagai penopang utama pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk dapat mengelola aset secara memadai dan akurat. Dalam hal pengelolaan aset, pemerintah daerah harus menggunakan pertimbangan aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penerimaan, penyimpanan dan penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan atau penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan tuntutan ganti rugi agar aset daerah mampu memberikan kontribusi optimal bagi pemerintah daerah yang bersangkutan (Hartoyo, 2014).

Ada beberapa isu penting terkait aset daerah, yaitu perencanaan dan penganggaran, pengadaan, pemeliharaan, serta penghapusan (Sukry, 2009). Terkait isu perencanaan dan penganggaran, pada praktiknya, di daerah sering dianggarkan sesuatu yang tidak dibutuhkan, sedangkan yang dibutuhkan tidak dianggarkan. Hal ini bisa terjadi karena adanya kepentingan-kepentingan tertentu, seperti rente, yang diterima oleh aparatur daerah sebelum pengadaan barang dilaksanakan. Di sebuah daerah, ketika kami diminta menyusun APBD-nya, ternyata ada beberapa aset yang sudah diterima dan dipakai, padahal dianggarkan saja belum. Pihak supplier (pihak ketiga) biasanya cuma bilang: ambil saja dulu, masalah pembayaran kan bisa diatur dalam APBD.

Selanjutnya adalah isu pengadaan, tahapan ini paling sulit. Selain rawan dengan praktik korupsi, “ancaman” menjadi tersangka (lalu menjadi terpidana) cukup besar. Oleh karena itu, masalah yang paling sering muncul adalah: mekanisme pengadaannya penunjukan langsung, pemilihan langsung, atau tender bebas? Yang unik, banyak aparatur daerah yang tidak mau menjadi panitia pengadaan karena takut terjerat kasus korupsi. Akibatnya, jikapun ikut ujian sertifikasi (sebagai syarat menjadi panitia pengadaan barang dan jasa sesuai Keppres No.80/2003), umumnya sengaja tidak meluluskan diri. Artinya, mendingan tidak lulus daripada menjadi panitia lelang.

Isu yang ketiga adalah pemeliharaan. Setiap pemeliharaan terkait dengan anggaran untuk pemeliharaan. Belanja pemeliharaan ternyata salah satu objek belanja yang paling sering difiktifkan pertanggungjawabannya. Jika dicermati dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA), atau dalam Perhitungan APBD, biasanya anggaran belanja pemeliharaan terealisasi 100%. Habis tak bersisa. Yang menarik, berdasarkan penelitian di negara-negara berkembang, terutama di Afrika dan Amerika Latin (IMF, 2007; World Bank, 2008) fenomena ghost expenditures merupakan hal yang biasa. Artinya, alokasi untuk pemeliharaan selalu dianggarkan secara incremental meskipun banyak aset yang sudah tidak berfungsi atau hilang. Hal ini terjadi karena tidak adanya transparansi dalam penghapusan dan pemindahtanganan aset-aset pemerintah.

Terakhir adalah penghapusan. Penghapusan aset bermakna tidak ada lagi nilai suatu aset yang akan dicantumkan di neraca. Penghapusan dari buku besar dilakukan setelah kepemilikan aset tersebut tidak lagi di daerah, tetapi di pihak lain atau dimusnahkan atau dibuang. Dalam persepektif akuntansi, penghapusan dilakukan dengan cara membuat jurnal, misalnya: mendebit rekening Ekuitas Dana-Diinvestasikan dalam Aset Tetap dan mengkredit Aset Tetap.

Terminal sebagai prasarana transportasi jalan dalam menjalankan fungsinya sebagai tempat keperluan menaikkan dan menurunkan orang atau barang, tempat beristirahat bagi awak bus dan kendaraan sebelum memulai lagi perjalanan, serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan wujud simpul jaringan transportasi (UU No. 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) harus dapat bekerja secara optimal

dan efisien, sehingga dapat mendukung mobilitas penduduk, ketertiban lalu lintas, disamping itu Terminal juga berfungsi sebagai sarana penunjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor redistribusi. Untuk memenuhi tugas tersebut maka Terminal harus efektif agar dapat memenuhi tuntutan pelayanan yang sebaik-baiknya, dimana pelayanan ini menyangkut pandangan pihak-pihak yang terkait yaitu pihak pengelola Terminal dalam hal ini pemerintah (regulator) dan pihak pengguna jasa layanan (operator dan User).

Kartasura merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, karena letaknya yang berada di kawasan jalur Jogja, Solo, Semarang (joglosemar) dan menuju kota-kota besar di Jawa, maka menjadikan Kartasura memiliki lalu lintas transportasi lebih padat dibandingkan kecamatan-kecamatan lain di Kabupaten Sukoharjo. Tingkat kepadatan arus lalu lintas yang ada, membuat dinas terkait harus melakukan tindakan-tindakan yang dapat mengurai tingkat kepadatan tersebut. Terminal Kartasura merupakan salah satu aset yang dibangun pemerintah Kabupaten Sukoharjo melalui beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN), maka keberadaan Terminal Kartasura merupakan aset Daerah Sukoharjo. Aset-aset yang dibangun di Terminal Kartasura diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai sumber pendapatan pada APBD Kab. Sukoharjo, namun kenyataan banyak aset-aset yang sampai sekarang menganggur dan tidak terurus.

Banyak pihak yang mengeluhkan pengoperasian Terminal Kartasura. Meskipun Terminal ini sudah beroperasi selama bertahun-tahun, sebagian besar bus enggan masuk ke dalam Terminal Kartasura, sehingga menjadikan Terminal ini sepi. Hal ini berimbas terhadap sepi penumpang serta banyak pedagang yang menutup kiosnya dikarenakan mereka justru merugi bila tetap membuka kiosnya (Iskandar, 2012).

Permasalahan dalam optimalisasi Terminal Kartasura Sebagai sumber PAD Kab. Sukoharjo, sebagai berikut: Berapakah sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo? Apakah sumbangan Terminal Kartasura dapat ditingkatkan terhadap PAD Kab. Sukoharjo? Bagaimana cara meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo

Tujuan Penelitian optimalisasi Terminal Kartasura Sebagai sumber PAD Kab. Sukoharjo, sebagai berikut: Untuk mengetahui sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo Untuk mengetahui peningkatan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo Untuk mengetahui cara meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat : Memberikan manfaat dalam mengetahui sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo. Memberikan manfaat dalam mengetahui potensi mengetahui peningkatan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo. Memberikan manfaat dalam mengetahui cara meningkatkan sumbangan terminal Kartasura terhadap PAD Kab. Sukoharjo. Memberikan manfaat dalam mendapatkan masukan yang komprehensif dari berbagai perspektif melalui penelitian yang mendalam terkait upaya optimalisasi Terminal Kartasura dalam meningkatkan sumbangan terhadap PAD Kab. Sukoharjo. Dalam pelaksanaan otonomi, dituntut kemampuan daerah dalam memanfaatkan semua potensi yang ada di daerah dalam rangka melaksanakan pemerintahannya. Salah satunya adalah penerimaan penerimaan dari pendapatan asli daerah (PAD). Untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) maka pemerintah daerah harus berusaha menggali semua sumber-sumber pendapatan daerah yang lain, salah satunya Retribusi terminal (Asis, 2013).

Transportasi pada saat ini menjadi suatu kebutuhan bagi manusia baik kebutuhan individu maupun kebutuhan kelompok. Sehingga peningkatan akan transportasi sangat tinggi pada setiap kota, terutama transportasi darat. Sistem pengangkutan atau transportasi harus di tata terus menerus dan di sempurnakan untuk menjamin mobilitas orang maupun barang dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat (Hazri dan Khairani, 2009).

Sebagai fasilitas umum, terminal harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya angkutan massal, Dinas Perhubungan dalam hal ini UPTD Terminal selalu berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik, mulai dari penyediaan ruang tunggu yang nyaman, pengaturan tempat pemberangkatan bis sesuai dengan tujuan sampai dengan penertiban bis yang masuk ke terminal. Hal ini dilakukan semata-mata untuk memberikan pelayanan yang maksimal bagi masyarakat dan menerapkan sistem manajemen terminal yang baik, sehingga nantinya dapat diharapkan memberikan kontribusi yang maksimal terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah) tanpa mengesampingkan pelayanan kepada masyarakat (Sushernawan et al, 2014).

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Pendekatan kualitatif sebagai unsur utama yang bersifat deskriptif analitis. Yakni satu model penelitian yang dimaksud membuat analisis terhadap gambaran (deskriptif) mengenai data-data informasi, kejadian-kejadian secara sistematis, faktual dan akurat. Analisis kuantitatif lebih berkenaan dengan kegiatan analisis data bersifat statistik, yaitu untuk mengetahui sumbangan Terminal Kartasura terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Penelitian ini menggunakan sumber data :

Data primer ; Yaitu data yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui wawancara dengan responden. Yakni sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha/investor, aktivis LSM/ormas, Pemerintah Kec. Kartasura, Pemerintah Kab. Sukoharjo dan DPRD.

Data sekunder ; Sumber data ini berasal dari literatur berupa buku-buku, laporan, dokumen-dokumen, hasil penelitian peneliti lain, serta sumber lain termasuk studi media yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian yang diangkat.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa : Wawancara Mendalam (indepth interview). Teknik ini digunakan peneliti untuk dapat mendapatkan informasi, serta memahami makna yang lebih dalam dari hasil analisa observasi maupun data yang telah diperoleh melalui informan yang telah ditentukan. Melalui wawancara mendalam tersebut akan dapat mengemukakan segala hal yang berhubungan dengan persoalan dalam penelitian ini.

Wawancara yang digunakan oleh peneliti menggunakan jenis pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara seperti yang diungkap Patton. Dimana jenis wawancara ini mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Demikian pula penggunaan dan pemilihan kata-kata untuk wawancara dalam hal-hal tertentu tidak perlu dilakukan sebelumnya. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup (Eriyanto, 2007). Wawancara ini dapat berkembang di lapangan sesuai dengan kebutuhan peneliti untuk menggali informasi lebih dalam. Wawancara dilakukan kepada sejumlah tokoh masyarakat, pengusaha/investor, aktivis LSM/ormas, Pemerintah Kab. Sukoharjo (Bagian Kerjasama, Dinas Pariwisata), anggota DPRD Kab. Sukoharjo dan Stakeholder terkait lainnya yang relevan dengan penelitian ini.

Salah satu teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan melakukan kajian peraturan perundang-undangan dan studi kepustakaan yaitu mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, jurnal politik, media cetak, serta tulisan-tulisan dan referensi lain yang relevan dengan penelitian ini. Dokumentasi, Yaitu berupa data yang diperoleh dari dokumen-dokumen aktual yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

Analisis data merupakan proses pengolahan data dengan mengorganisasikan dan mengurutkan dalam pola tertentu sehingga lebih mudah dimengerti dan dipahami. Dalam

penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif deskriptif analitis, yaitu informasi yang diperoleh baik secara lisan maupun tertulis diteliti dan dipelajari sebagai satu rangkaian utuh. Hal ini dilakukan pada kajian regulasi dan pola pemanfaat, kajian teknis dan kajian peruntukan terbaik property (HBU). Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan analisis data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut ; Menelaah seluruh data yang terkumpul, diawali dengan telaah yang seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber yaitu hasil wawancara, dokumen berupa laporan, artikel, buku-buku, maupun dari sumber lain.

Reduksi data, sebagai proses pemusatan perhatian dengan melakukan pemilihan dan penyederhanaan. Melakukan abstraksi dan transformasi data kasar yang telah terkumpul. Abstraksi sebagai usaha membuat rangkuman inti dari pernyataan-pernyataan yang perlu dijaga sehingga tetap berada didalamnya. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat menggolongkan, mengarahkan, dan mengorganisasikan data sehingga dapat diambil kesimpulan..

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk mengetahui berapa besar sumbangan Terminal Kartasura dilakukan pengumpulan data baik dari pihak Terminal maupun dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sukoharjo. Peneliti menggunakan batasan waktu dari tahun 2013 hingga tahun 2015. Besarnya target dan realisasi pendapatan Terminal Kartasura pada tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini.

TABEL 1  
DAFTAR TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI TERMINAL KARTASURA  
BULAN DESEMBER 2013  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI UNIT TERMINAL

NO	SUMBER PENERIMAAN	TARGET APBD	PENERIMAAN S/D
		TAHUN 2013 (Rp)	BULAN INI (Rp)
1.	TPR BUS CEPAT (AKAP)	96.300.000	101.439.000
2.	TPR BUS LAMBAT (AKDP)	247.925.000	187.032.000
3.	TPR BUS KOTA (SINGLE)	53.784.000	54.765.000
4.	TPR NON BUS ANTR KOTA	12.816.000	13.019.200
5.	TPR NON BUS DLAM KOTA	9.720.000	9.800.700
6.	RETRIBUSI KIOS	11.236.500	12.403.500
7.	RETRIBUSI IJIN KIOS	4.740.000	2.550.000
8.	RETRIBUSI MCK	5.785.500	5.505.000
9.	RETRIBUSI TAXI	3.239.500	3.296.500
10.	RETRIBUSI PARKIR RODA 4	1.080.000	1.150.000
11.	RETRIBUSI PARKIR RODA 2	864.000	900.000
12.	BALIK NAMA KIOS	-	6.000.000
13.	PENJUALAN KIOS	-	-
JUMLAH		447.490.500	397.860.900

Sumber : UPT Terminal Kartasura

Dari tabel 1 diatas dapat dilihat besarnya target APBD untuk Terminal Kartasura pada tahun 2013 adalah sebesar Rp. 447.490.500,- sedangkan untuk penerimaan yang didapatkan Terminal Kartasura sebesar Rp. 397.860.900,-. Dari data tersebut bisa disimpulkan bahwa penerimaan Terminal Kartasura belum bisa memenuhi target yang telah ditetapkan sebelumnya.

Penerimaan Terminal yang belum bisa memenuhi target tersebut dikarenakan ada beberapa sumber pemasukan yang belum bisa menyumbangkan penerimaan seperti yang ditargetkan. Beberapa sumber penerimaan yang belum mencapai target adalah TPR bus lambat (AKDP), retribusi ijin kios, retribusi MCK, serta retribusi parkir roda 2.

Bila dibandingkan antara pemasukan Terminal Kartasura sebesar Rp. 397.860.900,- dengan PAD Kabupaten Sukoharjo (lampiran) untuk tahun 2013 adalah sebesar Rp. 170.463.178.000,- maka dapat disimpulkan bahwa Terminal Kartasura memberi sumbangan sebesar 0,23% terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan bahwa sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo sangatlah kecil.

TABEL 2  
DAFTAR TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI TERMINAL KARTASURA  
BULAN DESEMBER 2014  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI UNIT TERMINAL

NO	SUMBER PENERIMAAN	TARGET APBD TAHUN 2014 (Rp)	PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
1.	TPR BUS CEPAT (AKAP)	101.310.000	103.770.000
2.	TPR BUS LAMBAT (AKDP)	247.795.000	162.641.000
3.	TPR BUS KOTA (SINGLE)	53.784.000	54.135.600
4.	TPR NON BUS ANTR KOTA	12.816.000	13.197.600
5.	TPR NON BUS DLAM KOTA	9.720.000	9.950.400
6.	RETRIBUSI KIOS	11.236.500	12.382.500
7.	RETRIBUSI IJIN KIOS	4.740.000	5.730.000
8.	RETRIBUSI MCK	5.785.500	5.785.500
9.	RETRIBUSI TAXI	3.239.500	3.288.000
10.	RETRIBUSI PARKIR RODA 4	1.080.000	1.190.500
11.	RETRIBUSI PARKIR RODA 2	864.000	929.200
12.	BALIK NAMA KIOS	-	21.000.000
13.	PENJUALAN KIOS	-	-
JUMLAH		447.370.500	393.640.300

Sumber : UPT Terminal Kartasura

Dari tabel 2 diatas dapat dilihat daftar target dan realisasi penerimaan retribusi Terminal Kartasura untuk tahun 2014. Target APBD Terminal Kartasura adalah sebesar Rp. 447.370.500,- sedangkan besar penerimaan adalah sebesar Rp. 393.640.300,-. Data ini menunjukkan bahwa penerimaan Terminal Kartasura belum bisa memenuhi target APBD yang ditetapkan sebelumnya. Hal ini disebabkan penerimaan TPR bus lambat (AKDP) hanya sebesar 65,64% dari target APBD. Sedangkan sumber penerimaan lain telah dapat memenuhi target APBD.

Selanjutnya bila diperbandingkan penerimaan retribusi Terminal Kartasura tahun 2014 tersebut dengan PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 (lampiran). Dapat dilihat PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2014 adalah sebesar Rp. 215.572.800.000,- sedangkan penerimaan retribusi Terminal Kartasura sebesar Rp. 393.640.300,-. Dengan demikian sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo adalah sebesar 0,18%. Dapat disimpulkan bahwa sumbangan penerimaan retribusi Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo sangatlah kecil. Selain itu, apabila dibandingkan dengan sumbangan penerimaan untuk tahun 2013, sumbangan penerimaan tahun 2014 ini cukup menurun tajam. Terminal Kartasura yang tadinya dapat memberikan sumbangan penerimaan sebesar 0,23% pada tahun 2013 menjadi 0,18% pada tahun 2014. Sumber-sumber penerimaan Terminal yang telah dapat ditingkatkan dan memenuhi target APBD pada tahun 2014 ternyata tidak dapat meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan, hal ini disebabkan secara keseluruhan penerimaan retribusi Terminal Kartasura pada tahun 2014 mengalami penurunan bila dibandingkan tahun 2013.

TABEL 3  
DAFTAR TARGET DAN REALISASI RETRIBUSI TERMINAL KARTASURA  
BULAN DESEMBER 2015  
PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO  
DINAS PERHUBUNGAN, INFORMATIKA DAN KOMUNIKASI UNIT TERMINAL

NO	SUMBER PENERIMAAN	TARGET APBD TAHUN 2015 (Rp)	PENERIMAAN S/D BULAN INI (Rp)
1.	TPR BUS CEPAT (AKAP)	101.310.000	106.773.000
2.	TPR BUS LAMBAT (AKDP)	247.796.000	167.722.000
3.	TPR BUS KOTA (SINGLE)	53.784.000	54.462.600
4.	TPR NON BUS ANTAR KOTA	12.816.000	13.414.000
5.	TPR NON BUS DLAM KOTA	9.720.000	10.080.300
6.	RETRIBUSI KIOS	11.235.000	12.628.500
7.	RETRIBUSI IJIN KIOS	4.740.000	5.670.000
8.	RETRIBUSI MCK	5.786.000	5.818.000
9.	RETRIBUSI TAXI	3.239.500	3.290.500
10.	RETRIBUSI PARKIR RODA 4	1.080.000	1.168.500
11.	RETRIBUSI PARKIR RODA 2	864.000	944.000
12.	BALIK NAMA KIOS	-	13.500.000
13.	PENJUALAN KIOS	-	-
JUMLAH		447.370.500	395.471.400

Sumber : UPT Terminal Kartasura

Data penerimaan retribusi Terminal Kartasura tahun 2015 dapat dilihat pada tabel 3 diatas. Target APBD Terminal Kartasura untuk tahun 2015 adalah sebesar Rp. 447.370.500,- sedangkan penerimaannya sebesar Rp. 395.471.400,-. Dari angka tersebut dapat diketahui bahwa penerimaan Terminal Kartasura tahun 2015 belum bisa memenuhi target APBD. Seperti tahun sebelumnya (tahun 2014) ketidakmampuan memenuhi target APBD ini disebabkan karena penerimaan TPR bus lambat (AKDP) yang masih jauh dari target yang ditetapkan, atau hanya sekitar 67,69% dari target yang ditetapkan. Meskipun dari segi penerimaan TPR bus lambat (AKDP) ini telah mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. PAD Kabupaten Sukoharjo tahun 2015 (lampiran) adalah sebesar Rp. 235.933.524.000,-. Dengan melihat penerimaan Terminal Kartasura sebesar Rp. 395.471.400,- maka hal ini menunjukkan bahwa Terminal Kartasura memberikan sumbangan sebesar 0,17% terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo.

TABEL 4  
TINGKAT PENCAPAIAN RETRIBUSI TERMINAL KARTASURA  
TERHADAP TARGET APBD KABUPATEN SUKOHARJO  
TAHUN 2013 – TAHUN 2015

Tahun	Retribusi Terminal ( Rp.)	Target APBD ( Rp.)	Kontribusi (%)
2013	447.490.500	397.860.900	88.91
2014	447.370.500	393.640.300	87.98
2015	447.370.500	395.471.400	88.39

Sumber : Data diolah

Seperti tampak pada Tabel 4 bahwa secara keseluruhan selama tiga tahun berturut-turut dari tahun 2013- tahun 2015 target APBD dari retribusi Terminal Kartasura tidak pernah tercapai, yaitu dengan tingkat pencapaian di bawah 100 %. Bahkan untuk tahun 2014 kontribusi retribusi Terminal Kartasura terhadap APBD sebesar 87.98% lebih kecil dari pencapaian tahun sebelumnya.

TABEL 5  
KONTRIBUSI RETRIBUSI TERMINAL KARTASURA TERHADAP PAD KABUPATEN  
SUKOHARJO TAHUN 2013 – TAHUN 2015

Tahun	Retribusi Terminal ( Rp.)	PAD ( Rp.)	Kontribusi (%)
2013	397.860.900,-	170.463.178.000,-	0.23
2014	393.640.300,-	215.572.800.000,-	0.18
2015	395.471.400,-	235.933.524.000,-	0.17

Sumber : Data diolah

Tampak pada tabel 5 dari tahun ke tahun sumbangan penerimaan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo terus mengalami penurunan. Pada tahun 2013 Terminal Kartasura dapat memberikan sumbangan sebesar 0,23%, tahun 2014 memberikan sumbangan sebesar 0,18%, dan tahun 2015 memberikan sumbangan sebesar 0,17%. Penurunan sumbangan penerimaan Terminal Kartasura terhadap PAD dari tahun 2013 ke tahun 2014 disebabkan adanya penurunan total penerimaan Retribusi Terminal Kartasura. Sedangkan penurunan sumbangan penerimaan Terminal Kartasura terhadap PAD dari tahun 2014 ke tahun 2015 disebabkan karena kenaikan penerimaan retribusi Terminal Kartasura tidaklah signifikan.

Dengan mempelajari data penerimaan keuangan sebagai retribusi Terminal Kartasura yang ada kemudian dilakukan analisa menyeluruh terhadap kondisi keuangan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan retribusi Terminal Kartasura belum optimal. Tingkat pencapaian retribusi di bawah 100% dari target APBD selama tiga tahun berturut-turut, dan prosentase kontribusi terhadap PAD yang terus menurun adalah indikator yang nyata belum optimalnya penerimaan retribusi Terminal Kartasura.

Dari segi pendapatan, Terminal Kartasura belum dapat memenuhi target APBD yang telah diterapkan. Apabila kita hanya melihat dari segi penerimaan, maka hal ini disebabkan ada beberapa sumber penerimaan yang hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Akan tetapi secara umum sebenarnya banyak permasalahan yang dihadapi Terminal Kartasura yang mendorong penerimaannya tidak optimal.

Pada awal pembangunan, sebenarnya Terminal Kartasura ini telah mengalami masalah. Terutama dikarenakan anggaran yang tidak memadai. Perencanaan awal yang kurang terutama dari segi pendanaan membuat pembangunan tidak berjalan dengan baik, sehingga dari awal berdiri hingga saat ini tidak banyak penambahan bangunan di sekitar Terminal Kartasura ini. Selain itu sistem yang ada tidak terbangun dengan baik, misalnya saja sistem yang digunakan untuk koordinasi antar pegawai Terminal, sistem pemungutan retribusi, serta sistem lain yang mendukung operasional Terminal Kartasura sehari-hari.

Permasalahan lainnya yang cukup penting adalah kondisi Terminal yang sepi, hal ini dikarenakan sedikitnya bus yang masuk Terminal. Kondisi ini dikarenakan jarak dari jalur utama bus ke Terminal terlalu jauh. Jarak dari Jalan Diponegoro ke akses pintu masuk barat adalah 390 meter dan jarak dari Jalan Ahmad Yani ke akses pintu masuk timur adalah 1350 meter. Selain itu, jarak Terminal Kartasura ke Terminal Tirtonadi sebagai Terminal utama Kota Solo cukup dekat ( $\pm$  11 km). Menurut Keputusan Menteri Perhubungan No. 31 Tahun 1995, Terminal Kartasura secara persyaratan telah memenuhi Keputusan tersebut, kecuali jarak antara dua terminal yaitu antara Terminal Kartasura dan Terminal Solo tidak memenuhi (kurang dari 15 km).



Gbr 1. Kondisi Terminal yang cukup sepi

Lokasi yang jauh dari jalan raya ini ditunjang dengan tidak adanya kendaraan angkutan perkotaan yang melayani pergerakan penumpang yang ingin menggunakan bus di Terminal Kartasura disebabkan Terminal tersebut memiliki aksesibilitas yang rendah. Transportasi pendukung seperti bus kota, angkot, ojek, becak, serta sarana transportasi lain belum terorganisir dengan baik serta dari segi jumlah sangatlah sedikit. Pada saat awal Terminal Kartasura beroperasi sebenarnya banyak bus kota serta angkot yang mendukung transportasi wilayah Terminal Kartasura dan sekitarnya, hanya saja setelah adanya kebijakan kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) dalam sebulan terjadi beberapa kali kenaikan harga. Kondisi ini menyebabkan banyak pengusaha bus kota serta angkot yang gulung tikar. Berdasarkan informasi yang didapat dari Bapak Maryadi selaku Kepala Terminal Kartasura, dari 40 trayek yang dulu beroperasi di Terminal Kartasura sekarang hanya tinggal 19 trayek dikarenakan banyaknya pengusaha angkutan yang tidak mampu terus beroperasi. Selain itu terdapat lima PO (Perusahaan Otobus) dengan 44 armada angkutan perkotaan, sepuluh PO dengan 57 armada angkutan pedesaan, dan enam PO dengan 62 armada bus AKDP yang sudah tidak beroperasi/melayani Terminal Kartasura.

Angkutan utama yang mendukung pergerakan penumpang untuk saat ini adalah adanya BST (Batik Solo Trans), hanya saja jumlahnya masih sedikit serta hanya melayani rute Terminal Kartasura menuju kota Solo. Belum terintegrasinya angkutan yang satu dengan yang lainnya membuat penumpang enggan untuk turun di Terminal Kartasura. Sedikitnya penumpang yang turun di Terminal Kartasura membuat para supir angkot, tukang becak, tukang ojek, hingga supir taxi mengeluhkan keadaan Terminal yang sepi sehingga mereka jarang mendapatkan penumpang.



Gbr 2. Angkutan yang belum terintegrasi

Permasalahan selanjutnya adalah tingkat hunian kios yang rendah. Deretan kios di Terminal Kartasura terlihat sepi, disini utara terminal sejumlah pedagang sudah sejak pagi membuka kios yang difungsikan sebagai warung makan, akan tetapi tidak ada pengunjung yang datang. Hal ini sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Tak banyak bus yang masuk ke Terminal ini. Para pedagang mengeluhkan kondisi Terminal yang sepi, berbeda dengan Terminal terdahulu yang ramai karena terletak di jalur utama Solo-Semarang. Bahkan para pedagang menyatakan saat arus mudik maupun arus balik kondisinya sama saja, Terminal selalu dalam keadaan sepi.



Gbr 3. Tingkat hunian kios yang rendah

Penegakan hukum serta kurangnya ketegasan aparat turut ikut andil dalam menciptakan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya. Misalnya dari segi keengganan para sopir untuk masuk Terminal sehingga membuat Terminal selalu sepi. Hal ini bisa saja dikarenakan tidak adanya sanksi bagi angkutan umum yang tidak mau masuk Terminal. Kemudian dari sisi rendahnya penerimaan retribusi kios, hal ini dikarenakan para petugas terkendala dengan banyaknya pedagang kios yang beralasan tidak mampu membayar karena kiosnya selalu sepi serta banyak pemilik yang tidak berdomisili di area Terminal Kartasura. Ketegasan dari para petugas tentulah dibutuhkan untuk menghadapi permasalahan tersebut.

Terdapat beberapa fasilitas utama dan penunjang yang belum disediakan dan atau kondisinya tidak memadai. Hal ini diperparah dengan fasilitas umum penunjang Terminal yang dibiarkan mangkrak, beberapa kios juga rusak parah. Bahkan diduga sejumlah kios

dialihfungsikan menjadi hunian, disewakan pada pihak lain yang tidak berkepentingan (tempat pengumpulan barang rongsok), bahkan tempat karaoke oleh beberapa pihak. Untuk fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK) serta musholla telah tersedia, hanya saja belum memenuhi standar Terminal.



Gbr 4. Kios yang beralih fungsi

Bagi penumpang terdapat pertimbangan lain mengapa mereka enggan untuk naik atau turun di Terminal Kartasura. Selain lokasinya yang jauh, Terminal Kartasura juga cukup sepi sehingga menyebabkan Terminal Kartasura menjadi rawan tindak kriminal. Hal ini tentu bukan kondisi yang ideal terutama bagi para penumpang yang mengharapkan keamanan, keselamatan, serta kenyamanan selama dalam perjalanan.

Apabila dilihat dari kinerja secara keseluruhan Terminal Kartasura mengalami penurunan, hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah RIT kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk Terminal, berkurangnya jumlah trayek dan armada kendaraan angkutan penumpang umum yang masuk ke dalam Terminal, berkurangnya jumlah calon penumpang yang datang ke Terminal, dan juga berkurangnya tingkat hunian kios.

Dengan melihat uraian diatas, permasalahan yang dihadapi Terminal Kartasura masih sangat banyak. Hal ini justru membuka peluang untuk meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo, dengan catatan permasalahan yang tengah dihadapi saat ini diatasi terlebih dahulu.

Dari awal mula didirikan, pembangunan Terminal Kartasura terkesan sekedar ingin mengurai kemacetan yang terjadi pada Terminal Kartasura sebelumnya. Setelah Terminal Kartasura dipindahkan, tidak ada lagi perencanaan pembangunan yang berkesinambungan yang dapat meningkatkan pendapatan serta kualitas Terminal Kartasura. Oleh karena itu perlulah kiranya untuk melakukan revaluasi tata ruang. Revaluasi tata ruang ini tidak hanya di lingkungan mikro Terminal saja tetapi juga lingkungan makro Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan.

Semua pihak tentu menginginkan agar Terminal Kartasura bisa beroperasi secara optimal serta dapat mengatasi berbagai kendala yang dihadapi saat ini. Terminal Kartasura merupakan Terminal tipe B, oleh karena itu dalam melakukan revaluasi tata ruang mikro harus disesuaikan dengan peruntukannya. Keadaan Terminal Kartasura saat ini belum memenuhi standar Terminal tipe B, hal ini bisa dilihat dari fasilitas serta akses Terminal yang belum dibangun dengan baik.

Beberapa cara untuk meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo adalah dengan meningkatkan sarana dan fasilitas, akses, serta

menjadikannya sebagai pusat keramaian. Peningkatan fasilitas perlu dilakukan, baik fasilitas utama maupun fasilitas pendukung. Fasilitas utama tersebut antara lain adalah tempat menurunkan dan menaikkan penumpang, tempat parkir, retribusi, menara pemantauan, tempat informasi, kios, cek kelalaian kendaraan. Sedangkan untuk fasilitas pendukung adalah sarana mandi, cuci, kakus (MCK), musholla, tempat penitipan barang, serta tempat pemeriksaan ibu hamil.

Peningkatan akses yang lebih baik dari yang telah ada saat ini merupakan hal yang perlu dilakukan. Akses Terminal ke jalan raya harus dipermudah dan diperlebar. Saat ini akses Terminal sangat jauh dari jalan raya, selain itu jalannya juga cukup sempit sehingga mempersulit angkutan serta kendaraan besar yang akan masuk Terminal, terutama bus antar kota yang berukuran besar.

Selain itu, akses yang perlu diperhatikan adalah menghubungkan Terminal dengan sarana lain yang memudahkan masyarakat dalam beraktivitas. Misalnya saja menghubungkan Terminal dengan bandara Adi Soemarmo yang hanya berjarak 6,7 km. Pemisahan jalur untuk angkutan barang, bus, maupun pribadi juga dapat dilakukan. Untuk jalur keluar masuk bus dari arah Kartasura ke Solo atau sebaliknya yang saat ini melalui Jl. Ahmad Yani bisa dialihkan melalui Jl. Adi Sucipto atau Jl. Adi Soemarmo.

Agar Terminal Kartasura tidak lagi sepi maka perlu untuk menjadikannya sebagai pusat keramaian agar dapat menarik penumpang secara khusus dan masyarakat secara umum. Agar bisa menjadi pusat keramaian maka di area Terminal Kartasura dapat didirikan kolam renang, pasar, taman rekreasi, ruang terbuka hijau, ataupun menjadikan pusat oleh-oleh, pusat kerajinan, bahkan pusat kuliner. Kios-kios yang selama ini masih mangkrak karena tidak digunakan bisa digunakan sebagai pusat perbelanjaan tadi.

Penegakan hukum juga merupakan salah satu poin penting untuk mengatasi permasalahan di Terminal Kartasura. Misalnya saja dalam hal keengganan sopir bus untuk masuk ke dalam Terminal, hal ini bisa diatasi dengan memberikan sanksi yang tegas apabila angkutan umum tidak masuk Terminal. Sedangkan untuk masalah keamanan bisa diatasi dengan membentuk kerjasama dengan pihak kepolisian/TNI atau bahkan melakukan pemberdayaan preman yang nantinya ikut menjaga keamanan dan kenyamanan semua pihak di lingkungan Terminal, dan bukan sebaliknya (mengganggu penumpang, mengambil uang dari sopir atau pemilik kios, dan lain-lain).

Revaluasi tata ruang makro tentu merupakan hal yang tidak mudah untuk dilakukan. Akan tetapi, apabila Pemerintah Kabupaten Sukoharjo bisa merencanakan site plan (rencana tapak) secara keseluruhan serta terkoordinasi dengan baik, tentu hal ini tidak hanya meningkatkan pendapatan Terminal Kartasura saja tetapi juga meningkatkan PAD Kabupaten Sukoharjo secara keseluruhan. Agar dapat meningkatkan pendapatan Terminal Kartasura secara khusus, Pemerintah Kabupaten Sukoharjo dapat melakukan revaluasi jaringan transportasi yang mengharuskan semua armada angkutan umum harus keluar masuk melalui Terminal Kartasura.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Dalam kurun waktu tahun 2013 hingga tahun 2015 sumbangan Terminal Kartasura tidak mencapai 1% bila dibandingkan dengan PAD Kabupaten Sukoharjo. Hal ini menunjukkan Terminal Kartasura tidak memberikan kontribusi yang besar untuk PAD Kabupaten Sukoharjo. Sumbangan Terminal Kartasura terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo masih dapat ditingkatkan, hanya saja permasalahan yang ada di lingkungan Terminal harus diatasi terlebih dahulu. Permasalahan yang dihadapi Terminal Kartasura untuk saat ini antara lain akses yang jauh dari jalan raya, fasilitas yang tidak memadai, kondisi yang sepi baik dari segi penumpang

maupun jumlah angkutan yang keluar masuk. Apabila permasalahan ini teratasi maka dapat meningkatkan peluang Terminal Kartasura dalam memberikan sumbangan terhadap PAD Kabupaten Sukoharjo. Peluang untuk meningkatkan sumbangan Terminal Kartasura ini bisa dilakukan dengan melakukan revaluasi tata ruang lingkungan mikro Terminal dan lingkungan makro Kabupaten Sukoharjo. Revaluasi tata ruang Terminal bisa dilakukan dengan meningkatkan sarana, fasilitas, akses, serta menjadikannya sebagai pusat keramaian. Sedangkan secara makro, Kabupaten Sukoharjo dapat membuat perencanaan pembangunan Kabupaten yang menyeluruh sehingga ada integrasi antar bangunan serta fasilitas umum yang dibangun. Misalnya saja menghubungkan Terminal Kartasura dengan fasilitas lain yang mendukung peningkatan PAD, misalnya saja menghubungkannya dengan Bandara Adi Soemarmo. Penelitian ini hanya mengambil jangka waktu tiga tahun yaitu dari tahun 2013 hingga 2015 dikarenakan keterbatasan data yang dikumpulkan. Untuk penelitian selanjutnya disarankan mengambil jangka waktu yang lebih panjang agar hasil penelitian dapat lebih menyeluruh serta memberikan gambaran yang lebih luas lagi.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Asis, Sri Hasnaeni. (2013). Optimalisasi Pemungutan Retribusi Terminal Di Dinas Perhubungan Dan Infokom Kabupaten Bantaeng. Universitas Hasanudin.
- Eriyanto. (2007). Teknik Sampling Analisis Opini Publik. LKIS. Yogyakarta.
- Hartoyo. Nafsi. (2014). Optimalisasi Aset Negara/Daerah. Widyaaiswara Balai Diklat. Semarang.
- Hazri, dan Tuti Khairani. (2009). Analisis Pengelolaan Terminal Sekapur Sirih di Bagansiapi-Api Oleh Dinas Perhubungan, Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Rokan Hilir. Google.com.
- Iskandar. (2012). Banyak Bus Tak Masuk Terminal, Pedagang Mengeluh. Solopos. Solo. Solopos. 7 Juni 2014.
- Suara Merdeka. 30 Desember 2005.
- Sukriy. (2009). Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah. Wordpress.com.
- Sushernawan, Prasetya. Sulistyowati. dan Fitriyah. (2014). Sistem Pengelolaan Terminal Mangkang Kota Semarang. Jurnal Ilmu Pemerintahan. Universitas Diponegoro. Semarang
- .

## ANALISIS KINERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN DAN KOTA DI PROVINSI ACEH BERDASARKAN RASIO KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH

Tri Prastiwi<sup>1</sup>  
Muhammad Arfan<sup>2</sup>  
Darwanis<sup>3</sup>

***Abstract:** Analysis of the performance of local government districts and cities in the province Aceh on the ratio of local financial independence. This research is aimed to analyze the performance level of local government districts and towns in Aceh based on the ratio of local financial independence of the fiscal year 2013. The issue discussed was “how the performance level of local government of districts and towns in Aceh based on the ratio of local financial independence”. The data used in this research are secondary data. The data are budget realization reports of districts and towns in Aceh for the fiscal year 2013. The source of data is obtained directly from the Financial Agency of Aceh. Data are analyzed by using the ratio of local financial independence. The result shows that the government performance level of districts and towns in Aceh is still very low. This is evidenced by the ratio of local financial independence of districts and towns in Aceh is still in a very low ratio because of external aid dependency is still high.*

**Abstrak:** Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah tahun 2013. Masalah yang dibahas adalah “bagaimana tingkat kinerja pemerintah daerah kabupaten dan kota di Aceh berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah”. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data tersebut berupa laporan realisasi anggaran daerah kabupaten dan kota di Aceh tahun fiskal 2013. Sumber data diperoleh langsung dari Dinas Keuangan Aceh. Data dianalisis dengan menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Hasil menunjukkan bahwa kinerja pemerintah kabupaten dan kota di Aceh masih sangat rendah. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian keuangan kabupaten dan kota di Aceh yang masih berada pada rasio yang sangat rendah karena ketergantungan bantuan dari pihak eksternal masih tinggi.

**Kata Kunci:** Rasio kemandirian, keuangan daerah, dan kinerja pemerintah daerah.

---

1 Magister Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

2 Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

3 Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

## PENDAHULUAN

Pelaksanaan Undang–Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang–Undang No 25 Tahun 1999 yang kemudian diperbaharui dengan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, telah menyebabkan perubahan yang mendasar mengenai pengaturan hubungan pusat dan daerah, khususnya dalam bidang administrasi pemerintahan maupun dalam hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dikenal sebagai era otonomi daerah.

Konsekuensi dari pelaksanaan otonomi adalah bahwa daerah harus mampu mengembangkan otonomi daerah secara luas, nyata, dan bertanggungjawab. Fenomena yang terjadi dari adanya penerapan otonomi daerah adalah ketergantungan pemerintah daerah (Pemda) yang tinggi pada pemerintah pusat. Ketergantungan ini terlihat jelas dari aspek keuangan. Pembangunan di daerah terutama fisik memang cukup pesat, tetapi tingkat ketergantungan fiskal antara daerah terhadap pusat sebagai akibat dari pembangunan juga semakin besar. Ketergantungan fiskal juga terlihat dari relatif rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dan dominannya transfer dari pusat.

Untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Pengukuran kinerja berdasarkan UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan UU No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan pasal 4 PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggung jawaban Keuangan Daerah, dalam menentukan ukuran kinerja keuangan daerah dengan menggunakan rasio keuangan yang dapat dikembangkan berdasarkan data keuangan yang bersumber dari APBD. Oleh karena itu, kreativitas dan inisiatif suatu daerah dalam menggali sumber-sumber keuangan akan sangat bergantung pada kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah itu sendiri.

Kinerja merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis (strategic planning) suatu organisasi (Bastian, 2010:274). Selanjutnya, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan (MenPAN:2007).

Pengukuran kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. Pertama, pengukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk membantu perbaikan kinerja pemerintah yang berfokus kepada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam memberikan pelayanan publik. Kedua, ukuran kinerja sektor publik digunakan untuk pengalokasian sumberdaya dan pembuatan keputusan. Ketiga, ukuran kinerja sektor publik dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggungjawaban publik dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Marsdiasmo, 2006).

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Hasil analisis rasio terhadap APBD dapat digunakan untuk (Halim, 2008:230) : Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah; Mengukur efisiensi dan efektifitas dalam merealisasikan pendapatan daerah; Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya; Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah; Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan

selama periode waktu tertentu.

Menurut Halim (2008), untuk melihat kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio keuangan yaitu sebagai berikut: Rasio derajat desentralisasi keuangan daerah Rasio ketergantungan keuangan daerah Rasio kemandirian keuangan daerah.

Rasio efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam penelitian ini, peneliti hanya menggunakan rasio kemandirian keuangan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan sesuai target yang ditetapkan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan restribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman. Semakin tinggi rasio kemandirian maka tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak ekstern semakin rendah, dan demikian pula sebaliknya (Halim: 2008).

Kemampuan daerah dimaksud dalam arti seberapa jauh daerah dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat. Kemampuan daerah untuk dapat membiayai keuangan daerahnya antara lain dapat dilihat dari besarnya pendapatan asli daerah yang meningkat, dibandingkan dana perimbangan, semakin besar PAD maka ketergantungan terhadap pusat akan semakin kecil dan penggunaan surplus anggaran kepada alokasi belanja terutama belanja untuk pengembangan infrastruktur umum daripada pengeluaran pembiayaan untuk rekening pemegang kas daerah.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran, memaparkan, dan melaporkan suatu keadaan, obyek, atau peristiwa. Unit analisis dalam penelitian ini adalah organisasional dengan populasi seluruh Kabupaten/Kota di Aceh (18 kabupaten dan 5 kota).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui metode dokumenter. Data sekunder berupa Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten/Kota di Aceh Tahun 2013.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Data yang berasal dari APBD dianalisis dengan menggunakan rasio keuangan yaitu:

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$= \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Perimbangan +lain2 pendapatan daerah yang sah}} \times 100\%$$

**ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN**

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk melihat rasio kemandirian Kabupaten/ Kota di Aceh tahun anggaran 2013 disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1.  
Rasio Kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh Tahun Anggaran 2013

Kabupaten/ kota	PAD	total pendapatan eksternal	Rasio Kemandirian
Kab. Aceh Barat	46.928.106.802,78	673.529.662.851,74	6,9675
Kab. Aceh Barat Daya	32.534.985.970,94	523.657.517.608,00	6,2130
Kab. Aceh Besar	76.107.259.036,13	863.830.390.408,18	8,8104
Kab. Aceh Jaya	20.646.749.350,17	472.129.590.075,00	4,3731
Kab. Aceh Selatan	36.181.171.784,68	737.659.975.006,00	4,9049
Kab. Aceh Singkil	18.024.823.052,70	464.151.866.009,00	3,8834
Kab. Aceh Tamiang	42.592.561.279,66	628.348.551.204,98	6,7785
Kab. Aceh Tengah	76.870.446.782,32	720.093.940.151,42	10,6751
Kab. Aceh Tenggara	25.620.560.182,10	582.546.187.103,00	4,3980
Kab. Aceh Timur	42.805.235.987,63	897.529.633.802,00	4,7692
Kab. Aceh Utara	99.869.693.144,17	1.471.352.555.852,00	6,7876
Kab. Bener Meriah	18.918.704.154,42	486.904.791.322,00	3,8855
Kab. Bireuen	93.893.140.983,71	1.029.022.714.361,99	9,1245
Kab. Gayo Lues	20.213.909.298,67	510.889.241.609,69	3,9566
Kab. Nagan Raya	37.942.005.577,87	622.353.726.698,00	6,0965
Kab. Pidie	76.878.689.101,26	946.739.201.420,00	8,1204
Kab. Pidie Jaya	14.052.583.434,81	492.635.697.295,00	2,8525
Kab. Simeulue	15.309.778.448,22	471.000.287.671,60	3,2505
Kota Banda Aceh	129.122.120.462,00	905.808.725.719,00	14,2549
Kota Langsa	57.243.381.959,77	545.553.069.011,03	10,4927
Kota Lhokseumawe	36.213.933.082,49	632.996.981.578,00	5,7210
Kota Sabang	27.377.339.119,72	422.492.065.360,00	6,4800
Kota Subulussalam	8.287.512.018,46	354.058.926.052,00	2,3407
		mean	6,3103
		min	2,3407
		max	14,2549

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio kemandirian Kabupaten/Kota di Aceh yaitu sebesar 6,31%. Rasio ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Ach memiliki pola hubungan instruktif yang berarti bahwa kemandirian keuangan daerah Kabupaten/Kota di Aceh tergolong rendah sekali, karena tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi. Hal ini berarti kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih tergolong rendah. Karena, pemerintah daerah dalam membiayai pelaksanaan dan pembangunan masih tergantung pada penerimaan pemerintah pusat dan provinsi.

Rasio kemandirian tertinggi sebesar 14,25% diperoleh Kota Banda Aceh dan rasio kemandirian terendah sebesar 2,34% diperoleh Kota Subulussalam. Hal ini menunjukkan bahwa Kota Banda Aceh memiliki kemandirian keuangan tertinggi dibanding dengan Kabupaten/Kota

di Aceh lainnya, dan Kota Subulussalam memiliki kemandirian keuangan terendah dibanding dengan Kabupaten/Kota di Aceh lainnya.

Untuk itu perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota untuk dapat menggali sumber-sumber keuangan sendiri guna membiayai kebutuhannya tanpa harus selalu menggantungkan diri pada bantuan pemerintah pusat

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan, Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa kinerja pemerintah daerah Kabupaten/Kota di Aceh masih tergolong rendah. Hal ini dibuktikan dengan rasio kemandirian yang masih rendah sebesar 6,31%. Yang berarti tingkat ketergantungan terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) masih tinggi.

Saran, Perlu adanya usaha dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Aceh dalam mengoptimalkan sumber pendapatan yang telah ada dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah harus mencari alternatif-alternatif lainnya dalam mengurangi tingkat ketergantungan terhadap bantuan eksternal. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah rasio yang digunakan, obyek penelitian, tahun yang digunakan dan menganalisis keseluruhan unsur APBD sehingga dapat memperoleh hasil yang lengkap..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Analisis Kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Rasio Pendapatan Daerah APBD Tahun 2009-2011. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Bastian, I. (2010). Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Jakarta: Erlangga.
- Halim, A. (2008). Analisis Investasi (Belanja Modal) Sektor Publik Pemerintah Daerah. UPP-STIM YKPN. Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2006). Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: ANDI.
- Mianti, R. (2014). Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Se-Provinsi Bengkulu Sepuluh Tahun Terakhir. Skripsi. Universitas Bengkulu.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah.
- \_\_\_\_\_, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Purwaningsih, I. (2013).
- .

## PENGARUH *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* DAN REPUTASI AUDITOR TERHADAP MANAJEMEN LABA

Lita Yulita Fitriyani<sup>1</sup>

Marita<sup>2</sup>

Cahyani Budi Astuti<sup>3</sup>

**Abstract: *Effect of Good Corporate Governance and Auditor Reputation Management on Profit.*** This study aims to examine the effect of good corporate governance on earnings management. Good corporate governance consists of institutional ownership, managerial ownership, independent commissioner, audit committee, board of directors, and auditor reputation. Auditor reputation of as auditors affiliated with the KAP Big Four or KAP Non Big Four. Earnings management measured with discretionary accruals by Modified Jones Model (1991). The population used in this study were manufacturing companies listed at Indonesian Stock Exchange 2011-2013. The sample selection using purposive sampling method. Based on the purposive sampling method, samples obtained as many as 61 companies. The method of analysis in this study using multiple regression analysis. The results of this research shows that institutional ownership had significant influence to earnings management. Managerial ownership, independent commissioner, audit committee, board of directors, and auditor reputation had no significant influence to earnings management.

**Abstrak: Pengaruh *Good Corporate Governance* dan Reputasi Auditor terhadap Manajemen Laba.** Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola perusahaan yang baik pada manajemen laba. tata kelola perusahaan yang baik terdiri dari kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan reputasi auditor. reputasi auditor sebagai auditor yang berafiliasi dengan KAP Big Four atau Big Four KAP Non. manajemen laba diukur dengan akrual diskresioner dengan Model Jones Modified (1991). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2011-2013. Pemilihan sampel menggunakan metode purposive sampling. Berdasarkan metode purposive sampling, sampel yang diperoleh sebanyak 61 perusahaan. Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba. kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan reputasi auditor tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap manajemen laba..

**Kata Kunci:** tata kelola perusahaan yang baik, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, reputasi auditor, manajemen laba.

1 Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: lita.yf@gmail.com

2 Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

3 Dosen Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta

## PENDAHULUAN

Masalah agensi timbul karena adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (principal) dan manajemen (agent). Sebagai agent, pihak manajemen mempunyai tanggungjawab mengelola perusahaan dan mengoptimalkan keuntungan para pemegang saham (principal). Namun, manajemen juga mempunyai kepentingan untuk mensejahterakan diri mereka sendiri (opportunistic) sehingga ada kemungkinan besar agent tidak selalu bertindak demi kepentingan pemegang saham saja.

Terkadang pihak manajemen memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya kepada pemegang saham. Informasi yang diketahui oleh pihak manajemen terkadang lebih banyak daripada informasi yang diketahui oleh pihak pemegang saham sehingga pemegang saham dapat melakukan pengambilan keputusan yang sebenarnya merugikan pemegang saham itu sendiri. Kondisi ini sering disebut dengan asimetri informasi (information asymmetric). Dalam kondisi seperti ini diperlukan suatu mekanisme pengendalian yang dapat menyamakan perbedaan kepentingan tersebut antara agent dan principal yaitu dengan mekanisme corporate governance yang terdiri dari kepemilikan saham institusional, kepemilikan saham manajerial, komisaris independen, komite audit dan dewan direksi. Pentingnya penerapan good corporate governance (GCG) dalam pengelolaan perusahaan diharapkan dapat melindungi pemegang saham dan kreditur agar dapat memperoleh kembali investasinya, mengurangi asimetri informasi antara manajemen dengan pemegang saham, dan mencegah tindakan yang tidak sejalan dengan kepentingan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh perusahaan atau institusi lain. Kepemilikan saham institusional dalam jumlah yang besar akan semakin mendorong investor (principal) untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan oportunistik manajer (agent). Keberadaan investor institusional diharapkan mampu menjadi alat monitoring yang efektif bagi perusahaan. Dengan adanya tingkat pengendalian terhadap manajemen yang sangat tinggi maka potensi kecurangan dapat ditekan (Herawaty, 2008). Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H1: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.

Kepemilikan manajerial adalah saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh pihak manajerial penerbit saham tersebut. Motivasi manajer perusahaan yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda, antara manajer yang merangkap sebagai pemegang saham dan manajer yang bukan pemegang saham. Dua hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, karena kepemilikan seorang manajer ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola. Jensen & Meckling (1976) dalam (Herawaty, 2008) berhasil membuktikan bahwa kepemilikan manajerial dapat mengurangi masalah keagenan dengan menyelaraskan kepentingan-kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H2: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (KNKG, 2004). Berdasarkan peraturan Bapepam, jumlah minimal komisaris independen berjumlah 30% dari jumlah seluruh anggota komisaris. Jumlah komisaris independen yang proporsional dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen sehingga dapat membatasi manajemen laba. Subhan (2011) menyatakan bahwa semakin tinggi komposisi komisaris independen maka akan menurunkan manajemen laba. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husni (2012) menunjukkan

bahwa jumlah komisaris independen dalam perusahaan berdampak pada tindakan manajemen laba. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H3: Komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.

Menurut Siegel (1996) dalam (Susiana dan Herawaty, 2007), komite audit adalah suatu badan yang dibentuk di dalam perusahaan klien yang bertugas untuk memelihara independensi akuntan pemeriksa terhadap manajemen. Penelitian yang dilakukan oleh Setiyarini (2010) dan Husni (2012) menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dapat meningkatkan pengawasan terhadap pelaporan keuangan yang dilakukan oleh manajer sehingga tindakan manajemen laba dapat diminimalisir. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan, keadilan untuk semua stakeholder, dan pengungkapan semua informasi telah dilakukan oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H4: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.

Jumlah dewan direksi yang banyak dapat mengakibatkan kurang efektifnya pengawasan, sulit dalam melakukan koordinasi, komunikasi dan pengambilan keputusan sehingga manajemen dapat leluasa melakukan praktek manajemen laba. Apabila jumlah dewan direksi sedikit maka praktik manajemen laba dapat dikurangi karena dengan jumlah dewan direksi yang sedikit lebih efektif dalam koordinasi dan komunikasi sehingga dapat meningkatkan pengawasan terhadap manajemen (Purwandari, 2011). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Husni (2012) menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi berpengaruh terhadap tindakan manajemen laba. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H5: Dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba.

Pada akhir periode, auditor akan memeriksa tingkat kewajaran laporan keuangan perusahaan klien, kemudian akan memberikan opini atas laporan keuangan tersebut. Opini hasil audit dapat mempengaruhi investor dalam melakukan pengambilan keputusan berinvestasi. Reputasi auditor dapat mempengaruhi opini yang diberikan pada perusahaan kliennya. Kantor Akuntan Publik (KAP) yang bereputasi diasumsikan bahwa audit yang dilaksanakan lebih berkualitas dan cenderung untuk lebih berhati-hati dalam melaksanakan audit.

KAP Big Four dikatakan besar karena KAP tersebut memiliki keahlian dan reputasi yang tinggi dibandingkan dengan KAP Non Big Four sehingga KAP Big Four memberikan jaminan kualitas audit yang lebih baik daripada KAP Non Big Four (Amijaya, 2013) dalam (Naufal Aditya). Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Prajitno dan Christiawan (2013) menunjukkan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big Four memiliki discretionary lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP Non Big Four. Hipotesis yang diajukan sebagai berikut: H6: Reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba.

## **METODE PENELITIAN**

Populasi dan Sampel, Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2011-2013. Pemilihan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling method. Kriteria-kriteria pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini: Menerbitkan laporan tahunan secara berturut-turut dan berakhir per 31 Desember. Tidak mengalami kerugian selama periode penelitian. Menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan.

Tabel 1  
Observasi Penelitian

Keterangan	Jumlah
Populasi pengamatan	141
Perusahaan yang tidak melaporkan laporan tahunan berturut-turut	(29)
Laporan keuangan tidak berakhir per 31 Desember	(3)
Perusahaan mengalami kerugian	(34)
Tidak menggunakan mata uang Rupiah	(14)
Jumlah sampel akhir	61
Total observasi penelitian 61 perusahaan selama 3 tahun (61x3)	183

Operasional Variabel, Variabel dependen dalam penelitian ini adalah manajemen laba yang diprosikan dengan discretionary accruals (DA), tepatnya menggunakan Modified Jones Model (1991). Sedangkan pengukuran variabel independennya adalah sebagai berikut:

Kepemilikan institusional diukur menggunakan skala rasio yaitu jumlah saham yang dimiliki investor institusional dibandingkan dengan total saham yang beredar. Kepemilikan manjerial diukur menggunakan skala rasio yaitu jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dibandingkan dengan total saham yang beredar. Dewan komisaris independen diukur dengan skala rasio yaitu jumlah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar perusahaan dibandingkan dengan seluruh anggota dewan komisaris perusahaan.

Komite audit diukur menggunakan total keseluruhan anggota komite audit. Dewan direksi diukur menggunakan total keseluruhan anggota dewan direksi. Reputasi auditor diukur dengan menggunakan variabel dummy. Jika KAP termasuk dalam The Big Four diberi nilai 1 dan jika termasuk dalam Non Big Four maka diberi nilai 0.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji statistik atas data yang dianalisis dalam penelitian ini tampak pada tabel 2.

Tabel 2  
Coefficientsa

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	,100	,055		1,826	,070
kepemilikan institusional	-,106	,030	-,270	-3,530	,001
kepemilikan manajerial	-,150	,121	-,098	-1,237	,218
1 komisaris independen	-,073	,066	-,083	-1,106	,270
komite audit	,007	,015	,037	,457	,648
dewan direksi	,002	,003	,063	,638	,524
reputasi auditor	-,010	,017	-,056	-,582	,561

Dependent Variable: manajemen laba

Persamaan regresi linier berganda sebagai model dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 0,100 - 0,106 X_1 - 0,150 X_2 - 0,073 X_3 + 0,007 X_4 + 0,002 X_5 - 0,10 X_6$$

Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 2,652 dengan nilai sig 0,017. Nilai sig.  $0,017 <$  dari nilai profitabilitas ( $\alpha = 0,05$ ) artinya kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dewan direksi, dan reputasi auditor berpengaruh terhadap manajemen laba (*discretionary accruals*) secara simultan. Hal ini menunjukkan pula bahwa persamaan regresi linier berganda pada penelitian ini dinyatakan layak untuk tahap pengujian hipotesis karena telah memenuhi kondisi *goodness of fit*.

Tabel 3  
ANOVAa

	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
	Regression	,119	6	,020		
1	Residual	1,316	176	,007	2,652	,017b
	Total	1,435	182			

Dependent Variable: manajemen laba

Predictors: (Constant), reputasi auditor, komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, kepemilikan manajerial, dewan direksi

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, dinyatakan bahwa data yang digunakan dalam penelitian ini telah berdistribusi normal dan tidak mengandung autokorelasi, multikolinearitas maupun heteroskedastisitas. Dengan demikian maka model penelitian ini dinyatakan Best Linier Unbiased Estimation (BLUE) sehingga layak untuk digunakan dalam tahap selanjutnya yaitu pengujian hipotesis.

Berdasarkan hasil uji t statistik pada tabel 2 tampak bahwa kepemilikan institusional mempunyai nilai signifikansi t sebesar 0,001 yang lebih kecil 0,05 ( $\alpha$ ) dengan nilai beta -0,270 yang berarti bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba dan antara kepemilikan institusional dengan manajemen laba terdapat hubungan negatif. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis 1 diterima, artinya semakin banyak saham yang dimiliki investor institusional maka semakin banyak investor yang mengawasi kinerja manajemen (agent) sehingga semakin rendah manajemen laba yang dilakukan oleh manajemen (agent). Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Jensen dan Meckling (1976) serta Pranata dan Mas'ud (2003).

Hasil pengujian hipotesis 2 mengenai pengaruh kepemilikan manajerial terhadap manajemen laba diketahui bahwa nilai signifikan t sebesar 0,218 lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ) dengan nilai beta -0,098 yang berarti bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba atau hipotesis 2 ditolak. Kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki para pengelola perusahaan (agent) yang merangkap sebagai pemilik saham perusahaan (principle). Jika agent merangkap sebagai pemilik saham maka agent tersebut harus siap menerima semua risiko yang akan terjadi. Selain itu, kepemilikan manajerial tidak dapat meminimalisir terjadinya manajemen laba karena presentase rata-rata kepemilikan manajerial relatif kecil yaitu sebesar 2,5% dari total saham yang beredar. Hal ini menyebabkan kurangnya peran dalam pengambilan keputusan perusahaan. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Guna dan Herawaty (2010) serta Sari (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil pengujian hipotesis 3 mengenai pengaruh komisaris independen terhadap manajemen laba diketahui bahwa nilai signifikan t komisaris independen sebesar 0,270 lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ) dengan nilai beta -0,083 yang berarti bahwa komisaris independen tidak

berpengaruh terhadap manajemen laba atau hipotesis 3, ditolak. Komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena pengangkatan dewan komisaris independen yang dilakukan oleh perusahaan hanya sebatas untuk memenuhi regulasi yang ada tetapi tidak untuk menegakkan *good corporate governance* di dalam perusahaan. Selain itu berdasarkan peraturan Bapepam dan LK dan peraturan Pencatatan Efek Nomor I-A Tentang Ketentuan Umum Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas di Bursa, minimal jumlah komisaris independen sebesar 30% belum bisa meningkatkan pengawasan terhadap tindakan manajemen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil pengujian hipotesis 4 mengenai pengaruh komite audit terhadap manajemen laba diketahui bahwa nilai signifikan  $t$  komite audit sebesar 0,648 lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ) dengan nilai beta 0,037 yang berarti bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba atau hipotesis 4, ditolak. Tidak berpengaruhnya komite audit terhadap manajemen laba karena keberadaan komite audit dalam perusahaan belum bisa memaksimalkan fungsinya dalam pengawasan pelaporan keuangan. Keberadaan komite audit hanya untuk memenuhi regulasi yang ada sehingga kinerja komite audit kurang efektif dan optimal dalam menerapkan pengawasan untuk meminimalisir praktik manajemen laba. Hasil penelitian ini konsisten dengan hasil penelitian Guna (2010), Prajitno (2014) dan Sari (2014) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Hasil pengujian hipotesis 5 mengenai pengaruh dewan direksi terhadap manajemen laba diketahui bahwa nilai  $\text{sig } t$  dewan komisaris sebesar 0,0524 lebih besar dari 0,05 dengan nilai beta 0,063 yang berarti bahwa dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba atau hipotesis 5, ditolak. Dewan direksi tidak berpengaruh terhadap manajemen laba karena jumlah dewan direksi yang banyak menyebabkan kurang efektifnya dalam berkomunikasi dan koordinasi antar dewan. Direksi kurang memberikan kontribusi dalam pengawasan pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Azlina (2010).

Hasil pengujian hipotesis 6 mengenai pengaruh reputasi auditor terhadap manajemen laba diketahui bahwa nilai  $\text{sig } t$  reputasi auditor sebesar 0,561 lebih besar dari 0,05 ( $\alpha$ ) dengan nilai beta -0,056 yang berarti bahwa reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba atau hipotesis 6, ditolak. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor Big Four tidak menjamin hasil audit yang lebih berkualitas dibandingkan dengan hasil audit auditor Non Big Four. Hal ini menunjukkan bahwa auditor Big Four belum tentu memiliki kualitas audit yang lebih baik dibandingkan dengan auditor Non Big Four.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa: Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap manajemen laba sedangkan kepemilikan manajerial, komisaris independen, komite audit, dewan direksi dan reputasi auditor tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

Keterbatasan penelitian ini adalah: Penggunaan sampel dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur, sehingga hasil penelitian ini tidak bisa digeneralisasikan untuk semua jenis perusahaan yang terdaftar di BEI. Adjusted  $R^2$  pada penelitian sebesar 5,2% artinya pengaruh variabel independen terhadap manajemen laba sangat rendah, masih banyak faktor-faktor lain yang lebih berpengaruh terhadap manajemen laba. Pengukuran reputasi auditor dalam penelitian ini hanya menggunakan ukuran KAP.

Saran untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat melengkapi keterbatasan penelitian

yaitu: Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba, misal leverage karena perusahaan yang mengalami default (tidak dapat melunasi utangnya pada saat jatuh tempo) diduga akan cenderung melakukan manajemen laba. Untuk penelitian selanjutnya, reputasi auditor diukur berdasarkan latar belakang pendidikan, jenis pelatihan yang dilakukan dan masa kerja auditor

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustia, Dian. (2013). Pengaruh Faktor Good Corporate Governance, Free Cash Flow, dan Leverage Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 15., No. 1., Hal:27-42.
- Azlina, Nur. (2010). Analisis Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba. *Pekbis Jurnal*, Vol. 2., No. 3., Hal: 355-363.
- Boediono, Gideon SB. (2005). Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba Dengan Menggunakan Analisis Jalur. *Simposium Akuntansi Nasional VIII*. Solo.
- Christiantie, J., Christiawan, Jogi. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Reputasi KAP terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *Jurnal Business Accounting Review*, Vol. 1. Universitas Kristen Petra.
- Ghozali, Imam. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Badan Penerbit: Universitas Diponegoro, Semarang.
- Hardiningsih, Pancawati. (2010). Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan. *Kajian Akuntansi*, Vol.2., No. 1., Hal: 61-76,ISSN: 1979-4886.
- Herawaty,et all. (2010). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Independensi Auditor, Kualitas Audit, dan Faktor Lainnya Terhadap Manajemen Laba. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*, Vol. 12, No.1.,Hal: 53-68.
- Husni, Raudhatul. (2012). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Leverage dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba.
- Jensen, M. (1993). The Modern Industrial Revolution, Exit, And The Failure of The Internal Control System. *Journal of Financial Economics* 48, 831-880.
- Praditia, Okta, R. 2010. Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba dan nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). *Jurnal Akuntansi & Auditing*, Vol. 7., No. 1., Hal: 47-63. Universitas Diponegoro, Semarang.

- Purwandari, Indri, W. (2011). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktek Manajemen Laba (Earning Management). Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Prajitno, Bella.,Christiawan, Yulius. (2013). Analisis Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Reputasi Kantor Akuntan Publik terhadap Aktivitas Manajemen Laba. *Business Accounting Review*.Vol.1.
- Rahmawati, Hikmah, I. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Perbankan. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Santoso, Agnes, F. (2013). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Earnings Management Pada Badan Usaha Sektor Property dan Real Estate yang Terdaftar DI BEI Periode 2009-2012.*Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, Vol. 02., No. 02. Universitas Surabaya.
- Sari, Dwi, A. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba. *Journal Of Accounting*. Hal:1-17. Uswantoro University
- Setiawan, Teguh. (2009). Analisis Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Terhadap Praktek Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Akuntansi Kontemporer*, Vol. 1., No. 2., Hal:99-122.
- Setiyarini & Purwanti, L. (2010). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Perusahaan.Universitas Brawijaya.
- Subhan. (2011). Pengaruh Good Corporate Governance dan Leverage Keuangan terhadap Manajemen Laba Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI). Universitas Madura.
- Ujiyantho dan Pramuka. (2010). Mekanisme Corporate Governance, Manajemen Laba dan Kinerja Keuangan, Simposium Nasional Akuntansi X. Ikatan Akuntan Indonesia, Vol.2, No.1., Hal: 61-76.
- Widyaningdyah, Agnes Utari. (2001). Analisis Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Earnings Management Pada Perusahaan Go Public Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 3, No. 2.Universitas Kristen Petra.
- Wulandari, N.P.Y & Budiarta, I Ketut. (2014). Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen Dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan. ISSN: 2302-8556. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana.

## PENGARUH KONTRIBUSI PERTAMBANGAN TERHADAP EKSPOR PADA KONTRIBUSI PERTANIAN TERHADAP EKSPOR DI INDONESIA PERIODE 2007-2013<sup>1</sup>

Sultan<sup>2</sup>

***Abstract:** Influence Contributions Mining to Export on Contributions of Agriculture to export in Indonesia Period 2007-2013. Indonesia constitute one of the countries rich in natural resources. Wealth is expected to boost economic growth moving forward. The study was conducted by a national scope Indonesia for the period 2007 - 2013. The research object is the mining sector and the agricultural sector and the export volume is taken from Central Bureau of Statistics reports that up-date and on-line. The main objective of this study was to analyze the effect of the mining sector in the agricultural sector in Indonesia the period 2007 - 2013. To achieve this objective, statistically in both the agricultural sector and the mining sector's contribution to exports in that time period. The results showed that there was a positive impact of the mining sector in the agricultural sector are very significant. Therefore, the mining sector influenced the increase in agricultural production in Indonesia.*

**Abstrak:** Pengaruh Kontribusi Pertambangan terhadap Eskpor pada Kontribusi Pertanian terhadap Ekspor di Indonesia Periode 2007-2013. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi yang semakin maju. Penelitian dilakukan dengan lingkup nasional di Indonesia untuk periode 2007–2013. Obyek penelitian adalah sektor pertambangan dan sektor pertanian serta volume ekspor yang diambil dari laporan Badan Pusat Statistik yang up-date dan on-line. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sektor pertambangan pada sektor pertanian di Indonesia periode 2007-2013. Untuk mencapai tujuan itu, secara statistik pada kedua sektor pertanian dan kontribusi sektor pertambangan untuk ekspor dalam periode waktu tersebut. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari sektor pertambangan pada sektor pertanian yang sangat signifikan. Oleh karena itu, sektor pertambangan mempengaruhi peningkatan produksi pertanian di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sektor pertambangan, Sektor pertanian, Volume ekspor

### PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumber daya alam melimpah dengan potensi luar biasa untuk dapat dioptimalkan untuk kemajuan bangsa. Namun teori sederhana yang menyatakan bahwa seseorang yang memiliki sumber daya besar akan memiliki tingkat keberhasilan besar, jelas tidak terbukti dalam konteks Negara Indonesia. Kenyataan ini pastinya menyimpan sejuta harapan bagi rakyat Indonesia, yang menurut amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945, “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk

1 Ucapan terima kasih kepada Dr. Mulyanto ME, Dosen PDIE FEB UNS yang banyak membantu dan memotivasi dalam karya ini.

2 Dosen Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Yogyakarta, email: sultantririan@yahoo.co.id

sebesar-besar kemakmuran rakyat". Kemakmuran rakyat menjadi amanat pemerintah dalam mengelola kekayaan alam tersebut.

Kondisi penguasaan terhadap pengelolaan sumber daya mineral minyak dan gas Indonesia mengakibatkan "Ayam mati di Lumbung Padi". Hal ini menjadi sebuah ironi bagi negara yang sangat kaya dengan sumber daya alam. Fenomena kelangkaan energi minyak dan gas bumi di tanah air masih merupakan masalah utama yang dihadapi oleh masyarakat dalam proses pembangunan nasional yang bukan semata-mata diakibatkan oleh kurangnya produksi akan tetapi diakibatkan oleh lemahnya kebijakan yang mengatur sistem dan mekanisme pemanfaatan energi minyak dan gas bumi nasional untuk kepentingan rakyat.

Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya sumber daya mineral khususnya minyak dan gas bumi (migas) yang sudah menjadi komponen sangat penting dalam peradaban kehidupan manusia dalam perannya sebagai sumber energi. Sumber daya migas merupakan aset nasional yang perlu dikelola seoptimal mungkin dengan memaksimalkan peran serta seluruh komponen bangsa untuk meningkatkan kinerja dan produktivitasnya.

Benarkah bahwa Indonesia mampu memenuhi kebutuhan konsumsi energi nasional secara mandiri? Benarkah Indonesia dapat dengan nyaman mengatur kebutuhan rakyatnya akan energi? Fakta yang ada tidak menunjukkan demikian. Bukankah masih terjadi antrian minyak tanah, BBM, dan gas di berbagai tempat? Bukankah meroketnya harga minyak bumi dunia menyebabkan gonjang ganjing kehidupan bangsa kita? Lalu mengapa?

Pengelolaan sumber daya mineral sektor pertambangan merupakan salah satu sektor industri yang memegang peranan penting dalam perekonomian Indonesia, hal ini disebabkan karena produk pertambangan memiliki nilai tambah yang tinggi dibandingkan dengan sektor lain. Sebelum sektor pertambangan menjadi andalan, ekonomi Indonesia terkenal sebagai negara agraris. Pertanian adalah andalan ekonomi karena menyumbang hampir 60% dari pendapatan Indonesia pada tahun-tahun sebelumnya.

Sektor pertanian Indonesia telah menurun sangat signifikan terhadap pangsa PDB dan dalam jangka sepuluh tahun terakhir ini. Kontribusi sektor pertanian sebagai persentase dari total ekspor di Indonesia pada tahun 2007 adalah 24% yang telah mengalami penurunan hingga tahun 2013 sebesar 18%. Ada banyak faktor yang menghambat transformasi perluasan pertanian, di antaranya adalah pedesaan, migrasi perkotaan, investasi rendah, pengangguran, kemiskinan, keterbatasan teknologi.

Salah satu faktor yang paling berhubungan untuk mengimbangi produktivitas pertanian di Indonesia adalah sektor pertambangan. Kekayaan sumber daya alam menciptakan lingkungan ekonomi yang menekan insentif untuk pertanian. Dengan sektor pertambangan telah menyebabkan perubahan peran sektor pertanian. Indonesia sekarang bergantung pada berbagai jenis pertambangan sebagai sumber pendapatan dan devisa. Uang bisa didapat dengan mudah dari sektor tersebut, sehingga tenaga kerja di pertanian beralih ke pertambangan. Terlepas dari semua upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk melingkan sektor pertanian ke sektor pertambangan dan sektor ini masih didorong oleh dampak dari sektor pertambangan lainnya.

Bagaimana pengaruh sektor pertambangan berdampak pada sektor pertanian yang perlu dikembangkan. Oleh karena itu, dampak lebih dari ketergantungan pada minyak bumi untuk sektor pertanian harus repot-repot pikiran seseorang, karena tidak ada bangsa yang bisa bertahan hidup tanpa makanan.

Pembatasan masalah, dari sembilan sektor dalam PDB, hanya sektor Pertanian dan sektor pertambangan serta volume ekspor yang menjadi obyek yang diteliti dan dianalisis. Perumusan masalah, bagaimana pengaruh sektor pertambangan pada sektor pertanian berdasarkan kontribusi terhadap ekspor di Indonesia periode 2007 – 2013 ?.

Tujuan penelitian menganalisis pengaruh sektor pertambangan pada sektor pertanian terhadap ekspor di Indonesia periode 2007–2013. Kondisi sektor pertanian dalam perekonomian Indonesia dan sektor pertambangan memiliki peran sangat penting. Banyak peneliti mengamati dan menganalisis baik di bidang ekonomi maupun ilmu sosial lainnya telah meneliti tentang masalah sektor pertambangan dengan sektor pertanian. Perekonomian Indonesia termasuk negara kaya akan sumber daya alam tambang dan pertanian. Diharapkan antara sektor-sektor tersebut tidak saling mengabaikan.

Garba (2013) menganalisis implikasi dari ketergantungan pada sektor minyak bumi sebagai satu-satunya sumber utama devisa bagi negara dan mencoba untuk mengusulkan beberapa cara yang mungkin bisa menjadi penguatan ekonomi di Nigeria di masa datang dengan sektor pertanian.

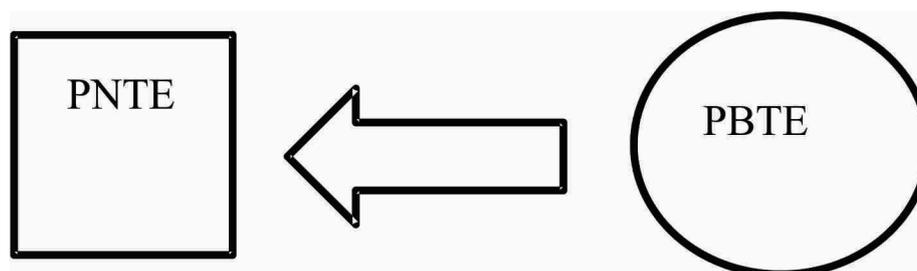
Kareem dkk (2012) menguji pertumbuhan ekonomi dengan FDI pertambangan sektor minyak Nigeria sebagai strategi pembangunan. Hubungan variabel pertambangan dengan variabel pertanian sebagai sektor perekonomian di Indonesia. Kedua sektor di kaitkan dengan volume ekspor selama periode penelitian. Sebagai variabel dependen adalah kontribusi pertanian terhadap ekspor sedangkan variabel independen yaitu kontribusi pertambangan terhadap volume ekspor.

Peach (2011) mengkaji implikasi lingkungan dari FDI sektor tambang minyak terhadap pendidikan kesehatan dan ekonomi daerah. Al-Shalawi dkk (2013) menunjukkan bahwa permintaan minyak mengalami peningkatan tiap tahunnya. Kareem (2012) strategi pembangunan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi melalui FDI sektor minyak. Gerba (2013) kebijakan berwawasan luas terhadap peningkatan konsumsi minyak di Saudi Arabi dan merasionalisasi konsumsi energi. Karikari (2007) seiring dengan tren ekspor minyak surplus maka harga minyak mentah juga meningkat. Banyak reaksi terhadap kenaikan harga minyak yang bersifat permanen.

Masalah kebijakan pembangunan ekonomi di Indonesia dilihat dari sektor-sektor yang ada. Dua sektor yang menjadi obyek penelitian yaitu sektor pertanian dan sektor pertambangan. Dengan kedua sektor tersebut dikaitkan dengan volume ekspor selama periode 2007 – 2013. Hubungan antara sektor pertambangan dengan sektor pertanian sangat berkorelasi dan signifikan.

Gambar

Hubungan Sektor Pertambangan dengan Sektor Pertanian



Hipotesis dalam penelitian yaitu, diduga bahwa rasio pertambangan terhadap ekspor (PBTE) pada rasio pertanian terhadap ekspor (PNTE) berpengaruh positif dan signifikan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini dapat memberi gambaran kajian terhadap pengembangan ekonomi mineral yang dikaitkan dengan sektor-sektor perekonomian dan perdagangan luar negeri yaitu volume ekspor selama periode 2007–2013. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Kekayaan tersebut diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi

yang semakin maju. Penelitian dilakukan secara lingkup nasional Indonesia untuk periode 2007–2013. Obyek penelitian adalah sektor pertambangan dan sektor pertanian serta volume ekspor yang diambil dari laporan Badan Pusat Statistik yang up-date dan on-line. Data pada penelitian yang dikumpulkan dan diolah dari instansi terpercaya.

Variabel yang diteliti adalah rasio pertambangan terhadap volume ekspor yang dinyatakan dalam rupiah sebagai variabel independen. Adapun variabel dependennya adalah rasio sektor pertanian terhadap volume ekspor yang dinyatakan dalam rupiah selama periode 2007–2013. Teknik analisis data dengan analisis koefisien korelasi (R) untuk menguji derajat hubungan antara variabel dependen dan independen. Juga digunakan adalah koefisien determinasi ( $R^2$ ) untuk pengujian *goodness of fit*, F-test untuk menguji signifikansi estimasi regresi dan besarnya koefisien regresi yang dihasilkan. Dalam rangka memenuhi asumsi klasik OLS korelasi non-serial dan varians konstan variabel random (u), uji kedua yaitu Durbin-Watson (d-statistik) test digunakan untuk mendeteksi autokorelasi. Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = A + \beta X + u \quad \dots\dots\dots(1)$$

atau

$$PNTE = A + \beta PBTE + u \quad \dots\dots\dots(2)$$

dimana

- PNTE = variabel dependen, yaitu rasio/kontribusi sektor pertanian terhadap ekspor.
- A = konstan, yang berarti nilai ekspor pertanian saat ekspor pertambangan adalah nol.
- $\beta$  = koefisien-nilai parameter X
- PBTE = variabel independen/bebas, yaitu rasio/kontribusi pertambangan terhadap ekspor.
- u = *error term*.

## ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian dilakukannya di Indonesia dengan sumber data BPS.go.id, Obyek penelitian pada sektor-sektor PDB dan nilai volume ekspor selama periode 2007-2013.

Tabel  
Hasil Regresi

Dependent Variable: PNTE				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic Prob.	
C	0.021136	0.010327	2.046700	0.0960
PBTE	1.478360	0.083593	17.68515	0.0000
R-squared	0.984265	Mean dependent var	0.200882	
Adjusted R-squared	0.981118	S.D. dependent var	0.035234	
S.E. of regression	0.004842	Akaike info criterion	-7.588221	
Sum squared resid	0.000117	Schwarz criterion	-7.603675	
Log likelihood	28.55877	Hannan-Quinn criter.	-7.779233	
F-statistic	312.7644	Durbin-Watson stat	1.360338	
Prob(F-statistic)	0.000011			

Sumber: data diolah,

Hasil regresi sebagai berikut:

$$PNTE = 0,021136 + 1,478360PNTE + u$$

$$(2,046)** \quad (17,68515)***$$

$$R = 0,992101 \quad R^2 = 0.984265 \quad ** = \text{signifikan } 5\% \quad *** = \text{signifikan } 1\%$$

Hasil penelitian menggambarkan bahwa: PNTE yang merupakan variabel dependen, yang merupakan sumbangan sektor pertanian terhadap ekspor berbanding searah dengan PBTE variabel independen, yaitu sektor Pertambangan. Hubungan searah ini ditunjukkan dengan nilai t (17,68) yang positif (1,4783) ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 rupiah pada ekspor pertambangan akan menaikkan 1,478 rupiah ekspor pertanian selama periode penelitian.

Konstanta (0,0211) menunjukkan bahwa pada saat kontribusi pertanian untuk ekspor nol, kontribusi pertambangan untuk ekspor akan menjadi rasio kecil dengan nilai absolut dari koefisien ekspor pertambangan yaitu,  $0,0211/1,4783 = 0,01427$ . Artinya bila tidak ada dari pertambangan, sektor ekspor sektor pertanian Indonesia sebesar 0,01427 rupiah.

Koefisien Korelasi (R): Nilai R diberikan sebagai; (0,992) menunjukkan bahwa ada korelasi positif sempurna antara kontribusi pertambangan untuk ekspor dan kontribusi pertanian untuk ekspor. Ini berarti bahwa sebagai kontribusi pertambangan untuk ekspor meningkat maka sektor pertanian juga meningkat.

Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>): Nilai R<sup>2</sup> dihasilkan sebesar; (0,98) menunjukkan bahwa model regresi adalah cocok, hampir tepat. Ini berarti garis regresi cocok dengan data penelitian, karena garis menjelaskan 98% dari variasi total nilai kontribusi sektor pertanian. Hanya 2% dari total variasi dalam PNTE yang dikaitkan dengan variabel gangguan (U).

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka hipotesis dalam penelitian ini yang menyatakan rasio pertambangan terhadap ekspor (PBTE) pada rasio pertanian terhadap ekspor (PNTE) berpengaruh positif dan signifikan terbukti.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh sektor pertambangan pada sektor pertanian di Indonesia periode 2007-2013. Untuk mencapai tujuan itu, secara statistik pada kedua sektor pertanian dan kontribusi sektor pertambangan untuk ekspor dalam periode waktu tersebut. Hasil menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dari sektor pertambangan pada sektor pertanian yang sangat signifikan. Oleh karena itu, sektor pertambangan mempengaruhi peningkatan produksi pertanian di Indonesia. Diharapkan dimasa yang akan datang kedua sektor perekonomian itu menjadi andalan dalam memajukan perekonomian Indonesia. Dari hasil penelitian disarankan menambah sektor-sektor ekonomi yang lain dengan mengkaitkan perdagangan luar negeri baik ekspor maupun impor. Keterbatasan, kami menyadari berbagai keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian semoga dengan hasil ini dapat bermanfaat untuk kajian selanjutnya dengan tema yang sama..

**DAFTAR PUSTAKA**

- Aleksandrova, A. dan J. Lubys. (2004). "Application of the Structure-Conduct-Performance Paradigm in a Transition Economy: Explaining Reported Profitability of the Largest Latvian Firms". *SSE Riga Working Papers*. 8: 3-11.
- Alhayki, ZJ. (2014). The Dynamic Co-movements Between Oil and Stock Market Returns in: The Case of GCC Countries. *Journal of Applied Finance and Banking*. Vol. 4 No. 3: 103-113.
- Al-Sahlawi, M.A; and K. Fahd, (2013). Data Mining Application in Forecasting the Demand for Oil in Saudi Arabia, *The Journal of American Business Review*, Cambridge, 2 (1): 308-314.
- Badan Pusat Statistik. 1980-2014. *Indikator Industri Besar dan Sedang Tahun 1980-2014*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 1997-2010. *Indikator Industri Besar dan Sedang Tahun 1997-2006*. Badan Pusat Statistik, Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. 2014. *Statistik Indonesia 2014*. Badan Pusat Statistik, Jakarta Indonesia.
- Collins dan Preston, (1968). *Penggunaan variabel PCM sebagai Proksi*, penelitian ilmiah.
- Garba, S.A; (2013). Regression Test of Independence of the Impact of Petroleum Industry on the Agricultural Sector in Nigeria (1972-2009), *Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review*, 2 (6): 31-38.
- Grafton, R.Q; W. Adamowicz, D.D.H. Nelson, R.J. Hill and S.Renzetti, (2004), *The Economics of the Environment and Natural Resources*, Blackwell Publishing Ltd.
- Hackett, S.C, (2006), *Environmental and Natural Resources Economics Theory Policy and The Sustainable Society*, 3rd Editon, ME. Sharpe Armonk, New York London, England.
- Halac, U., Taskin, FE., and Cagli, EC. (2013). The Turkish Stock Market Integration With Oil Prices: *Cointegration Analysis with Unknown Regime Shifts. Panoeconomicus*. Vol. 4: 499-513.
- <http://energitoday.com/2013/12/03/sektor-migas-topang-pertumbuhan-ekonomi-indonesia>, diakses 10 Mei 2015.
- <http://migas.esdm.go.id/post/read/Paradigma-Migas-Sebagai-Penggerak-Pertumbuhan-Ekonomi-Nasional>, diakses 10 Mei 2015.

<http://umkmnews.com/news/perlambatan-migas-pengaruhi-pertumbuhan-ekonomi-jatim.html>, diakses 10 Mei 2015.

<http://www.bps.go.id/>, diakses 17 Januari 2013.

<http://www.neraca.co.id/article/51633/Pemerintah-Rampungkan-Draft-Revisi-UU-Migas>, diakses 10 Mei 2015.

<http://www.tambangnews.com/serba-serbi/opini/144-sektor-sektor-energi-pendorong-pertumbuhan-ekonomi.html>, diakses 10 Mei 2015.

Jumadilova, S. (2012). The Role of Oil and Gas Sector For The Economy of Kazakhstan. *International Journal of Economic Perspectives*. Vol. 6 No. 1: 295-303.

Kareem, S.D; F. Kari, G.M. Alam, G.O. Makua C; M.O. David, O.K. Oke, (2012). Foreign Direct Investment and Environmental Degradation of Oil Exploitation: The Experience of Niger Delta, *The International Journal of Applied Economics and Finance*. 6 (4): 117-126.

Karikari, J.A; G. Agbara, H. Dezhbakhsh, and B. El-Osta, (2007). The Impact of Mergers in U.S. Petroleum Industry on Wholesale Gasoline Prices, *Contemporary Economic Policy*, 25 (1): 46-56.

Li, Z., and Zhao, H. (2011). Not All Demand Oil Shocks are Alike: Disentangling Demand Oil Shocks in the Crude Oil Market. *Journal of Chinese Economic and Foreign Trade Studies*. Vol. 4 No. 1: 28-44.

Mansor, N., Ismail, Alwi, MAM., and Anwar, N. (2013). Relationship between Spiritual Leadership and Organizational Commitment in Malaysians Oil and Gas Industry. *Asian Social Science*. Vol. 9. No. 7: 179-191.

McSweeney, E.J; and and A.C. Worthington, (2008). A Comparative Analysis of Oil as a Risk Factor in Australian Industry Stock Returns, 1980-2006, *Emerald Studies in Economics and Finance*, 25 (2): 131-145.

Mulyanto, (2015), *Seminar Masalah dan Kebijakan Pembangunan*, Program Doktor Ilmu Ekonomi, FEB, UNS. Surakarta.

Nisbet, C Matthew., Maibach, E., and Leiserowitz, A. (2011). Framing Peak Petroleum as a Public Health Problem: Audience Research and Participatory Engagement in the United State. *American Journal of Public Health*. Vol. 101 No. 9: 1620-1626.

Pardalo, P.M; E. Bjørndal, M. Bjørndal, and M. Ronnquist, (2010). *Energy System, Energy Natural Resources and Environmental Economics*, Springer Heidelberg Dordrecht, London New York.

- Peach, J, and C.M. Starbuck, (2011). Oil and Gas Production and Economic Growth in New Mexico, *Journal of Economic Issues*, XLV (2): 511-526.
- Pindick, R. S. dan D. L. Rubinfeld. (1991). *Econometric Model and Economic Forecast*, 3rd Edition. Mc-Hill International Editions, New York.
- Rani, Iram., Langhari, MK., and Jatoi, MM. (2011). Attock Petroleum Limited Under Swot Analysis (A Strategic Future). *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*. Vol. 2 No. 12: 784-792.
- Ruester, S, and A. Neumann, (2009). Linking Alternative Theories of The Firm – a First Empirical Application to the Liquefied Natural Gas Industry, *Journal of Institutional Economics*, 5 (1): 47-64.
- Saari, M.Y; A.F. Puasa, and K.H. Hassan, (2007). The Impact of World Crude Oil Price Changes on the Malaysian Economy: an Input-Output Analysis, *Malaysian Journal of Economic Studies*, 44 (1): 1-12.
- Sabir, M, and Q.A. Malik, (2012). Determinants of Capital Structure – A Study of Oil and Gas Sector of Pakistan, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, 3 (10): 395-400.
- Shepherd, W. G. (1990). *The Economics of Industrial Organization*. Third Edition. Prentice-Hall, New Jersey.
- Sultan, (2010). Analisis Pengaruh Bahan Bakar Bensin, solar dan Pelumas terhadap Produksi Industri Besar dan Sedang Furniture dan ndustri Lainnya di Propinsi D.I. Yogyakarta, *Buletin Ekonomi FE UPN "Veteran" Yogyakarta*, 8 (3): 210-216.
- Sultan, (2011). Produksi Minyak Bumi dan Gas Alam Indonesia di Era Keterbukaan Ekonomi, *Prosiding Seminar Nasional dan Call for Paper Membangun dan Meningkatkan Daya Saing Nasional di Era Keterbukaan Ekonomi, FE UPN "Veteran" Yogyakarta* November 2011: 225-234.
- Sultan, (2013). Analysis Estimated Production and Growth Rate Fuel Oil (BBM) Production Indonesia in the Period 2003-2025, *Prosiding Conference International and Call for Paper, Transformation Malaysia Indonesia Relation : Toward Asean Community, FE UPN "Veteran" Yogyakarta*, 25 Januari 2013: 187-192.
- Yalin, L., Huo Li, and Peng Sun. (2006). Analysis and Countermeasure Research of The Current Compensation System among Chinese Scientific and Technical Petroleum Professionals. *Canadian Social Science*. 2 (3): 1-6.